



**SISTEM
KESATUAN HIDUP SETEMPAT
DAERAH LAMPUNG**

irektorat
dayaan

8

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH**

1980/1981

3426 / *Handwritten signature*

MILIK DEP. P dan K
Tidak diperdagangkan

**SISTEM
KESATUAN HIDUP SETEMPAT
DAERAH LAMPUNG**

Editor : Rivai Abu



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI KEBUDAYAAN DAERAH

1980/1981

DAFTAR ISI

Pengantar	
Pendahuluan	1
Identifikasi	9
Bentuk Komunitas	37
Sistem Pelapisan Sosial	49
Pimpinan Masyarakat	75
Sistem Pengendalian Sosial	83
Beberapa Analisa	93
Daftar Kepustakaan	97
I n d e k s	98
Salinan Piagam Adat	101
Lampiran Peta-peta	

P R A K A T A

Sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP) Tahun Anggaran 1981/1982 Nomor : 447/XXIII/3/1981 tanggal 16 Maret 1981 di mana sasaran dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Lampung untuk Tahun Anggaran 1981/1982 antara lain di samping untuk menghasilkan 5 (lima) judul Naskah Kebudayaan Daerah seperti telah dilakukan sejak tahun 1977/1978 juga pada tahun ini mendapatkan kepercayaan yang diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menerbitkan 2 (dua) judul Naskah Kebudayaan Daerah Lampung, salah satu diantaranya adalah :

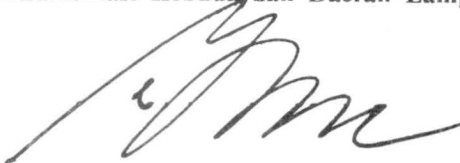
1. Sistem Kesatuan Hidup Setempat (tahun 1980/1981).

Dengan telah selesai dan berhasilnya Proyek ini dalam mencapai tujuannya, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Ditjen Kebudayaan Departemen P dan K, Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (Pusat) Jakarta, Gubernur/KDH Tingkat I Lampung, Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Lampung, Bupati/KDH Dati II Lampung dan semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sehingga berhasilnya pencetakan/penerbitan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadikan salah satu sumbangan dalam rangka ikut menggali dan melestarikan kebudayaan daerah khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya serta berguna bagi nusa dan bangsa.

Telukbetung, Maret 1982

**Pemimpin Proyek Inventarisasi dan
Dokumentasi Kebudayaan Daerah Lampung,**



Dra. LEILA KARTAWIDJAYA.

KATA SAMBUTAN

Salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan dan kebudayaan adalah pengembangan kebudayaan nasional. Terkandung pula dalam pengertian ini pengembangan kebudayaan-kebudayaan daerah, mengingat pada dasarnya kebudayaan nasional itu terdiri dari keanekaragaman berbagai kebudayaan daerah yang ada di seluruh Indonesia ini.

Daerah Lampung sebagaimana daerah Indonesia lainnya memiliki pula kekayaan kebudayaan asli yang khas, baik yang bersifat kebudayaan material maupun yang bersifat kebudayaan spiritual. Kekayaan kebudayaan demikian ini patut untuk mendapat perhatian, dipelihara, dibina dan dikembangkan sebagai sumbangan sangat berharga dalam pengembangan kebudayaan nasional.

Salah satu kebudayaan masyarakat Lampung asli adalah dalam bentuk Sistem Kesatuan Hidup, yang mengandung berbagai ajaran moral dan adat istiadat yang bernilai luhur dan masih cukup relevan bagi perkembangan masyarakat kita sekarang, terutama bagi pembinaan kepribadian bangsa.

Karena itu kami menyambut baik dan sangat menghargai penerbitan buku yang berjudul : "Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Lampung", sebagai salah satu hasil dari Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Lampung tahun 1980/1981.

Buku ini sangat besar artinya sebagai langkah-langkah awal pendokumentasian dari berbagai aspek kebudayaan daerah ini dan patut dibaca oleh masyarakat kita, terutama para generasi muda sebagai generasi pewaris perjuangan dan pembangunan bangsa.

Kami yakin penerbitan ini akan memberikan sepercik sumbangsih bagi pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan sekarang.

Telukbetung, 15 Pebruari 1982

Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K

Propinsi Lampung,



E.P. HUTABARAT

NIP. 130038267

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah : Sistem Kesatuan Hidup Setempat Daerah Lampung Tahun 1980/1981.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Rizani Puspawidjaya SH, Idrus Kreansyah SH, Soleman Biasane Taneko SH dan Razi Arifin BA, dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Rivai Abu dan Dr. S. Budhisantoso.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, 28 Januari 1982

Pemimpin Proyek

(Drs. Bambang Suwondo)

NIP. 130117589

**SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Di-
rektorat Sejarah dan Nilai Tradisionil Direktorat Jenderal Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1979/
1980 telah berhasil menyusun naskah "Sistem Kesatuan Hidup Setempat
Daerah Lampung" (Mengandung Nilai-nilai Pancasila).

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik
dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak
Perguruan Tinggi, Kanwil Departemen P dan K, Pemerintah Daerah
serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan
tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan
datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan
warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih
dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan nas-
kah ini merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit
artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya
pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, 11 Desember 1980
Direktur Jenderal Kebudayaan,

Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

BAB I

PENDAHULUAN

MASALAH.

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya yang sekarang menjadi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, belum sepenuhnya dapat melayani data yang terjalin di dalam bahan kesejarahan, folklore, adat istiadat, geografi budaya baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan maupun kepentingan masyarakat.

Dalam hal adat-istiadat, walaupun semenjak tahun 1975 telah dilakukan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi, masih sangat dirasakan perlunya dilanjutkan kegiatan tersebut.

Pada tahun anggaran 1980 — 1981, aspek ini mengambil tema "Sistim Kesatuan Hidup Setempat" atau yang biasa pula disebut dengan komunitas. Komunitas itu berdasarkan luas jangkauan wilayahnya yang terdiri dari bermacam-macam tingkatan. Sasaran inventarisasi dan dokumentasi ini adalah komunitas kecil dari suku bangsa Lampung yakni dalam bentuk anak, tiyuh atau pekon, yang pada dasarnya adalah bentuk yang sama dengan nama yang berlain-lainan.

Pada suatu komunitas kecil terdapat wujud kehidupan seperti wujud ideal, wujud sistim sosial dan wujud fisik. Ketiga wujud kebudayaan itu menjadi unsur pengikat yang melahirkan rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dari pendukungnya. Oleh karena itu wujud-wujud kebudayaan pada suatu komunitas memegang peranan yang sangat penting bagi pendukungnya.

Wujud kebudayaan dari suatu komunitas dapat pula diperinci lagi menjadi idea-idea, gagasan-gagasan, norma-norma, peraturan-peraturan, tingkah laku sosial dan bermacam-macam kebudayaan fisik, yang dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses pergeseran kebudayaan di Indonesia, khususnya di pedesaan, telah menyebabkan pergeseran wujud-wujud kebudayaan dalam suatu komunitas. Hal ini mungkin telah menggeser bentuk dan sifat dari komunitas itu sendiri.

Pembangunan yang giat dilaksanakan dewasa ini, pada hakekatnya merupakan proses pembaharuan di segala bidang. Proses ini menuntut pula perubahan-perubahan dalam hal kebudayaan suatu masyarakat, termasuk didalamnya komunitas kecil. Pergeseran-pergeseran itu berjalan baik secara lambat maupun cepat, selain telah menggeser wujud-

wujud kebudayaan lama, di lain pihak mungkin pula menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial pada masyarakat pendukungnya.

Karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan aneka ragam kebudayaan, maka inventarisasi dan dokumentasi tentang komunitas itu, tidak mungkin dilakukan hanya dalam suatu daerah atau suku bangsa saja. Untuk memperoleh gambaran yang mendekati kenyataan mengenai komunitas itu, maka harus dilakukan inventarisasi dan dokumentasi di seluruh wilayah Indonesia.

Belum adanya data dan informasi yang memadai tentang keadaan-keadaan komunitas di seluruh Wilayah Indonesia, adalah merupakan pula salah satu masalah yang mendorong adanya inventarisasi dan dokumentasi ini. Data dan informasi itu akan menjadi bahan utama dalam pembinaan kebudayaan pada umumnya atau komunitas pada khususnya.

TUJUAN.

Tujuan jangka panjang adalah tersusunnya kebijaksanaan Nasional di bidang kebudayaan. Kebijakan Nasional di bidang kebudayaan meliputi : pembinaan kebudayaan Nasional, pembinaan kesatuan Bangsa, peningkatan apresiasi Budaya, dan peningkatan ketahanan Nasional.

Tujuan jangka pendek atau dapat pula disebut tujuan khusus adalah agar terkumpulnya bahan-bahan tentang sistem komunitas dari seluruh Wilayah Indonesia. Dengan inventarisasi dan dokumentasi ini diharapkan terungkapnya data dan informasi tentang sistem komunitas dari satu daerah, yang tersusun dalam bentuk suatu naskah.

RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup materi. Suatu komunitas adalah suatu kesatuan yang lahir dari ikatan yang erat antara kelompok sosial dengan tempat kediamannya, yang didukung oleh rasa bangga, rasa cinta, rasa kesatuan dan persatuan. Suatu komunitas sebagai kelompok sosial dan tempatnya dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu komunitas besar dan komunitas kecil. Kota, Propinsi dan Negara dikelompokkan ke dalam komunitas besar, sedangkan Desa, Kampung atau Rukun Tetangga dan sebagainya dikategorikan sebagai komunitas kecil, yang selanjutnya akan dijadikan sasaran kegiatan inventarisasi dan dokumentasi ini. Ciri-ciri komunitas seperti wilayah, cinta wilayah dan kepribadian kelompok, dipunyai baik oleh komunitas besar maupun komunitas kecil. Sedangkan pada komunitas kecil dapat ditambahkan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Saling kenal mengenal sesama warganya.
2. Tidak ada aneka warna yang besar antara bagian atau kelompok yang ada didalamnya.
3. Sebagian besar lapangan-lapangan kehidupan dapat dihayati secara bulat.

Wujud dari komunitas kecil yang ada di Indonesia, antara lain terlihat dalam bentuk, misalnya Keucik (Gecik), nagari, huta, dusun, kampung, desa dan lain sebagainya. Selain membawakan nama yang berbeda-beda, di dalam beberapa hal komunitas-komunitas kecil itu memperlihatkan pula perbedaan, baik dalam tingkatannya maupun wujud kebudayaan yang menjadi isinya. Untuk mendapatkan gambaran tentang komunitas kecil, maka ditentukan beberapa materi pokok, yang menjadi ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi ini. Materi pokok itu adalah : bentuk, sistem pelapisan sosial, pimpinan masyarakat, dan sistem pengendalian sosial. Untuk dapat mengamati dan menghayati secara baik sasaran inventarisasi dan dokumentasi ini, perlu suatu gambaran umum yang meliputi : lokasi, penduduk dan latar belakang sosial budaya dari suatu komunitas kecil.

Ruang lingkup operasional. Adapun ruang lingkup operasional dari inventarisasi dan dokumentasi ini ialah apa yang dalam Bahasa Daerah Lampung disebut dengan **anek**, **tiyuh** dan **pekon**. Ke tiga istilah itu dapat disamakan dengan kampung. Anek, tiyuh dan pekon, hanyalah berbeda dalam istilah penyebutannya saja, namun mengandung pengertian yang sama, yaitu menunjuk pada suatu komunitas kecil setingkat dengan Desa atau Kampung pada masyarakat lainnya. Anek dan pekon yang dipergunakan sebagai sasaran operasional dari inventarisasi dan komunikasi ini adalah terletak di Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah dan Lampung Selatan, yaitu anek Blambangan dan pekon Walur (di Kabupaten Lampung Utara) anek Gunung Sugih di Kabupaten Lampung Tengah dan pekon Kedondong di Kabupaten Lampung Selatan. Wujud dari komunitas kecil yang dijadikan daerah operasional, tidak sama dengan wujud unit administrasi.

Anek Blambangan adalah lebih kecil dari unit administrasi yang dijadikan kampung pada saat ini, sedangkan pekon Kedondong lebih besar dari unit administrasi yang ada di daerah ini pada saat sekarang.

PROSEDUR DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENELITIAN.

Untuk melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi Aspek Adat Istiadat Daerah Lampung, dengan tema "Sistem Kesatuan Hidup Setempat", oleh Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Lampung Tahun 1980/1981 telah dibentuk suatu team yang organisasi dan personalianya adalah sebagai berikut :

K e t u a : Rizani Puspawidjaja, SH
Sekretaris : Idrus Kreansyah, SH
Anggota : Soleman Biasane Taneko, SH
Razi Arifin, BA

Semua anggota team diwajibkan melaksanakan pengumpulan data dari studi kepustakaan, sedangkan team pengumpulan data lapangan ditentukan, yaitu :

1. Soleman Biasane Taneko, SH dan Idrus Kreansyah, SH untuk anek Blambangan, dan Gunung Sugih.
2. Razi Arifin, BA untuk pekon Kedondong dan Walur.

Banyak metode yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Namun mengingat ketepatannya, maka metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang khusus digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber kepustakaan, wawancara dan observasi. Observasi di sini merupakan metode dalam mengumpulkan informasi dan data lapangan.

Kelihatannya, dalam penelitian ini metode wawancara mendalam ("depth interview") merupakan metode yang cukup baik untuk diterapkan. Agar wawancara tidak menyimpang dari masalah yang dibahas, maka perlu ditunjang dengan suatu daftar pokok-pokok pertanyaan, yang disusun atas dasar kerangka penelitian. Dipergunakan metode wawancara membawa konsekwensi adanya informan. Oleh karena itu perlu ditentukan siapa yang akan menjadi informan dalam kegiatan ini. Sesuai dengan kerangka inventarisasi dan dokumentasi, dengan berdasarkan atas pertimbangan dari berbagai faktor seperti : umur ("senioritas"), kualitas dan kuantitas pengalaman, serta kedudukan dalam masyarakat, maka ditetapkan bahwa yang menjadi informan dalam kegiatan ini adalah para pemuka masyarakat dan Kepala Kampung sebagai aparat Pemerintahan Tingkat Kampung.

Cara pengolahan data yang diterapkan di sini adalah dengan membuat klasifikasi, artinya bahwa data yang dikumpulkan disusun sesuai dengan masalah yang diteliti. Untuk mempermudah proses pengolahan data akhir, maka kepada para pengumpul data dibebankan untuk menyusun hasil wawancara sesuai dengan kerangka penelitian. Dengan demikian, dalam melakukan klasifikasi akhir, diharapkan tidak terlalu banyak menemui kesulitan.

Mengenai lokasi pengumpulan data ditentukan atas dasar pembagian masyarakat Lampung ke dalam dua kategori besar, yaitu masyarakat Lampung yang beradat Pepadun dan masyarakat Lampung yang beradat Saibatin. Berdasarkan atas hasil dari beberapa penelitian lapangan yang pernah dilakukan di daerah ini, yang menunjukkan homogenitas maka secara purposive ditentukanlah **anek** atau **pekon** yang menjadi lokasi penelitian. Pada setiap masyarakat ditetapkan dua kampung sampel, dimana kampung yang satu akan menjadi kontrol. Adapun lokasi-lokasi itu adalah :

Bagi masyarakat Lampung yang beradat Pepadun, adalah :

- a. Anek Blambangan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
- b. Anek Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah.

Bagi masyarakat Lampung yang beradat Saibatin, adalah :

- a. Pekon Walur, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Lampung Utara.
- b. Pekon Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam setiap kegiatan manapun sudah tentu mengikuti suatu tahapan tertentu. Oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian mengenai "Sistem Kesatuan Hidup Setempat" ditempuh pula secara bertahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama 15 Juni — 15 Juli 1980 merupakan tahap persiapan, yang meliputi kegiatan :
 - a. Pengerjaan kerangka penelitian.
 - b. Diskusi tentang metode yang akan digunakan.

- c. Diskusi tentang dasar-dasar penentuan informan.
 - d. Penyusunan daftar pokok-pokok pertanyaan (draft).
2. Tahap kedua 16 Juli — 17 Agustus 1980 merupakan tahap penelitian kepustakaan, yang meliputi kegiatan penelitian kepustakaan dan perbaikan daftar pokok-pokok pertanyaan
Tahap ketiga 18 Agustus — 18 September 1980, kegiatan lapangan.
 4. Tahap keempat 19 September — 30 September 1980, penyerahan data kepada pemimpin proyek.
 5. Tahap kelima 1 Oktober — 31 Nopember 1980, pengolahan data dan analisa meliputi kegiatan :
 - a. Pengolahan data
 - b. Analisa data
 - c. Penulisan laporan
 - d. Diskusi.
 6. Tahap keenam 1 Desember — 31 Desember 1980, melakukan perbaikan draft pertama.
 7. Tahap ketujuh 1 Januari 1981 — 31 Januari 1981, pengandaan.

Di atas telah disebutkan bahwa sumber data terdiri dari kepustakaan dan wawancara langsung dari masyarakat. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan mencatat. Catatan-catatan di sini dapat berupa ikhtisar, kutipan dan ulasan.

Beberapa dari hasil penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai pedoman dalam menyusun perbaikan daftar pertanyaan yang disusun pada saat kegiatan persiapan. Di dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, dilakukan wawancara secara berkelompok, hal ini ditempuh karena key informan yang telah ditunjuk oleh Kepala Kampung mengundang juga beberapa pemuka masyarakat lainnya dan secara bersama-sama membahas hal-hal yang diajukan oleh pewawancara. Alasan yang digunakan oleh key informan adalah agar dalam menjawab pertanyaan, apabila ada yang kurang tepat dapat diperbaiki oleh rekan-rekan yang hadir. Dengan demikian, dalam setiap kesempatan untuk melakukan wawancara, jumlah informan yang hadir terdiri dari beberapa orang.

Dalam wawancara itu, informan yang hadir minimal dua orang dan maksimal hanya tiga orang.

Beberapa hambatan dalam melakukan penelitian ini dapat dikemukakan di sini antara lain :

Pertama, yang menyangkut materi penelitian :

Materi penelitian yang dirasakan sulit untuk diperoleh informasinya adalah materi yang menyangkut waktu lampau. Para informan tidak dapat memberikan informasi konkrit, karena sumber pengetahuannya yang kurang. Hal-hal yang dirasakan mudah untuk diperoleh informasinya, adalah hal-hal yang bersifat tradisional, misalnya dalam bidang perkawinan, waris, sedangkan dalam bidang yang menyangkut pemerintahan agak sulit diperoleh informasinya.

Kedua yang menyangkut sikap informan :

Pada lokasi-lokasi tertentu terdapat situasi dimana para informan kurang bersifat terbuka. Hal ini berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu terutama dalam rangka stratifikasi sosial. Dalam bidang ini ada kecenderungan untuk keberatan memberikan data, karena bersangkutan dengan kepentingan beberapa anggota masyarakat setempat, dimana masalah keturunan merupakan suatu soal yang peka, yang menurut mereka hal ini sudah harus dihilangkan pada masa sekarang.

Penyajian data dalam bentuk naskah pada dasarnya merupakan laporan kegiatan ini. Sistematika laporan yang digunakan adalah sistematika laporan untuk satu suku bangsa saja, oleh karena memang suku Lampung pada dasarnya merupakan satu suku bangsa, yang hanya berbeda dalam adat-istiadatnya. Organisasi laporan adalah sebagai berikut :

1. Pengantar
2. Daftar Isi
3. Bab I — Pendahuluan
4. Bab II — Identifikasi
5. Bab III — Bentuk komunitas
6. Bab IV — Sistem Pelapisan Sosial
7. Bab V — Pimpinan Masyarakat
8. Bab VI — Sistem Pengendalian Sosial
9. Beberapa Analisa
10. Indeks
11. Bibliografi
12. Lampiran-lampiran

Untuk menulis laporan penelitian ini sebagaimana ditentukan oleh Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Lampung, team melakukan pembagian tugas penulisan. Penulisan untuk Bab I (Pendahuluan) dilakukan oleh Saudara Soleman B. Taneko, SH, Bab II (Identifikasi) oleh Saudara Razi Arifin, BA, sedangkan untuk Bab III (Bentuk Komunitas) dan Bab IV (Sistem Pelapisan Sosial) ditugaskan kembali kepada saudara Soleman B. Taneko. Untuk Bab V (Pimpinan Masyarakat) dan Bab VI (Sistem Pengendalian Sosial) oleh Saudara Rizani Puspawidjaja, SH. Mengenai beberapa analisa, konsepnya ditugaskan kepada Saudara Soleman B. Taneko.

Naskah ini pada dasarnya merupakan laporan kegiatan yang dilakukan oleh team peneliti yang telah dibentuk oleh Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Lampung. Sebagai hasil penelitian, maka naskah ini merupakan satu hasil maksimal yang dicapai oleh team peneliti aspek adat-istiadat dari penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah (IDKD) Lampung, dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Di samping naskah hasil penelitian ini mempunyai kelebihan, sudah tentu juga akan terdapat kekurangannya, dan naskah ini harus diakui. Kekurangan tersebut terutama dalam hal yang menyangkut materi, yaitu materi tentang kepercayaan, yaitu khusus materi kepercayaan dalam kerangka pengendalian sosial. Walaupun materi tersebut telah mengungkapkan hal-hal pokok, namun dirasakan oleh team masih kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan luasnya materi yang akan diungkapkan serta keterbatasan kepustakaan untuk memahami konteks itu. Suatu faktor yang perlu diperhatikan adalah, keterbatasan pemahaman dari team peneliti terhadap aspek masyarakat itu, di samping latar belakang pendidikan dari team, turut memberi andil. Dengan pengungkapan faktor-faktor di atas, kiranya bukanlah suatu hal yang harus diartikan bahwa validitas dari hasil penelitian ini berkurang.

Penelitian ini telah mengungkapkan banyaknya aspek dari kehidupan masyarakat, khususnya dalam suatu komunitas kecil. Dengan terungkapnya berbagai aspek kehidupan masyarakat itu, kiranya tidak dapat disangkal bahwa didalamnya terpaat banyak manfaat yang dapat dipetik. Misalnya, bagi pemegang kebijaksanaan dalam suatu komunitas, bahan-bahan yang demikian ini kiranya sangat bermanfaat dalam rangka pelaksanaan tugasnya dalam masyarakat. Demikian juga halnya bagi para praktisi dan semua pihak yang membutuhkan pengetahuan tentang masyarakat.

BAB II

IDENTIFIKASI

LOKASI

Letak dan keadaan alam.

Propinsi Lampung terletak antara $103^{\circ}.30'$ bujur timur dan $106^{\circ}.00'$ bujur timur, serta antara $4^{\circ}.00'$ lintang selatan, dan $6^{\circ}.00'$ lintang selatan.

Batas-batas propinsi Lampung adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Lautan Indonesia dan propinsi Bengkulu.

Suku bangsa Lampung menempati daerah yang sebelah Utara sampai di Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kedua daerah ini terletak di propinsi Sumatera Selatan. Sebelah Barat, sampai di beberapa daerah di kecamatan Bintuhan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, sedangkan sebelah Selatan sampai di beberapa daerah di Anyar Kabupaten Serang Jawa Barat, yang dikenal dengan nama Lampung Cikoneng.

Sasaran penelitian adalah suku bangsa Lampung yang berada di dalam daerah Propinsi Lampung dengan thema kesatuan hidup setempat yang oleh masyarakat di sini, disebut **anek** atau **tiyuh** atau **pekon**. Lokasi penelitian adalah : anek Blambangan di Kecamatan Abung Selatan dan pekon Walur di kecamatan Pesisir Utara, keduanya di daerah Kabupaten Lampung Utara, anek Gunung Sugih di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan pekon Kedondong di kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan.

Anek Blambangan, secara administratif telah berubah statusnya menjadi kampung. Anek ini sebelah Utara berbatasan dengan desa Gunung Batin; sebelah Selatan dengan batas Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah serta desa Sriwidodo, sebelah Timur dengan batas desa Pagar dan sebelah Barat dengan batas desa Tanjung Iman.

Pekon Walur, juga telah menjadi kampung administratif, yang terletak dikaki gunung Pugung di bagian pantai selatan Danau Ranau, merupakan kecamatan paling ujung barat dari Propinsi Lampung, yang berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

Pekon Kedondong, merupakan suatu wilayah yang luas. Dalam rangka pemekaran desa maka pada beberapa tahun yang lalu dipecah

menjadi beberapa buah desa, yaitu desa Pasar Baru dan Gunung Sugih, yang saat sekarang ini merupakan batas desa Kedondong untuk sebelah Utara, desa Sukamaju yang merupakan batas desa Kedondong untuk sebelah Selatan, desa Tempelrejo, yang merupakan batas desa Kedondong sebelah Timur, dan desa Way Kepayang, Kutubatu, Kertasana, dan Gunung Sari, yang merupakan batas desa Kedondong untuk sebelah Barat.

Anek Gunung Sugih yang secara administratif telah menjadi kampung Gunung Sugih, merupakan ibukota Kecamatan Gunung Sugih. Secara administratif, Kampung Gunung Sugih, sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Terbanggi Agung; sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gunung Sugih Pasar; dan sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Buyut Udik.

Daerah Lampung bagian barat yang membujur ke tenggara, pada dasarnya adalah daerah yang berbukit-bukit dengan lereng yang curam, dengan kemiringan berkisar 25° dan dengan ketinggian rata-rata 300 M di atas permukaan laut, Puncak yang tertinggi adalah Gunung Pesagi (2.262 M). Bagian tengah dan timur yang merupakan daerah dataran alluvial adalah daerah yang terluas. Daerah ini adalah daerah bagian hilir (downstea) dari sungai-sungai terbesar di Propinsi Lampung, yaitu Way Sekampung, Way Seputih, Way Tulang Bawang dan Way Mejuji. Lebih ke timur lagi, adalah merupakan daerah rawa, dengan ketinggian $\frac{1}{2}$ sampai dengan 1 m dari permukaan laut.

Daerah Lampung cukup subur. Penduduk memanfaatkan hal ini untuk perkebunan dan palawija. Lampung adalah daerah yang banyak menghasilkan kopi, lada, cengkeh, tapioka, karet, kelapa sawit. Kesuburan tanah ini antara lain dimungkinkan oleh karena daerah Lampung mempunyai iklim musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Dengan memperhatikan keadaan musim hujan dan kemarau tersebut maka masyarakat Lampung membagi kegiatan atau pekerjaan mereka dalam dua bagian, yaitu pada musim hujan mereka bekerja di ladang dan di sawah, sedangkan pada musim kemarau mereka pergi ke kebun atau mencari ikan di sungai dan dirawa-rawa (paya = lebung).

Perladangan yang berpindah-pindah seperti yang pernah terjadi sebelum adanya intensifikasi persawahan dan irigasi, sekarang ini telah mulai berkurang, hal ini disebabkan semakin menipisnya areal hutan yang dapat dibuka.

Propinsi Lampung yang terdiri dari 3 kabupaten dan 1 kotamadya luasnya 35.376.50 km². Selanjutnya di daerah ini terdapat 71 kecamatan, serta 1.489 kampung (lihat tabel).

Tabel 1 : Kecamatan, kampung dan luas daerah serta presentase terhadap luas daerah Propinsi Lampung. Dengan perincian per Kabupaten.

No.	Kodya/Kabupaten	Kecamatan	Kampung	Luas Daerah (km ²)	%
1.	Kodya T.Karang — T. Betung	4	30	52,62	0,15
2.	Kab. Lampung Selatan	20	569	6.765,88	19,12
3.	Kab. Lampung Tengah	23	436	9.189,50	25,98
4.	Kab. Lampung Utara	24	454	19.368,50	54,75
Jumlah		71	1.489	35.376,50	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tk. I Lampung 1978

Pada hutan-hutan di daerah ini masih banyak terdapat binatang-binatang liar, baik yang menjadi musuh tanaman, maupun yang merupakan binatang buruan penduduk untuk dimakan dagingnya, atau untuk dijual bagian tubuh dari binatang-binatang itu, seperti : Gading, dan Cula Binatang-binatang tersebut adalah monyet, beruk, beruang, gajah, rusa, kijang, kambing hutan, landak, kerbau liar, badak, tapir, pelanduk/kancil. Gajah di Lampung dikenal dua jenis. Pertama **Liman ramik**, yaitu gajah yang selalu berombongan dalam jumlah 20 atau 30 ekor, badannya kecil kehitam-hitaman, yang banyak menyerang ladang dan kebun lada penduduk setempat. Kedua **Liman cutik**, yaitu gajah Bukit Barisan, jumlah rombongannya maksimum empat ekor, berbadan besar, jarang menyerang ladang dan kebun lada penduduk.

Binatang liar yang tidak diburu, misalnya harimau, mawas, siamang, dan sebagainya. Alam fauna di lokasi penelitian yaitu di anek Blambangan, masih ditemui binatang seperti monyet (kera) dan beruk. Mereka hidup tidak jauh dari tepi sungai yang melintasi anek tersebut. Selain dari pada itu, masyarakat setempat juga memelihara berbagai binatang, terutama adalah sapi yang digunakan sebagai alat penarik gerobak dan kelihatannya juga memelihara anjing, yang digunakan untuk menjaga rumah. Ayam, merupakan fauna yang dipelihara, dengan tujuan untuk dimakan atau untuk menghasilkan telur. Demikian juga halnya di pekon Kedondong. Di sini masyarakat, selain memelihara ayam (manuk), juga memelihara kerbau (Lampung = kibau/kebau) baik kerbau biasa maupun kerbau bulek, yaitu, kerbau yang warnanya putih kemerah-merahan. Kerbau merupakan hewan piaraan yang sangat besar gunanya

dalam bidang pertanian dan angkutan, sedang dalam suatu kebiasaan atau adat, ia merupakan lambang kebesaran di dalam penyelenggaraan hajatan, baik pada waktu diangkat menjadi pimpinan adat maupun dalam upacara-upacara adat seperti perkawinan, khitanan dan sebagainya.

Di Lampung terdapat beberapa tumbuhan yang menghasilkan, seperti damar, kemenyan, cempedak, jelutung, balam dan sebagainya. Damar, terdiri dari dua jenis, yaitu damar hutan yang digunakan untuk bahan dempul dan damar mata kucing, yang digunakan untuk bahan cat. Yang terakhir ini sudah diusahakan oleh masyarakat sedemikian rupa, sehingga terdapat kebun damar dari penduduk, khususnya di daerah Lampung Utara. Selain dari itu, terdapat jenis kayu yang oleh masyarakat setempat digunakan sebagai ramuan rumah, seperti merbau, bungur dan bayur. Pada tahun terakhir ini, banyak dikenal tanaman hias, seperti angrek (sehingga ada yang khusus disebut angrek Lampung), cempaka dan beberapa jenis palm.

Dibeberapa daerah penelitian, dapat dilihat beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Pohon maja, merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat ditemui pada semua lokasi penelitian. Pohon maja merupakan tumbuh-tumbuhan yang kegunaannya sangat beragam. Kayu dari pohon ini oleh masyarakat digunakan sebagai bahan cangkul atau golok dan buahnya yang sudah tua, setelah dikeringkan, dibuat sebagai tempat air. Beberapa jenis tumbuh-tumbuhan dapat pula diterangkan di sini. Misalnya, pohon petai cina, dadap dan waru.

Petai cina, oleh masyarakat setempat ditanam oleh karena berfungsi ganda. Daunnya biasanya digunakan sebagai makanan ternak, sedangkan buahnya digunakan sebagai lalap pada waktu makan. Dadap (khedak), baik khedak minyak maupun khedak kakhui (berduri), sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena tanaman ini oleh masyarakat digunakan sebagai tanaman pelindung bagi tanaman kebun (biasanya untuk lada) dan daunnya digunakan untuk obat Waru (bakhu) juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama pada waktu hajatan (nayuh) karena daunnya dapat digunakan sebagai pembungkus tapai ketan, yang merupakan kue adat bagi suku Lampung, sedangkan kulitnya oleh masyarakat dibuat tali. Demikianlah beberapa uraian mengenai alam flora telah kami terangkan di sini.

Pola Perkampungan.

Perkampungan suku bangsa Lampung pada umumnya memanjang dengan deretan rumah yang berhadapan sesuai dengan jalur

jalan. Jarak rumah dengan rumah biasanya sangat rapat sehingga tidak ada batas pekarangannya. Keadaan yang demikian ini timbul oleh karena suatu keyakinan bahwa harus dekat dengan sanak saudara, sehingga deretan-deretan rumah ini nampak seperti rumah dari keluarga (sub kebuayan/marga geneologis). Pada dasarnya kampung dari masyarakat Lampung, terletak di jalur aliran sungai. Hal ini terjadi karena adanya syarat bahwa untuk dapat disebut suatu kampung harus mempunyai pangkalan mandi (kuwayan). Pangkalan mandi ini terbagi dua, yaitu pangkalan mandi untuk pria dan pangkalan mandi untuk wanita.

Batas suatu **anek**, **tiyuh** dan **pekon**, pada dasarnya tidak dibuat dengan sengaja, tetapi merupakan batas-batas alamiah seperti kali kecil, batu-batuan alam, pohon kayu yang besar dan lain-lain.

Di dalam setiap komunitas kecil yang diteliti, akan terdapat mesjid dan beberapa surau ditepi kali. Pada daerah-daerah Lampung yang beradat pepadun dibeberapa tempat, masih ditemui bangunan balai adat yang disebut **sesat**. Di luar kampung, terdapat lokasi untuk kuburan, baik kuburan umum maupun kuburan keluarga. Oleh karena itu berkemungkinan dalam suatu tempat terdapat beberapa lokasi pekuburan.

Secara umum di lokasi penelitian akan ditemui bangunan perumahan, mesjid, balai desa dan sekolah. Tetapi pada lokasi penelitian tertentu, terdapat bangunan yang tidak dimiliki pada lokasi penelitian yang lain. Misalnya pada **anek Blambangan** terdapat bangunan yang berfungsi sebagai stasiun kereta api dan kantor kereta api, sedangkan di **anek Gunung Sugih**, terdapat bangunan kantor kecamatan, kantor polisi dan kantor kejaksaan negeri Metro perwakilan Gunung Sugih.

Rumah sebagian besar masih merupakan rumah panggung dan hanya sebagian kecil saja yang merupakan rumah yang didirikan di atas tanah. Pada masyarakat Saibatin, diantara rumah-rumah panggung itu terletak rumah kepala adat (Saibatin) yang disebut dengan **lamban gedung**. Pada masyarakat di pesisir pantai (pekon Walur), terdapat bangunan yang disebut dengan **pepanca**, yaitu bangunan milik umum yang berfungsi sebagai tempat istirahat atau berteduh.

Bahan-bahan yang digunakan untuk mendirikan rumah panggung, hampir seluruhnya berasal dari kayu. Beberapa dari rumah panggung itu, tiang-tiangnya ada yang dibuat dari bata dan semen, juga tangga dan anak tangganya. Menurut keterangan masyarakat setempat, bahan-bahannya berasal dari berbagai jenis kayu seperti kayu besi, leban, tembesu, nangi, merbau dan kayu bungur.

Rumah permanen yang jumlahnya kecil, balai desa, mesjid, pada umumnya sudah dibuat dari semen dan bata kecuali pada pekon

Walur, di sini dinding bangunan rumah permanen dibuat dari kerikil yang diaduk dengan kapur dan pasir, yang kemudian dicetak dengan papan dari bawah ke atas secara berangsur-angsur. Atap rumah, pada umumnya terdiri dari genteng, namun ada juga yang masih dibuat dari ijuk (enau), bahkan ada yang dibuat dari daun kelapa seperti pada masyarakat pekon Walur. Ramuan-ramuan rumah, sebelum digunakan, lebih dahulu direndam dalam lumpur selama satu atau dua tahun.

Fungsi dari bangunan-bangunan di atas, pada dasarnya telah dapat diketahui dari nama yang diberikan kepadanya. Rumah adalah merupakan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal satuan keluarga. Balai desa merupakan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat pertemuan masyarakat setempat dalam hal-hal tertentu, dan ada juga yang digunakan sebagai kantor dari kepala kampung. Sekolah dikhususkan sebagai tempat belajar sedangkan mesjid digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti shalat dan ceramah-ceramah agama maupun untuk perayaan memperingati hari-hari besar Islam. Rumah adat berfungsi sebagai tempat bermusyawarah pimpinan masyarakat adat (perwatin), dan tempat berlangsungnya upacara-upacara adat.

Rumah, pada masyarakat Lampung khususnya pada pekon Walur, biasanya terdiri dari serambi depan yang disebut dengan **lepau**, ruang tamu yang disebut dengan **lapang luar**, ruangan tengah disebut **lapang lom**, kamar-kamar tidur (bilik), ruangan tengah disebut **sudung** dan dapur yang disebut **dapor**. Bagi rumah panggung, sebelum **lepau** (serambi depan), terdapat tangga atau yang disebut dengan **ijan**.

Pada lokasi penelitian anak Blambangan, masyarakat setempat menyatakan bahwa bagian depan atau serambi disebut **tepas**, yang kemudian disusul dengan ruangan kedua yang disebut **medan ragah**, yaitu suatu ruangan yang dikhususkan bagi kaum laki-laki (ragah = laki-laki) ruangan berikutnya adalah **medan sebai** (sebai = perempuan), yaitu ruangan yang diperuntukkan bagi kaum wanita saja. Dikiri atau kanan ruangan ini didirikan kamar-kamar sebagai ruangan tidur. Jumlah kamar pada rumah panggung ini tidak begitu banyak, mungkin hanya ada dua ruangan saja atau mungkin juga jumlahnya lebih dari dua. Jumlah kamar yang terbanyak hanyalah empat buah saja. Setelah ruangan **medan sebai**, barulah ruang belakang yang diperuntukkan sebagai dapur (**dapor**) dan ruang makan.

Pada masyarakat pekon Kedondong, rumah panggung terbagi dua, yaitu **lamban biasa** (rumah anggota adat) dan **lamban balak** (rumah penyimbang Saibatin). Rumah biasa, serambi depan disebut pengadapan

(gakhang), bagian tengah disebut lapang (tabalayakh) untuk kamar tidur disebut kamar **pakhumpu**, dan dibagian belakang disebut dapur (dapokh). Rumah di sini biasanya berloteng, yang oleh masyarakat di sini disebut **panggakh**. **Lamban balak** (rumah penyeimbang) dibagian depan atau serambi depan disebut **tundan** dan dibagian belakang disebut **pawon**, sedangkan bagian-bagian lain sebutannya sama dengan rumah biasa (**lamban biasa**).

Arsitektur pada masyarakat pekon walur, rumah depok atau yang disebut **lamban rebah**, bubungannya menggunakan limas dan ber-tepi atau yang disebut **markis**, di bagian depan tampak hiasan atau ukiran. Pelapon yang di sini disebut **panggar**, berfungsi sebagai gudang. Pada rumah panggung di dinding beranda muka diukir dengan bentuk-bentuk piala yang terbuat dari papan setebal tiga sentimeter. Demikian pula mengenai resplangnya. Pada serambi muka diberi hiasan dengan tanduk kerbau atau oleh masyarakat di sini disebut **tungkahni-kebau** atau tanduk rusa, maupun tanduk kambing yang bentuknya melingkar. Sedangkan pada masyarakat pekon kedondong, baik lamban balak di gakhang atau diserambi depan pada bagian dindingnya biasanya dibuat ukiran dari kayu yang berbentuk renda atau piala. Sedangkan pada bubungannya berbentuk limas, yang pada resplangnya dibuat hiasan juga berbentuk renda. Pada rumah-rumah depok (**lamban-khepah**), sudah banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan rumah panggung. Serambi depan tanpa diberi hiasan hanya saja pada kaca jendelanya terdapat lukisan-lukisan atau dibuat lukisan-lukisan.

Pada dasarnya hampir semua lokasi memiliki lapangan olahraga khususnya lapangan sepak bola volley. Tempat olahraga yang lain ialah lapangan bulu tangkis yang letaknya ditempat yang lapang di depan rumah penduduk dengan sifatnya yang sementara. Jumlah dari lapangan-lapangan tersebut sangat terbatas sekali.

Tempat upacara kenegaraan biasanya menggunakan lapangan bola kaki, sedangkan tempat upacara untuk perkawinan menggunakan teratak yaitu tarup yang dipasang di halaman rumah. Khususnya di anek Blambangan terdapat rumah adat (sesat) yang diperuntukkan bagi upacara-upacara adat, seperti perwatin dan sebagainya.

Oleh karena seluruh penduduk di lokasi penelitian beragama Islam, maka tempat-tempat Ibadah adalah mesjid dan surau. Mesjid pada umumnya digunakan untuk sholat berjamaah, juga sholat jum'at, sedangkan surau merupakan tempat sholat sewaktu-waktu. Jumlah

mesjid yang ada di tiap lokasi penelitian hanya ada satu buah.

Tempat pekuburan dari masyarakat di lokasi penelitian pada umumnya terletak diluar **anek/tiyuh atau pekon**. Di tiap lokasi penelitian terdapat beberapa tempat pekuburan, misalnya di anek Blambangan terdapat enam lokasi, di pekon walur terdapat lokasi pekuburan berdasarkan kelompok keluarga yang besar bahkan berdasarkan atas kebuayan. Kecuali untuk anak-anak terdapat satu lokasi yang sama yang disebut **tambak ni bajang** atau kuburan anak-anak. sedangkan di anek Gunung Sugih, terdapat beberapa lokasi pekuburan. Pada dasarnya ada lokasi pekuburan keluarga dan ada pekuburan umum.

Lokasi penelitian anek Blambangan, anek Gunung Sugih, pekon walur dan pekon kedondong pada dasarnya terletak di tepi jalan raya, yang membelah dua dari tiap lokasi penelitian. Anek Blambangan dan anek Gunung Sugih terletak ditepi jalan raya negara yang menghubungkan ibukota Propinsi Lampung dengan ibukota Kabupaten Lampung Utara, dimana kondisi jalan ini pada saat sekarang cukup baik. Selain dari pada jalan negara, terdapat juga jalan dalam kampung yang dibuat oleh masyarakat setempat. Jalan-jalan dalam kampung/ anek Blambangan pada saat ini telah dilapisi dengan batu, yang merupakan hasil kerja dari masyarakat setempat. Selain jalan-jalan dalam kampung, dalam tiap lokasi penelitian terdapat jalan yang menuju ke sungai, yang pada masyarakat pesisir (pekon walur) disebut **ranglaya duwai**. Di anek Blambangan, anek Gunung Sugih maupun pekon kedondong, sungai tidak digunakan sebagai sarana lalu lintas. Berbeda dengan lokasi-lokasi penelitian di atas, sungai di pekon walur dipergunakan sebagai sarana lalu lintas yaitu dengan menggunakan perahu atau rakit. Oleh karena pekon walur terletak di daerah pesisir, maka laut juga merupakan sarana lalu-lintas. Perjalanan melalui laut dapat dilakukan antar kampung maupun antar daerah, misalnya ke Betawi (Jakarta) dan ke Sibolga, bahkan ada yang ke luar negeri yaitu ke Kedah (Malaysia). Untuk jarak antar kampung, dipergunakan **lalipak**, yaitu perahu yang berkatir sebelah (katir merupakan alat penyangga agar perahu tidak mudah terbalik). Sedangkan untuk antar daerah digunakan motor bout (2,5 — 3,5 ton), motor tempel (5 ton kebawah) dan perahu muatan (3 ton). Pada masa lalu pelayaran laut ini dilakukan dengan **jukung balak** atau perahu besar dengan ukuran 15 ton sampai dengan 20 ton, dan untuk pelayaran jarak jauh digunakan sekoci dengan ukuran 20 ton sampai 25 ton.

Secara umum lokasi penelitian tidak dikenal batas-batas parit. Pagar-pagar yang ada dilokasi penelitian, khususnya di anek Blambangan

dan pekon kedondong maupun di anak Gunung Sugih, Secara umum terbuat dari kayu dan bambu, tetapi ada juga yang mempergunakan tanaman hidup ("pagar hidup") dan pagar yang dibuat dari semen dan besi, hanya jumlahnya tidak demikian banyak. Pagar-pagar yang ada di lokasi penelitian secara umum hanya terletak di depan rumah saja, sedangkan samping kiri maupun kanan rumah yang bersangkutan kelihatannya tidak berpagar

Sebagian telah diterangkan pada uraian-uraian terdahulu bahwa pada masyarakat Lampung, setiap anak/tujuh/pekon, harus ada pangkalan way. Pangkalan way ini pada dasarnya merupakan pangkalan mandi dari masyarakat setempat. Masyarakat Lampung membedakan antara tempat mandi pria yang disebut pangkalan **bakas-ragah** dan tempat mandi wanita, yang disebut dengan pangkalan **bebai-sebai**. Demikian pula halnya dengan keadaan di lokasi penelitian. Pada tiap lokasi penelitian akan ditemui tempat mandi untuk umum yaitu sungai, tetapi pada lokasi tertentu misalnya di pekon walur sungai selain digunakan untuk tempat mandi, juga sebagai sarana lalu-lintas.

Sehubungan dengan sungai sebagai tempat mandi umum, maka pada masa lalu terdapat apa yang disebut pangkalan raja atau pangkalan saibatin, yaitu pangkalan sebagai tempat mandi yang diperuntukkan secara khusus bagi penyimbang dan keluarganya. Pada daerah-daerah perladangan pada dasarnya dikenal pangkalan untuk mandi bagi keluarga saja, sehingga disebutlah pangkalan **Zakki**, pangkalan **Hi Daman** dan seterusnya. Di tengah hutan kadang-kadang ditemui kolam persegi yang dibuat dari batu yang lembut (napal), dalam keadaan bersih dan terpelihara yang oleh penduduk setempat (pekon walur) disebut pangkalan **bidadari** atau pangkalan **muli-puteri** (gadis dewa kayangan).

Dari pekon walur diperoleh keterangan bahwa khusus untuk mereka yang sudah jompo (orang-orang yang sudah tua sekali dan tidak lagi kuat berjalan sendiri), tempat untuk mereka mandi adalah di **garang**, yaitu bagian beranda depan di atas tangga dan ini juga dipakai bagi mereka yang sedang sakit keras. Mandi di laut (bagi pekon walur) khususnya untuk anak-anak merupakan suatu kegemaran di samping memang sebagai olahraga. Anak-anak yang telah mandi di laut ini kemudian mereka akan pergi ke muara sungai untuk mandi dengan air tawar yang oleh masyarakat di sini disebut **pelandok**.

Beberapa dari lokasi penelitian itu, masyarakatnya telah pula menggunakan sumur sebagai sumber air, baik untuk mandi maupun untuk mencuci. Sumur pada dasarnya dibuat dibelakang rumah atau di samping rumah.

P E N D U D U K

Penduduk daerah Pripinsi Lampung pada tahun 1977 adalah sebagai berikut :

T A B E L II : Penduduk dan Kepala Keluarga di perinci per TK. II, Dewasa, Anak-anak dan jenis kelamin.

Di Propinsi Lampung, Keadaan Akhir Tahun 1977.

No.	TINGKAT II	KK	Dewasa		Anak-anak		JUMLAH
			LK	PR	LK	PR	
1.	Kodya Tanjunga- rang-T.Betung	40.711	58.622	56.782	54.411	56.325	226.140
2.	Kab. Lampung Se- latan.	265.306	367.456	367.564	349.015	533.811	1437.916
3.	Kab. Lampung Te- ngah	247.234	345.038	335.299	349.776	339.922	1370.035
4.	Kab. Lampung Utara	125.097	175.232	171.232	161.819	165.070	637.233
J u m l a h		678.348	946.228	930.877	915.021	915.198	3707.324

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Dati II Lampung.

Dari jumlah penduduk yang tertera dalam tabel di atas, menurut mereka perkiraan terdapat perbandingan suku bangsa berikut :

- a. Penduduk asli Lampung (suku bangsa Lampung) = 30%
- b. Penduduk asal Jawa Tengah dan Timur = 40%
- c. Penduduk asal Jawa Barat (Sunda - Banten) = 10%
- d. Penduduk asal Sumatera Selatan = 10%
- e. Penduduk asal Sumatera lainnya = 4%
- f. Penduduk asal Bali = 3%
- g. Penduduk asal Indonesia lainnya = 3%

Dengan demikian, maka jumlah penduduk suku bangsa Lampung yang berdiam di Propinsi Lampung adalah sebesar 30 % dari 3.707.324 orang atau lebih kurang 1.112.197 orang. Dari jumlah tersebut diperkirakan presentase dari penduduk suku Lampung pada tiap daerah tingkat II, adalah sebagai berikut :

Lampung Utara	:	90	%	dari	673.233	=	603.910
Lampung Selatan	:	90	%	dari	1.437.916	=	359.479
Lampung Tengah	:	10	%	dari	1.370.035	=	137.003
Kodya T. Karang	:	0.09	%	dari	226.140	=	19.805

Di atas telah nampak bahwa suku bangsa Lampung mendiami setiap daerah tingkat II yang ada di Propinsi Lampung. Propinsi Lampung terdiri dari 71 wilayah kecamatan (data akhir tahun 1977), yaitu empat kecamatan di daerah Tingkat II Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung, 20 (dua puluh) Kecamatan di daerah Tingkat II Lampung Selatan, 23 (dua puluh tiga) Kecamatan di daerah Tingkat II Lampung Tengah dan 24 (dua puluh empat) Kecamatan di daerah Tingkat II Lampung Utara. Dari ke 71 Kecamatan tersebut di atas, maka kecamatan-kecamatan yang mayoritas penduduknya suku bangsa Lampung adalah sebagai berikut :

Lampung Utara : Kecamatan Menggala, Abung Selatan, Abung Timur, Pakuon Ratu, Sungkai Utara, Sungkai Selatan, Kotabumi, Abung Barat, Tanjung Raja, Baradatu, Blambangan Umpu, Bahuga, Belalau, Balik Bukit, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan.

Lampung Tengah : Kecamatan Padang Ratu, Terbangi Besar, Gunung Sugih, Sekampung, Seputih Mataram, Sukadana, Labuhan Maringgai dan Kecamatan Jabung.

Kecamatan-kecamatan untuk daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung, yang mayoritas penduduknya bukan suku bangsa Lampung, tetapi didiami oleh suku bangsa ini adalah sebagai berikut :

Lampung Selatan : Kecamatan Kedaton, Panjang, Ketibung, Kalianda, Natar, Gedung Tataan, Padang Cermin, Kedondong, Penengahan, Pardasuka, Pringsewu, Sukoharjo, Pagelaran, Talang Padang, Wonosobo, Kota Agung dan Kecamatan Cukuh Balak.

Pada dasarnya suku bangsa Lampung yang berdiam di ibukota Propinsi Lampung yaitu Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung dengan jumlah penduduk sebanyak 19.805 orang, menyebar diseluruh Kecamatan yang ada, yaitu kecamatan Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Telukbetung Selatan dan Telukbetung Utara. Kecamatan dimana terdapat kampung dari suku bangsa Lampung adalah Kecamatan Telukbetung Selatan (Kampung Gedung Pakuon) dan Kecamatan Telukbetung Utara (Kampung Pengajaran).

Menurut sejarah, seluruh suku bangsa Lampung pada dasarnya berasal dari Lampung Utara, tepatnya dari Skala Brak di bukit Pesagi Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Utara. Untuk memberikan gambaran mengenai tahun penyebaran dan pemukiman suku bangsa ini di daerah Lampung dapat dilihat pada tabel berikut.

T a b e l III : Tahun pemukiman dari suku bangsa Lampung, diperinci per Kecamatan dalam daerah Tingkat II Lampung Selatan.

No.	Kecamatan	Tahun mendiami
1	2	3
1.	Kota Agung	400
2.	Cukuh Balak	400
3.	Penengahan	600
4.	Kalianda	600
5.	Padang Cermin	700
6.	Wonosobo	700 — (1938 transmigrasi)
7.	Ketibung	1200
8.	Natar	1300
9.	Gedung Tataan	1300
10.	Pringsewu	1300
11.	Panjang	1326
12.	Pardasuka	1450
13.	Talang Padang	1500
14.	Kedondong	1500
15.	Sukoharjo	1938 (Perpindahan dari Krui)

Dari data dalam tabel di atas nampak bahwa suku bangsa Lampung sebagai penduduk Kecamatan Cukuh Balak dan Kota Agung tercatat mulai bermukim di daerah itu sejak tahun 400, demikian penjelasan yang diberikan oleh penduduk setempat. Menurut masyarakat di sini, nenek moyang mereka yang datang kesana masih memeluk agama animisme, ditambah sedikit pengertian tentang agama Budha. Oleh karena itu pada masyarakat ini terdapat istilah **ngabuda**, yang maksudnya adalah mengikuti ajaran Budha. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 1950-an, masih kelihatan adanya anak-anak yang rambutnya dicukur keliling, tetapi disisakan ditengahnya, setelah itu diikat sehingga persis seperti sanggul sang Budha. Juga dalam hal mantera-mantera yang dipergunakan untuk pengobatan, sering diucapkan kata-kata hiyang sakti, hiyang batara, dan sebagainya. Keadaan di atas ini didukung pula oleh prasasti yang diketemukan Bah Way, di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Utara, yang diperkirakan berasal dari tahun 400.

Kemudian dari kedua daerah ini suku bangsa Lampung melakukan muhibah ke daerah lain, dan bersamaan dengan itu terjadi perpindahan suku bangsa Lampung dari daerah Utara, khususnya ke daerah Lampung Selatan. Masyarakat di daerah Lampung Selatan menyatakan bahwa mereka sebenarnya berasal dari kampung/pekon Umbul Buah di

Kota Agung atau dari Putih dan Limau di Cukuh Balak. Masyarakat di Cukuh Balak, menyatakan bahwa pada dasarnya mereka berasal dari Pugung Tampak. Daerah Pugung Tampak ini berada di Lampung Utara, yakni di daerah Krui Utara. Sebaliknya sebagian besar masyarakat Lampung di daerah Krui, berasal dari Ranau dan Liba Haji (Buay Aji) di Kabupaten Ogan dan Komiring Ulu, Propinsi Sumatera Selatan.

Dari marga atau buay Aji yang melakukan muhibah ke Lampung Selatan inilah yang menyebabkan nama-nama kampung di Lampung Selatan mempergunakan Aji/Haji, misalnya Haji Mena, Haji Pemanggilan, Pekon Aji dan sebagainya.

Perpindahan penduduk asli dari Kota Agung ke Kecamatan Sukoharjo sekarang, terjadi pada tahun 1938. Tahun 1954 terjadi lagi muhibah penduduk asli dari Krui (Lampung Utara). Mereka membuka tanah di Kecamatan Punggur dan Kota Gajah (Kabupaten Lampung Tengah). Pada Tahun 1958, terjadi lagi perpindahan penduduk (asli) dari Krui ke Kecamatan Talang Padang, membuka umbulan Sekampung dan Kota Raja serta Way Samang dan sebagainya. Pada tahun-tahun terakhir ini banyak penduduk asli dari Krui membuka hutan di Tanjungan Kecamatan Kota Agung dan di Marpas, Kecamatan Bintuhan Kabupaten Bengkulu Selatan. Tahun 1979 terdengar berita bahwa terjadi perpindahan dari Krui Tengah menuju perbatasan dengan Ranau, yaitu Kawat Kuda, Ujung Rembun, sedangkan dari Danau Ranau melakukan pembukaan tanah di Way Gedau Krui.

Perpindahan penduduk ini, pada dasarnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, karena di Krui tidak mungkin lagi melakukan perluasan perkebunan, sehingga mereka menyebar untuk mencari daerah-daerah baru untuk dibuka. Selain dari pada keadaan di atas, ada satu mitos Tetau (Upat) yang menyatakan bahwa setiap kampung tidak boleh lebih dari 100 rumah, apabila telah melebihi jumlah itu maka harus mencari atau membuka daerah baru.

Dari beberapa daerah kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, seperti Kecamatan Menggala, Bahuga dan Blambangan Umpu yang terletak pada muara dan aliran sungai Tulang Bawang mereka bergerak kearah barat mencari daerah lain untuk berkebun, dengan melayari lebih dahulu sungai kearah hulu, sehingga terkenallah sejak tahun 1900 sebutan daerah Sumpuk. Pada tahun 1933, dengan dibukanya jalan kereta api antara Telukbetung — Palembang, daerah Sumpuk menjadi ramai dan di sana didirikan Stasiun kereta api (Tulung Buyut). Banyak daerah perladangan (umbulan) yang semula didiami oleh hanya sepuluh pondok saja kemudian berkembang menjadi tiyuh atau kampung tersendiri.

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu bahwa lokasi penelitian dari inventarisasi dan dokumentasi ini meliputi empat wilayah perkampungan suku bangsa Lampung. Secara umum dalam tiap wilayah perkampungan itu terdapat induk kampung dimana disitu berdiam penduduk asli, sedangkan di wilayah pedukuhan bermukim penduduk pendatang. Pada dasarnya yang merupakan pekon/aneq/tiyuh adalah induk kampung itu saja. Sebagai contoh, adalah perkampungan atau kampung Blambangan. Secara Administratif kampung Blambangan terdiri dari satu kampung induk (induk kampung) yang merupakan pusat pemerintah dan dua wilayah pedukuhan. Pada dasarnya yang merupakan anek menurut adat adalah hanya induk kampung itu, yang didiami oleh penduduk asli saja.

Secara keseluruhan, penduduk di lokasi penelitian (mencakup empat wilayah perkampungan), adalah sejumlah 15.561 orang, dengan perincian 3.796 orang penduduk kampung Blambangan, 4.567 orang penduduk kampung Kedodong, 6.161 orang penduduk kampung Gunung Sugih, dan 1.037 orang penduduk kampung Walur, dengan sebanyak 2.875 Kepala keluarga, yang terdiri dari 565 Kepala keluarga penduduk kampung Blambangan, 879 Kepala keluarga penduduk kampung Kedodong, 1.321 Kepala keluarga penduduk dari kampung Gunung Sugih dan 110 Kepala keluarga dari kampung Walur. Dengan demikian setiap Kepala keluarga memiliki anggota sebanyak ± 5 orang.

Mengenai komposisi umur, jenis kelamin dari penduduk dilokasi penelitian (mencakup empat wilayah perkampungan), dapat dibaca pada tabel berikut.

T a b e l IV : Komposisi umur, jenis kelamin dari penduduk di lokasi penelitian

A Blambangan dan Gunung Sugih menurut data tahun 1979.

No.	Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 — 4	596	711	1.307
2	5 — 6	691	896	1.587
3	7 — 13	736	802	1.538
4	14 — 16	715	690	1.405
5	17 — 24	465	511	976
6	25 — 54	1.152	1.198	2.350
7	55 th keatas	385	409	794
Jumlah		4.740	5.217	9.957

B Untuk lokasi Kedondong dan Walur

No.	Tingkatan Umur Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 — 5	661	643	1.304
2	6 — 9	517	414	931
3	10 — 19	548	464	1.012
4	20 — 29	372	398	770
5	30 — 49	541	568	1.109
6	50 — 90	244	222	466
7	100 keatas	5	7	12
Jumlah		2.888	2.716	5.604

Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di lokasi penelitian masih tergolong anak-anak. Untuk memperjelas mengenai komposisi umur dari penduduk di lokasi penelitian, akan dilampirkan tabel mengenai situasi tersebut sesuai dengan kampung sampel penelitian.

Tingkat pendidikan.

Mengenai tingkat pendidikan penduduk di daerah lokasi penelitian, dapat dibaca pada tabel berikut ini.

Tabel V : Tingkatan Pendidikan Penduduk di lokasi penelitian (kampung-kampung; Blambangan, Gunung Sugih, Kedondong dan Walur).

No.	Jenis Pendidikan	Blambangan	G. Sugih	Kedondong	Walur Jumlah
1	Belum sekolah	425	1.050	528	84
2	Belum tamat SD	1.622	1.643	910	112
3	Tidak tamat SD	—	15	756	140
4	Sekolah Dasar	1.292	2.026	1.466	96
5	Sekolah Lanjutan Pertama	187	245	218	32
6	Sekolah Lanjutan Atas	90	50	135	20
7	Sarjana Muda	—	2	8	3
8	Sarjana	—	—	—	4
9	Madrasah	175	85	—	—
10	Buta Aksara	5	1.011	436	22

Menurut informasi, jumlah penduduk asli di kampung Blambangan dan Kedondong pada tahun 1979, diperkirakan sebanyak 40%. Jadi apabila penduduk kampung Blambangan adalah sebanyak 3.796 orang dan penduduk kampung Kedondong adalah sebesar 4.567 orang, maka jumlah penduduk asli pada kedua kampung ini adalah 40% dari 8.363 orang atau sebanyak 3.345 orang. Sedangkan pada pekon Walur penduduk asli merupakan mayoritas yaitu sebanyak 95%. Apabila penduduk kampung Walur adalah sebanyak 507 orang, maka 479 orang adalah penduduk asli disitu. Sedangkan pada anak Gunung Sugih, diperkirakan 60% dari jumlah 6.161 orang, yaitu 3.697 orang adalah penduduk aslinya (catatan tersebut di atas tidak pasti karena para informan hanya memperkirakan saja sedangkan data di Kepala Desa tidak membedakan etnik tersebut).

Pekerjaan penduduk asli, pada umumnya bergerak dalam sektor perkebunan seperti berupa lada, karet, dan kopi, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai atau pedagang sangat sedikit sekali. Sebagian kecil penduduk asli masih tergolong dalam tiga buta, walaupun sebagian besar telah dapat menamatkan pelajarannya pada sekolah dasar atau yang sederajat dengan itu. Pada lokasi-lokasi tertentu, misalnya di Blambangan dan Gunung Sugih, kelihatan bahwa beberapa orang dari mereka telah juga menamatkan sekolah menengah atas bahkan ada yang menduduki tingkat perguruan tinggi.

Penduduk pendatang yang ada di lokasi penelitian, khususnya pada kampung Blambangan dan Kedondong umumnya berasal dari pulau Jawa. Pada kampung Kedondong, selain penduduk pendatang yang berasal dari pulau Jawa terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sumatera Selatan. Di kampung Blambangan dan kampung Kedondong penduduk pendatang menempati daerah pedukuhan dan disudut-sudut kampung yang jumlahnya lebih kurang 60% dari jumlah penduduk yakni kira-kira 5.018 orang.

Penduduk pendatang yang bermukim dipedukuhan pada kampung Blambangan yang berasal dari Jawa, sebagian merupakan transmigrasi dan sebagian lagi merupakan orang-orang yang datang kesana sebagai pencari kerja atau datang secara sendiri-sendiri dan oleh masyarakat di daerah itu diberi areal di luar kampung. Mereka ini pada umumnya adalah orang-orang yang sudah pernah menetap di daerah lain dari propinsi ini.

Penduduk pendatang yang berdiam di kampung Kedondong datang karena karena motivasi ekonomi dan sebagian lagi datang ke daerah itu karena mengikuti jejak famili atau kerabat mereka yang memang telah lebih dahulu menetap disana. Karena keadaan daerah yang memungkin-

kan untuk melakukan kegiatan dalam bidang pertanian, maka kemudian mereka menetap disana.

Konsepsi mengenai pandangan penduduk asli terhadap penduduk pendatang antara dua lokasi penelitian kelihatannya agak berbeda. Data sebagai hasil wawancara di daerah Kedondong menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara penduduk asli dan penduduk pendatang, penduduk asli menganggap penduduk pendatang itu sebagai keluarga mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terjadi ikatan perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Dengan demikian hubungan perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang pada masyarakat disitu, sudah merupakan hal biasa saja.

Tetapi data sebagai hasil wawancara di kampung Blambangan agak berbeda dengan di kampung Kedondong. Diakui secara jujur bahwa terdapat perbedaan pandangan dari penduduk asli terhadap penduduk pendatang. Penduduk asli memandang penduduk pendatang lebih rendah tingkatnya. Dengan demikian, masyarakat atau penduduk asli tidak menempatkan mereka sebagai golongan yang harus dihormati, atau menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam pergaulan hidup sehari-hari sikap di atas tidak begitu terlalu menonjol, namun tetap dapat dirasakan adanya pandangan yang menganggap rendah terhadap penduduk pendatang itu. Hubungan perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang pada dasarnya relatif sedikit atau bahkan dapat dinyatakan sebagai tidak ada sama sekali. Artinya bahwa belum pernah terjadi perkawinan campuran, antara anggota penduduk asli dengan penduduk pendatang. Perbedaan pandangan di atas juga terlihat dalam bidang pekerjaan. Penduduk asli biasanya selalu memberi pekerjaan pada penduduk pendatang terutama pada bidang pertanian, perkebunan atau dengan kata lain penduduk pendatang berkedudukan sebagai buruh tani (bahasa Lampung = upahan) yaitu pada pekerjaan penyiangan, penanaman dan panen.

LATAR BELAKANG SOSIAL BUDAYA

Latar belakang sejarah.

Pada uraian mengenai penyebaran dan mobilitas penduduk telah dikatakan bahwa suku bangsa Lampung berasal dari Skala Brak. Di Skala Brak, telah bermukim masyarakat yang tergabung didalam enam kebuayan, yaitu buay Bolunguh, buay Pernong atau buay Kenyangan, buay Jalan Duay, buay Nyerupa, buay Bulan atau buay Nerima, dan buay Menyata atau buay Anak Metuha (Anak Tuha). Dari enam kebuayan di

atas, pada dasarnya hanya empat yang menjadi **paksi** oleh karena keempat kebuayan ini yang memerintah kerajaan Skala Brak secara bersama-sama. Keempat paksi itu ialah : Paksi buay Belunguh di Kenali, Paksi Pernong di Batu Brak, Paksi Jalan Duay di Kembahang dan Paksi buay Nyerupa di Sukau. Dari keempat paksi inilah lahir kebiasaan **pepadun**, yaitu Peresmian seorang penyimbang Paksi baru yang dilakukan dengan upacara adat oleh keempat paksi tersebut secara bersama-sama. Oleh karena buay Menyata pada dasarnya telah lebih dahulu menghuni Skala Brak, maka oleh keempat paksi di atas, diangkatlah ia menjadi anak Tuha atau anak yang dihormati. Sedangkan buay Nerima oleh karena kedudukannya sebagai perempuan atau Na'bai/mirul dari keempat paksi tersebut, maka ia pun tidak berhak naik **pepadun**. Oleh karena berbagai faktor, maka sebagian dari penduduk pindah mencari daerah baru dimana perpindahan itu terpecah menjadi dua arah, yaitu melalui jalan Ranau ke arah Martapura dan melalui pantai Pesisir. Rombongan yang melalui jalan Ranau kebanyakan berasal dari anak buah paksi empat. Mereka bersepakat untuk tetap memakai bahasa dan adat yang dilazimkan pada paksi empat, termasuk didalamnya adat Pepadun. Untuk keperluan pembagian pepadun, maka mereka menebang kayu ara yang kemudian kayu tersebut dibagi menjadi 12 (dua belas) pepadun, menurut jumlah rombongan yang ada. Dari Musyawarah dan pembagian pepadun inilah menjadi dasar untuk terjadinya sembilan rombongan, yang menjadi "Abung Siwo Migo" (Abung sembilan Marga; Sewo = sembilan, Mogo = marga). Dan tiga rombongan yang menjadi "Pubian Telu Suku" (Pubian Tiga Suku : Tolu = tiga). Disinilah adat pepadun itu menjadi hidup subur. Mengenai rombongan yang melalui pesisir, yang merupakan kelompok dari Ratu buay Bulan atau buay Nerima, oleh karena di Skala Brak sendiri telah dinyatakan tidak berhak naik pepadun maka rombongan ini di tempat yang baru tidak mendirikan pepadun. Rombongan ini menyebar sepanjang pesisir pantai mulai dari Krui, Kota Agung, Telukbetung, Kalianda, sampai ke Labuhan Meringgai. Kemudian mereka mendirikan tiga daerah keratuan yaitu : Ratu Semangka di Kota Agung, Ratu Darah Putih di Kalianda, dan Ratu Melinting di Labuhan Meringgai. Dari uraian di atas dapatlah diketahui perihal terjadinya masyarakat yang me-

ngenal adat "**Pepadun**". dan masyarakat yang tidak mengenal adat pepadun. Masyarakat suku Lampung yang mengenal adat pepadun menurut uraian di atas adalah Abung Siwo Migo dan Pubian Telu Suku, Sedangkan masyarakat yang tidak menggunakan adat pepadun adalah masyarakat Pesisir. Dengan demikian, pada masyarakat Pesisir mengenal gelar-gelar seperti **Sutan, Pangiran, Dalom** dan sebagainya kecuali dengan keadaan buay Bulan yang bukan paksi karena ia adalah seorang perempuan. Keterangan di atas dapat dijadikan pegangan perihal perbedaan antara masyarakat yang menganut sistem pepadun dan masyarakat yang menganut sistem non pepadun dalam hal sistem kekeluargaan, yaitu dimana masyarakat pepadun menganut sistem kekeluargaan Unilateral Patrilineal murni, sedangkan masyarakat non pepadun menganut sistem Unilateral Patrilineal Alternirrd.

Dalam tiyuh-tiyuh ataupun anak-anak yang ada sekarang ini, anggotanya merupakan kesatuan dari satu marga. Marga yang mendiami anak/tiyuh adalah mereka yang berasal dari keturunan yang sama, seperti buay Nunyai dan buay Unyi, buay Subing yang termasuk kelompok Abung Siwo Migo dan buay Balau, buay Tambu Pupus, buay Bukuk jadi termasuk kelompok Pubian Telu Suku.

Anak Blambangan dibuka sekitar tahun 1600. Kebuayan yang mendiami anak ini pada dasarnya adalah buay Nunyai. Sesuai dengan syarat dalam pembukaan atau pendirian anak, yaitu suku Merigai, suku Padun Nago, dan suku Pecah Calu. Kemudian didirikan lagi dua suku yang merupakan pemisahan (**nyetih**) dari suku Merigai. Pada saat sekarang ini suku yang ada di dalam anak Blambangan telah berkembang menjadi 84 suku. Selain itu masih terdapat 65 calon-calon suku yang menunggu pengakuan. Anak Blambangan juga merupakan pusat pendidikan oleh karena di sini kira-kira pada tahun 1914 didirikan perguruan-perguruan rakyat meliputi sekolah-sekolah umum maupun sekolah agama. Perguruan-perguruan di atas bubar pada masa pendudukan Jepang. Kemudian atas usaha masyarakat, maka pada tahun 1952 didirikan kembali perguruan Al-Hidayah (perguruan agama), yang saat sekarang ini telah berubah statusnya menjadi MIN, yang dikelola oleh Departemen Agama.

Pada tahun 1924 atau mungkin tahun 1926, oleh pemerin-

tah Belanda, dibentuk pimpinan kampung. Pimpinan kampung ini dipilih oleh para penyimbang dari tiap suku, yaitu penyimbang marga, penyimbang tiyuh dan penyimbang ratu. Pada tingkat atas desa oleh pemerintah Belanda dibentuk pimpinan marga (satu marga mungkin beranggotakan beberapa tiyuh/ anek saja), yang disebut dengan **pasirah**. Oleh pengusaha Jepang, struktur pemerintahan yang demikian itu tidak dirobah. Demikian halnya pada zaman permulaan kemerdekaan, artinya bahwa struktur pemerintahan kampung berjalan secara adat dan secara lain, yaitu adanya penguasa kampung yang ditentukan dari atas desa atau dipilih oleh masyarakat secara langsung.

Pendiri anek ini adalah 5 orang bersaudara dari buay Unyi yaitu : Batih Cangih, Minak Mangku Negaro, Tuan sayih, Minak Menag Jagat, dan Minak Pengatit yang merupakan kelompok buay Unyi yang berasal dari Buyut. Sampai sekarang buay Unyi telah berkembang menjadi beberapa bilik, adalah penduduk asli yang dominan di anek ini.

Pada tahun 1928, didirikan pemerintahan Marga di anek Gunung Sugih. Sedangkan pada zaman Jepang, di sini didirikan Gincu Puku Gincu oleh pemerintahan Jepang yang merupakan Pemerintahan setingkat Kewedanaan, sampai Indonesia Merdeka.

Pada tahun 1960 Kewedanaan dihapuskan dan dijadikan Kecamatan, dan anek Gunung Sugih ini menjadi Ibukota Kecamatan. Pada tahun ini juga mulai berdatangan penduduk yang berasal dari Jawa yang sekarang ini umumnya mendiami pedukuhan-pedukuhan dan hidup berdampingan dengan penduduk asli (Lampung).

Penduduk pekon Kedondong, pada dasarnya merupakan pindahan dari daerah Pesisir Limau, Kecamatan Cukuh Balak sekarang. Menurut jenjang perpindahan, maka yang lebih dahulu menetap adalah kelompok yang berasal dari Banjar Agung yang sekarang menetap dibagian ilir dari pekon tersebut, kemudian disusul oleh kelompok Kuripan yang sekarang menetap dibagian tengah dan yang terakhir adalah yang berasal dari pekon Ampai yang sekarang menetap diantara kedua pemukiman di atas. Masing-masing kelompok yang melakukan perpindahan dan menetap dipekon Kedondong itu mendirikan penyimbang atau **Seibat**, dan sekarang ini pekon Kedondong memiliki 10 penyimbang seibat, yang berdasarkan keturunan tergabung

dalam buay **Randau**. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : Kuripan, (Batin Pemuka Dalam Jaksa Marga, Batin Ayu Dalom, Batin Sampurna Jaya, Batin Dalam Raja Ulangan, Batin Darupa, Batin Mangunan) dan Banjar Agung (Batin Dalam Syarif Marga, Batin Panji Kesuma, Batin Mangku Desa) serta Pekon Ampai, asal dari Batin Panji.

Oleh karena letak pekon Kedondong ini terletak di tengah wilayah Kecamatan Kedondong, maka pekon Kedondong berkembang menjadi suatu kampung dengan status ibukota Kecamatan.

Penduduk kampung Walar berasal dari Senusuk di Ranau yang sekarang termasuk kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dari Buay Aji. Kampung yang pertama ialah dibagian Udik kampung sekarang ini yang lebih dikenal WALUR PEKON UNGGAK yang artinya Walar kampung di hulu. Karena ditepi sungai banyak gangguan penyakit maka pindah ke SAPU BALAK yang artinya Pondok besar, di tepi pesawahan sekarang ini. Di sini pun terjadi gangguan dari Badak dan Gajah. Kampung dipindah lagi ke KAUNYAYAN yang artinya keselamatan, karena terletak di sebuah bukit ditengah dataran rendah. Pada mulanya ketiga kampung ini masih berdiri sendiri, belum ada kerjasama dengan sekelilingnya, namun status adalah dalam kedudukan marga. Kemudian kampung ini menjadi TIYUH yang tergabung dengan marga Pugung Tambak.

Sistem mata pencaharian :

Secara umum mata pencaharian suku bangsa Lampung adalah bercocok tanam. Dalam hal ini yang pertama dikenal adalah berladang. Sistem yang digunakan disebut **Pulan Tuha** (tuho) atau **alas/las tuho**, atau kadang-kadang disebut juga **rimba bangang**. Dari proses ladang barulah dikenal kebun tanaman keras misalnya kopi dan lada.

Cara berladang dari masyarakat Lampung pada masa lalu adalah dengan sistem berpindah-pindah. Hal ini dimungkinkan oleh karena pada masa yang lalu, areal hutan yang dapat digunakan untuk berladang masih banyak. Pada saat ini tidak dikenal lagi karena tanah untuk berladang sudah semakin berkurang. Dalam berladang ini, masyarakat Lampung mengambil lokasi yang jauh dari anak/kampung, dimana mereka mendiri-

kan pondok-pondok. Masyarakat Lampung menyebutnya dengan **umbulan**. Lokasi untuk berladang pada umumnya merupakan areal yang dekat dengan sungai dan sudah banyak umbulan yang tadinya merupakan tempat usaha, kemudian berubah menjadi anek atau tiyuh.

Sistem mata pencaharian di lokasi penelitian, pada dasarnya tidak berbeda dengan keadaan yang telah digambarkan di atas. Secara umum masyarakat setempat hidup dari bercocok tanam, terutama tanaman keras, seperti kopi, lada dan karet. Sebagian kecil dari penduduk di lokasi penelitian ada yang bekerja sebagai pegawai negeri.

Sistem kekerabatan.

Pada dasarnya yang dinamakan keluarga batih adalah satuan keluarga yang terdiri dari seorang suami, seorang isteri dari suami itu dan anak-anak yang belum kawin. Keluarga yang demikian ini juga disebut keluarga inti atau nuclear family (3 : 105). Keluarga batih yang ada pada masyarakat Lampung pada dasarnya merupakan keluarga batih yang monogami. Keluarga batih di sini disebut sebagai **sango mianak** (Pepadon). Tetapi kadang-kadang dalam suatu rumah tangga tinggal tidak saja ayah, ibu dan anak-anaknya, tetapi juga isteri dari anak-anak mereka yang laki-laki, adik dari pihak suami atau isteri, juga seringkali menetap ibu dari suami. Anak pada masyarakat Lampung pepadon, terdiri dari **anak ratu** dan **bukan anak ratu**. **Anak ratu** adalah anak tertua laki-laki dan perempuan. Apabila suami mempunyai isteri lebih dari seorang maka yang disebut anak ratu adalah anak laki-laki dan perempuan tertua dari isteri tertua atau pertama. Peranan ayah (suami) dalam rumah tangga adalah sebagai penanggung jawab dalam semua urusan, baik urusan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Isteri atau ibu berkewajiban mengurus rumah tangga, sedangkan anak-anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua. Kewajiban dari pihak anak adalah berbakti kepada orang tua. Sedangkan hak dari pada anak adalah mendapat pengurusan dari orang tua secara baik. Secara umum, anak laki-laki tertua mempunyai kedudukan yang istimewa pada masyarakat Lampung. hak dari anak tertua laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan anak laki-laki dan perempuan yang lain dapat dianggap sebagai **numpang** dalam keluarga tersebut.

Apabila kepala keluarga meninggal dunia maka yang menjadi kepala keluarga itu adalah anak tertua laki-laki, artinya dialah sebagai penanggung jawab dalam semua urusan.

Sistem religi.

Walaupun memang di daerah Lampung terdapat berbagai agama yang dianut oleh penduduknya, yaitu agama Islam, Khatolik, Kristen Protestan dan Hindu, tetapi dapat dikatakan bahwa suku bangsa Lampung pada dasarnya menganut agama Islam.

Oleh karena suku bangsa Lampung adalah 100% beragama Islam, maka aliran-aliran berdasarkan agama yang dibicarakan di sini adalah aliran-aliran yang ada berdasarkan agama Islam. Sebagian dari penduduk suku bangsa Lampung merupakan anggota perkumpulan Muhammadiyah. Hampir pada daerah-daerah dimana berdiam suku bangsa Lampung, dapat dilihat adanya papan-papan nama yang menandakan adanya perkumpulan Muhammadiyah pada pekon atau anek serta tiyuh yang bersangkutan.

Di lokasi penelitian Kedondong dan Walur semua penduduk asli menganut agama Islam. Diperkampungan Blambangan terdapat 207 orang yang menganut agama selain Islam yakni : 185 orang Katholik, 20 orang Protestan, dan 2 orang Budha. Mereka ini adalah para pendatang yang menetap di sana sejak tahun 1976. Dengan demikian suku bangsa Lampung yang berdiam di anek Blambangan dapat dinyatakan bahwa semuanya adalah menganut agama Islam. Agama memberi pengaruh kepada masyarakat, baik dalam cara berpikir, cara berbuat maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Tetapi pengaruh dari agama tersebut tidaklah mencakup keseluruhan dari bidang-bidang kehidupan manusia. Pada masyarakat suku bangsa Lampung, bidang-bidang kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh unsur agama Islam terdapat dalam bidang waris, sebagian dari bidang perkawinan, dan berbagai bidang lainnya.

Dalam bidang waris, pola pewarisan masyarakat suku bangsa Lampung pada dasarnya tidak dibuat atas dasar peraturan agama yang dianut oleh masyarakat ini. Pembagian harta waris dan ahli waris menurut konsepsi masyarakat Lampung adalah tidak sama dengan konsepsi yang diberikan oleh agama yang dianut masyarakat suku bangsa Lampung yaitu Islam. Ahli waris adalah anak tertua laki-laki, dengan demikian

pada masyarakat ini tidak dikenal pembagian warisan. Dalam bidang perkawinan, khususnya dalam hal siapa yang boleh kawin dengan siapa, sebagian dari konsep di sini tidak seirama dengan konsepsi dari agama yang dianut. Pada masyarakat suku bangsa Lampung, merupakan perbuatan yang tercela apabila melakukan perkawinan **ngakuk kelana**, yaitu dimana mempelai wanita adalah anak kelana (asal ibu).

Di atas telah dibicarakan sedikit mengenai konsepsi masyarakat yang tidak terpengaruh oleh unsur agama. Apabila dinyatakan bahwa dalam bidang perkawinan, sebagian memperoleh pengaruh agama, maka di sini dapat dilihat segi yang mana dari agama itu telah diresapi sehingga pola berpikir dan berbuat merupakan aplikasi dari agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam bidang perkawinan, pola berbuat dan berpikir masyarakatlah yang mengalami perubahan, karena di sini agama adalah sangat menentukan dalam hal sahnya perkawinan. Dalam bidang susila kelihatannya konsepsi agama cukup berpengaruh di sini. Pengertian zinah yang ada pada masyarakat suku bangsa Lampung pada dasarnya merupakan suatu konsep yang sama dengan yang diajarkan oleh agama. Anak yang lahir dari perbuatan zinah yang oleh masyarakat suku Lampung disebut dengan **anak kapping**, merupakan anak yang akan merana hidupnya. Ia dan keturunannya nanti akan menjadi buah bibir masyarakat, dan merupakan orang yang patut dijauhi dari pergaulan, misalnya dalam pemilihan jodoh dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita yang melahirkan **anak kapping** itu akan disingkirkan oleh masyarakat.

Masyarakat suku bangsa Lampung yang beradat pepadon, pada dasarnya tidak mengenal perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang tercela sehingga dengan tidak mengenalnya perceraian ini adalah merupakan salah satu bukti tentang besarnya pengaruh agama dalam masyarakat. Di dalam bidang pergaulan sehari-hari, beberapa dari konsepsi agama dapat ditemukan di sini. Hormat kepada mereka yang lebih tua merupakan konsepsi masyarakat yang berlaku umum. Taat dan patuh kepada kedua orang tua, adalah suatu konsep masyarakat yang merupakan indikator kebaktian anak terhadap orang tua. Pembangkangan terhadap orang tua akan mengakibatkan suatu kejadian yang akan menimpa diri sendiri dan bila mengerjakan hal yang dilarang oleh orang tua, akan mengakibatkan **kualat**

yang mengakibatkan akan sengsara hidupnya.

Dengan menampilkan dua uraian yang berbeda mengenai pengaruh agama dalam masyarakat, maka dapatlah dilihat bagaimana kadar dari pengaruh agama dalam masyarakat. Pada bidang-bidang tertentu, kelihatannya pengaruh agama sangat besar, akan tetapi pada bidang kehidupan yang lain dirasakan bahwa agama tidak memberi pengaruh sama sekali, atau bila ada, maka pengaruhnya yang diberikan itu relatif sangat sedikit sekali.

Beberapa kelompok dari masyarakat suku bangsa Lampung, masih percaya bahwa benda-benda kuno atau benda-benda antik mempunyai kekuatan sakti. Terhadap benda-benda tersebut harus dipelihara dengan baik, sebab kalau hal itu tidak dilakukan akan menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat. Tempat penyimpanan benda-benda tersebut adalah loteng rumah. Dikalangan suku bangsa Lampung yang beradat pepadon misalnya alat perlengkapan adat seperti bangku pepadun dan *sesaka*, yaitu sandaran pepadun dianggap mempunyai kekuatan sakti. Pada masyarakat Saibatin terdapat benda-benda yang disebut *pamanoh*, yaitu benda-benda tangkal (tumbal), suatu benda yang dianggap keramat. Apabila ada tanda-tanda berjangkitnya penyakit menular yang oleh masyarakat Lampung disebut *ta'un*, benda-benda ini diturunkan dari panggar, diberishkan dan dibacakan *tangguh* untuk makhluk-makhluk supernatura yang menguasainya, dengan permohonan agar anak cucunya terhindar dari serangan *ta'un* itu.

Di samping itu masyarakat suku bangsa Lampung masih menaruh kepercayaan kepada dukun, bahwa dukun dianggap mempunyai kekuatan sakti. Pada masyarakat Lampung, masa yang lalu masih dilakukan upacara pemujaan sehubungan dengan pekerjaan membuka tanah untuk perladangan. Upacara pemujaan yang demikain ini dilakukan pada saat *ngengah taneh* untuk dibuka. Upacara ini maksudnya adalah meminta izin kepada yang empunya tanah untuk dibuka tanahnya dijadikan ladang. Dalam upacara ini dilakukan dengan pembakaran kemenyan dan juga pada saat benih akan ditaburkan, sebelumnya juga dilakukan upacara yaitu dengan cara menaruh benih diatas bakul, kemudian diselimuti dengan kain putih dengan membaca do'a yang berupa mantera-mantera dengan maksud agar benih yang akan ditaburkan nanti tumbuh dengan baik. Selanjutnya

banyak upacara-upacara yang dilakukan dalam bidang ini sebagai suatu proses produksi dalam pertanian.

Bentuk upacara lain yang berkaitan dengan kesatuan hidup setempat yang mempunyai hubungan dengan mata pencaharian adalah **ngumbai**, yaitu upacara yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di kampung yang bersangkutan dengan menyembelih seekor kerbau, dimana dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat. Sewaktu dilakukan penyembelihan, semua orang yang mempunyai ladang membawa janur enau, dan janur enau itu disirami dengan darah kerbau tersebut, kemudian digantung pada tiang yang telah disediakan untuk itu, dan diletakkan atau ditancapkan dikebun, sawah maupun ladang. Tujuan dari **ngumbai** ini adalah agar panen menjadi berhasil dengan baik.

Kepercayaan agar panen berhasil baik harus dilakukan **ngumbai**, masih melekat dalam alam pikiran masyarakat khususnya bagi orang-orang tua. Oleh karena kebetulan panen tidak berhasil dan kebetulan pula tidak diadakan acara ngumbai, maka mereka mengatakan bahwa kegagalan panen tahun ini misalnya adalah sebagai akibat tidak melakukan acara ngumbai tersebut.

Upacara ngumbai ini dilakukan secara **kenduri** di mesjid dengan berzikir dan membaca semua riwayat hidup Sech Samman Almadina. Dengan demikian kelihatannya bahwa pemujaan terhadap leluhur dan mengundang leluhur itu untuk kesuksesan dalam segi kehidupan merupakan kepercayaan yang masih ada dalam masyarakat.

Dari uraian di atas kelihatan bahwa cara berpikir dari masyarakat atau sebagian anggota masyarakat masih diliputi suasana **magis religius**, artinya bahwa alam ini dikuasai oleh makhluk-makhluk halus merupakan kepercayaan yang masih hidup dalam masyarakat. Cara berpikir yang demikian ini menimbulkan pula cara berbuat dari masyarakat yang bersangkutan. Menimpakan kesalahan karena tidak melakukan hal itu merupakan bukti dari cara berpikir masyarakat yang merupakan pengaruh dari kepercayaan yang pernah dan dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam kehidupan sehari-hari akan kita temui banyak hal yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap kekuatan sakti, dari binatang-binatang, benda-benda dan sebagainya. Hal di atas ini merupakan refleksi dari

DAFTAR RALAT

Halaman	Baris Ke		Tertulis	Seharusnya
	Dari atas	Dari bawah		
1	2	3	4	5
15		18	Lamban khepah	lamban khebah (khebah = rendah
19	15		Pesisir Selatan	ditambah Pesisir Utara
23		Tabel IV	Walur jumlah	(jumlah dianggap tak ada)
27		20	Bukuk jadi	Buku jadi
28		2	Seibatin	Saibatin
29	4		Batin Mangunan	Batin Mangunang
29	11		Kampung Walur	Kampung Walur
29		15	Pugung Tambak	Pugung Tampak
35	12		da	da
39	4		Anek milang maya	Mulang maya
42		18	Zaman pemerintah Belanda	Zaman Pemerintahan Jepang
47	4		Himpunan pekon	himpun pekon
67	7		Pandi Pakusara	Pandia Pakusara
84		2	Mak nguwai juga	mak nguwah juga
85	2		Nuar lemasa namon kewurak.	Nuar lemasa nanom kemurak
86		6	nyerako upi di kejuk	nyerahko upi dikejuk
87	9		(loom)	(liom)
87		11 dan 12	masyarakat itulah	Satu kalimat saja baris 12
			masyarakat itulah	
			(tercetak 2x/ulang)	
		10	ruan dari kalimat ini tidak ada awalnya jadi terputus.	Pergunjangan ini sering dilakukan di pangkalan mandi, di peta
88	3		masyarakat masalah	masalah.

INDEKS

98	$\frac{A}{16}$		Asing hilong niken	Asing hilokni kena
98	$\frac{K}{N}$	7 dan 8	Kecik pepanca	Kicik pepanca
99	$\frac{m}{m}$	1; 2; 3;	Ngagugom dan ngariki	Ngagugom dan Ngariko
	$\frac{P}{R}$		ngakuh kelamo	ngakuh kelamo
	$\frac{m}{m}$		ngarekah pemanoh	ngaregah pemanoh
	$\frac{P}{R}$	10, 11	nyeraho upik dikejuk	nyerahko upi dikejuk
	$\frac{m}{m}$		menguduh damar	mengunduh damar
	$\frac{P}{R}$	9	meguduh lada	mengunduh lada
	$\frac{m}{m}$	7	Pulau tuha	pulan tuha
	$\frac{P}{R}$		rabai hantu kidang	rabai di hantu kidang
	$\frac{T}{S}$		nyumpit mayat	nyumpik mayat
99	$\frac{T}{S}$	3	tambakni bujang	tambakni bajang
	$\frac{S}{T}$	17	sisambatan	Sasimbatan
100	T. 6		Tungkai kibau	Tungkahni kibau
	P. 6		Pengawa	Penggawa.

cara berpikir, sehingga dalam berbuat sesuatu terdapat pandangan yang harus dituruti.

Bahasa.

Suku bangsa Lampung mempunyai bahasa tersendiri yang disebut **bahasou Lampung** atau **umung Lampung** atau **cawo Lampung**. Begitu pula mengenai bahasa tulisan, suku bangsa Lampung mempunyai aksara sendiri, yang dalam percakapan sering disebut **surat Lampung**. Mengenai bahasa tulisan ini tampaknya mirip dengan aksara Batak dan Bugis. Jumlah hurufnya sebanyak 20 (dua puluh) buah, dengan bunyi abjadnya adalah sebagai berikut :

Ka	ga	nga	pa	ba	ma	ta	da	na	ca
ja	nya	ya	a	la	ra	sa	wa	ha	gha

Bahasa Lampung mempunyai dua dialek, yaitu dialek "O" dan dialek "A". Dialek O dipakai oleh masyarakat Lampung yang beradat pepadon kelompok Abung Siwo Migo dan Rarem Mogo Pak, sedangkan dialek A dipakai oleh masyarakat Lampung yang beradat pepadun kelompok masyarakat Pubian Telu Suku dan Buay Lima serta seluruh masyarakat suku bangsa Lampung yang beradat Saibatin. Sebagai contoh dapat dibaca pada tabel sebagai berikut :

Tabel VI : Perbedaan dialek dalam bahasa suku bangsa Lampung.

Bahasa Indonesia	Bahasa Lampung	
	dialek o	dialek a
Ingin ; mau	a g o	a g a
Sekarang	t a n o	g a n t a
Teman	j a m o	j a m a
T u a (sifat)	t u h o	t u h a

Beberapa hal yang agak mempengaruhi pengucapan, yaitu huruf O pada kata-kata yang terletak pada awal dan tengah kata, maka akan diucapkan "U". Contohnya : pohon menjadi puhun, tomat menjadi tumat, Bogor menjadi bugor dan sebagainya. Untuk suku Lampung yang berdiam dibagian tengah dan Utara dari Lampung bagian Barat, pengucapan huruf "I" pada kata-kata yang terletak dari huruf "I" di akhir kata, maka ia akan diucapkan sebagai "E". Contoh : kanik menjadi kanek (makan), cutik menjadi cutek (sedikit), lunik menjadi lunek (kecil), betik menjadi butek (baik atau indah).

BAB III

BENTUK KOMUNITAS

CIRI-CIRI KOMUNITAS KECIL.

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa bentuk dari suatu komunitas kecil pada masyarakat Lampung adalah apa yang disebut dengan **anek tiyuh** (Pepadon), **pekon** (Saibatin). Kelihatannya bahwa kesatuan hidup setempat yang dinamakan **anek**, **tiyuh** atau **pekon** ini, adalah merupakan suatu wilayah kediaman dari sekelompok orang yang berasal dari satu kebuayan.

Pembahasan mengenai ciri-ciri dari komunitas kecil akan menguraikan tentang batas-batas wilayah, legitimasi dan atribut-atribut saja.

Batas-batas wilayah.

Pada awalnya suatu **anek**, **tiyuh** atau **pekon**, tidaklah mempunyai batas wilayah yang tegas, artinya tidak terdapat ketentuan secara pasti mengenai mana batas wilayah dari suatu **anek**, **tiyuh** maupun **pekon**. Menurut keterangan masyarakat, penentuan wilayah suatu **anek**, **tiyuh** maupun **pekon**, terjadi atau dikenal pada masa adanya pemerintahan marga, yaitu diperkirakan sekitar tahun 1924 atau sekitar tahun 1926. Penentuan batas-batas wilayah itu, dilakukan dengan menggunakan batas-batas alam maupun buatan. Batas-batas alam, misalnya sungai (*way*), sedangkan pada daerah pantai sering dipergunakan **ujung** atau **bojong**. Pada saat ini status dari **anek**, **tiyuh** atau **pekon**, pada dasarnya telah menjadi suatu kampung administratif, sehingga batas-batas wilayah dapat dinyatakan secara nyata. Batas-batas wilayah dari **anek**, **tiyuh** atau **pekon** yang telah menjadi kampung secara administratif itu merupakan daerahjangkauan kegiatan administratif yang mungkin menjangkau sampai pada daerah-daerah yang menjadi tempat berusaha dari masyarakat yang bersangkutan yang biasanya disebut dengan **umbulan**, atau **talang**. Apabila diperhatikan, maka terdapat perbedaan antara wilayah **anek** atau **pekon** dengan kampung administratif. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang **anek Blambangan** yang secara administratif menjadi kampung itu. Kampung Blambangan sebagaimana telah dise-

butkan di muka, mempunyai dua daerah pedukuhan dan satu wilayah induk. Kampung induk inilah yang sebenarnya merupakan anak atau wilayah anak menurut adat-istiadat atau hukum adat. Sedangkan dua daerah pedukuhan atau apalagi yang menjadi daerah usaha dari masyarakat setempat tidak termasuk dalam pengertian anak. Dengan demikian, yang merupakan wilayah anak atau pekon pada dasarnya adalah wilayah pemukiman, termasuk daerah sebagai pangkalan mandi dan wilayah yang diperuntukkan buat pekuburan yang biasanya terletak di luar perkampungan. Dengan demikian wilayah kerukunan adat dari masyarakat setempat tersebut adalah daerah anak atau pekon tersebut. Namun demikian, adat-istiadat tidak saja menguasai mereka yang berada dalam anak atau pekon itu, akan tetapi termasuk mereka yang berada diluar pekon itu, asalkan mereka itu masih merupakan anggota dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap kegiatan yang akan dilakukannya tetap akan berorientasi dengan pimpinan masyarakat dimana ia menjadi anggotanya. Oleh karena itu masyarakat Lampung dapat digolongkan ke dalam masyarakat yang geneologis.

Legitimasi.

Agar dapat dinyatakan sebagai anak, tiyuh atau pekon, telah ditentukan syarat-syaratnya. Menurut adat-istiadat maka dalam mendirikan anak, bagi masyarakat Lampung pepadon, harus memenuhi syarat seperti berikut :

1. Harus ada sesat,
2. harus ada pepadun,
3. harus ada suku,
4. harus ada kuwayan.

Suku adalah suatu kesatuan geneologis yang terdiri dari satu atau beberapa keluarga dan rumah tangga. Untuk mendirikan **anak**, atau **tiyuh**, secara minimal harus mempunyai dua suku, artinya terdapat dua suku yang akan mendiami anak yang akan didirikan itu, sedangkan Kuwayan adalah tepian sungai yang dipergunakan untuk mandi. Juga dalam meresmikan suatu wilayah kediaman suatu anak atau tiyuh, diperlukan suatu proses. Proses pertama adalah permufakatan antara suatu ke-

lompok anak atau tiyuh, dimana anak atau tiyuh yang akan didirikan itu merupakan bagiannya. Sebagai contoh, untuk meresmikan anak Blambangan, maka harus diadakan permusyawaratan antara anak-anak Milang maya, Kota Alam, Bumi Agung dan Surakarta. Setelah disepakati, maka harus diadakan **gawi** (upacara adat) dengan mengundang keseluruhan anak dari kebuayan yang bersangkutan (dalam contoh diatas, adalah buay atau kebuayan Nunyai) dan kebuayan lain untuk menyaksikan peresmian anak tersebut.

Pada masyarakat Lampung yang menganut adat Saibatin, maka untuk dapat mengetahui atau melihat apakah suatu wilayah kediaman telah merupakan suatu komunitas, dalam hal ini disebut **pekon**, maka akan tampak di sana :

1. Mesjid di tengah-tengah perkampungan yang digunakan untuk Jum'atan,
2. seorang penimbang pekon,
3. dua pangkalan mandi, yaitu pangkalan **bebai** (sebai) dan pangkalan **bekas/ragah**.

Khusus untuk daerah pesisir barat, terutama untuk daerah Krui, syarat-syarat di atas harus ditambah dengan :

4. Lambang **gagaman**, yaitu pegangan penimbang pekon/tiyuh bila ada pertemuan marga/kebuayan.

Apabila diperhatikan dengan seksama, maka kelihatan bahwa masyarakat Lampung yang menganut **pepadun** dan Saibatin, masing-masing mengembangkan syarat yang berbeda untuk hal legitimasi dari suatu anak atau pekon. Perbedaan di atas pada dasarnya dapat dikembalikan kepada sistem keadatan yang dianut oleh kedua masyarakat itu. Namun di antara hal yang berbeda, dalam legitimasi terdapat hal yang sama, yaitu bahwa pada masyarakat Lampung, baik yang menganut adat pepadun atau saibatin, harus adanya **wayan**, yaitu pangkalan mandi bagi masyarakat yang bersangkutan, dalam hal melegitimasi suatu **anak** atau **pekon**.

Atribut-atribut.

Dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal mendirikan suatu anak atau pekon, sebagaimana telah dipa-

parkan di atas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi itu akan menjadi atribut dari suatu anak atau tiyuh maupun pekon, selain dari pada itu, khususnya pada masyarakat Lampung yang menganut adat **pepadun** dalam setiap anak, akan dijumpai bangunan Mesjid. Mesjid merupakan kelengkapan yang diharuskan keberadaannya bagi setiap anak atau tiyuh. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Mesjid merupakan salah satu atribut dari anak atau pekon.

Atribut-atribut dari suatu anak pada masyarakat Lampung **pepadon** adalah **sesat**, **suku**, **wayan**, **pepadun** dan **mesjid** sedang suatu pekon pada masyarakat **saibatin** adalah **mesjid**, **penyimbang saibatin**, **wayan** dan khusus untuk daerah Krui ditambah dengan **Gagaman**.

Oleh karena anak atau pekon telah merupakan kampung sebagai daerah administratif pemerintahan terendah, maka oleh pemerintah atasan, diharuskan adanya suatu **balai desa**. Dengan demikian, bangunan balai desa telah pula menjadi salah satu dari atribut suatu kampung (secara administratif).

STRUKTUR KOMUNITAS KECIL

Sebagaimana telah dapat dibaca pada uraian mengenai ciri-ciri komunitas kecil, khususnya pada uraian mengenai legitimasi, bahwa pada masyarakat Lampung **pepadon**, salah satu syarat untuk adanya suatu anak atau tiyuh, harus ada suku. Dengan demikian, suatu anak atau tiyuh akan terdiri dari beberapa suku. Tiap suku akan terdiri dari satuan rumah tangga. Jumlah rumah tangga tiap suku itu tidaklah tentu.

Anak juga merupakan bagian dari suatu komunitas yang lebih besar yang dinamakan **kebuayan** atau **marga**. Marga pada dasarnya merupakan suatu wilayah yang didiami oleh suatu **kebuayan**. **Kebuayan** merupakan suatu kesatuan geneologis yang terbesar, di mana para anggotanya merasa bahwa mereka adalah seasal dan seketurunan dari satu nenek moyang yang dianggap leluhur, yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki. **Kebuayan** ini pada hakekatnya merupakan **clan**, yang mendiami wilayah yang dinamakan **marga** itu.

Pada masyarakat Lampung **saibatin**, **pekon** hanyalah merupakan bagian dari **Marga** atau **kebuayan** (dalam arti geneologis). Pada saat sekarang, baik anak, tiyuh maupun pekon, statusnya telah merupakan kampung administratif, maka ia merupakan bagian dari suatu komunitas yang lebih besar yang dinamakan **kecamatan**. Pada daerah Lampung,

suatu kecamatan secara rata-rata membawahi 21 kampung (di daerah Lampung terdapat 71 kecamatan dengan 1.492 desa/kampung).



PEMERINTAH DALAM KOMUNITAS KECIL.

Sejarah pertumbuhan pemerintahan.

Mengenai sejarah pertumbuhan pemerintah, yang akan diuraikan adalah semacam sejarah bentuk pemerintahan yang pernah diterapkan dalam komunitas kecil tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang sejarah pertumbuhan pemerintah, maka akan dikemukakan uraian mengenai hal tersebut pada tiap-tiap komunitas kecil dari lokasi penelitian. Di pekon Walur, pada zaman sebelum kedatangan Belanda dan Inggris, pemerintahan dalam pekon adalah berdasarkan atas kepenyimbangan. Pekon dipimpin atau dikepalai oleh seorang penyimbang pekon, yang disebut **raja**. Raja sebagai pimpinan

pekon mempunyai otonomi yang seluas-luasnya. Ia merencanakan serta melaksanakan dan mengambil keputusan untuk permasalahan penduduk pekon yang bersangkutan. Pekon di sini telah merupakan bagian dari kebuayan. Suatu buay dipimpin atau dikepalai oleh penyimbang buay, yang berkedudukan di Ranau.

Pada zaman kekuasaan Inggris, penduduk dari pekon ini telah memeluk agama Islam. Pemerintah Inggris pada dasarnya tetap mempertahankan pemerintahan kebuayan dan menyetujui untuk mengangkat perwakilan di daerah pesisir, yang terpisah dari penyimbang buay yang berkedudukan di Ranau itu. Pada dasarnya pemerintah Inggris (1769 — 1830), tidak banyak menentukan aturan pemerintahan tingkat pekon, tetapi ia hanya mengatur mengenai masalah afdeling saja. Pimpinan pemerintahan Inggris pada dasarnya hanya melakukan hubungan dengan penyimbang kebuayan saja.

Pada zaman pemerintahan Belanda (1867 — 1942), kepala atau pimpinan pekon adalah **Peroatin** atau **Peratin**. Pada zaman itu ditetapkan pemerintahan marga administratif, yang dikepalai oleh seorang pasirah. Pasirah yang sangat berjasa terhadap pemerintah Belanda, ditingkatkan gelarnya menjadi **Pangiran**, dengan atribut tongkat berkepala emas lambang krown. Sedangkan pada zaman pemerintahan Belanda tetap dipergunakan, hanya saja kepala atau pimpinan **pekon** diganti sebutannya menjadi **gonco**.

Pada zaman kemerdekaan (1945 — 1950), daerah Walur ini dipisahkan dari Bengkulu dan dimasukkan ke dalam wilayah pemerintahan keresidenan Palembang. Pemerintah tingkat pekon pada dasarnya masih mengikuti pola yang ada pada zaman pemerintahan Belanda. Pada tahun 1950, kampung Walur masuk menjadi wilayah keresidenan Lampung yang kemudian menjadi Propinsi Lampung, dalam status sebagai desa/kampung administratif. Karena di kampung ini telah ada suku yang dikepalai oleh seorang kepala suku, maka salah satu dari kepala suku yang ada bertindak sebagai sekretaris (carik) kampung.

Pada masa sebelum penjajahan Belanda, pekon Kedondong telah merupakan bagian dari suatu kebuayan. Kebuayan dipimpin oleh seorang kepala buay yang disebut **Paksi** atau penyimbang bandar. Sedangkan pekon Kedondong itu

sendiri dipimpin oleh penyimbang pekon. Seperti halnya dengan pekon Walur, pekon dan anek dalam wilayah Lampung, pada zaman pemerintahan Belanda ditetapkan sebagai pemerintahan **marga** administratif, yang dikepalai oleh seorang yang disebut **Pasirah**. Pada masa pemerintahan Jepang, pola pemerintahan yang ada pada masa Belanda tetap digunakan.

Pada zaman kemerdekaan, pekon Kedondong mengalami keadaan yang sama dengan desa-desa lain di daerah Lampung, yaitu menjadi kampung secara administratif yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung, yang oleh masyarakat setempat disebut dengan **Kapalo**.

Sejarah pertumbuhan pemerintahan pada anek Blambangan, dapat dinyatakan sebagai berikut : Oleh karena setiap anek atau tiyuh akan terdiri dari suku-suku, maka pada tingkat bawah pekon terdapat pemerintahan suku, yang dikepalai oleh seorang penyimbang suku. Suku pada dasarnya tidaklah merupakan masyarakat setempat atau kesatuan hidup setempat, oleh karena dasar wilayah tidak dipunyai oleh suku. Suku merupakan masyarakat geneologis. Anek atau tiyuh merupakan bagian dari suatu kebuayan. Anek dikepalai oleh seorang penyimbang anek (penyimbang tiyuh). Sedangkan buay dikepalai oleh seorang penyimbang buay. Pada zaman pemerintahan Belanda, di sekitar tahun 1924 atau mungkin tahun 1926 oleh pemerintah Belanda dibentuk pimpinan anek, yang pada dasarnya mengurus kepentingan Belanda di situ. Pimpinan anek ini dipilih dari para penyimbang yang ada di anek yang bersangkutan. Sedangkan pada tingkat atas anek, yaitu pada tingkat kebuayan, dibentuk pimpinan marga. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa marga adalah suatu wilayah yang didiami oleh suatu kebuayan. Dengan demikian pada zaman Belanda ini dibentuk suatu masyarakat hukum yang teritorial sifatnya. Marga dikepalai atau dipimpin oleh seorang penyimbang marga.

Pada zaman pemerintahan Jepang, oleh pemerintah Jepang tidak diadakan perubahan, artinya bahwa struktur pemerintahan pada zaman Belanda tetap dipergunakan. Pada zaman kemerdekaan, sebagaimana terdapat pada kampung yang lain di daerah Lampung ini, anek Blambangan telah menjadi kampung administratif, dengan pimpinan yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah atau berdasarkan atas pemilihan

yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian selain dari kepala kampung yang oleh masyarakat disebut **kapalo**, terdapat juga pemerintahan adat yang dipimpin oleh penyimbang, secara bersama-sama. Dalam keadaan tertentu, atas dasar murwatin, maka akan ditunjuk seorang penyimbang dari penyimbang yang ada (penyimbang marga, penyimbang tiyuh, penyimbang ratu) sebagai ketua dan seorang lagi sebagai sekretaris. Penunjukan seseorang sebagai pimpinan di sini diikuti dengan ketentuan yang antara lain adalah kedudukannya dalam masyarakat adat dan pengetahuan yang cukup mengenai adat.

Pada anek Gunung Sugih terdapat pemerintahan suku-suku (bilik) yang dikepalai oleh Penyimbang bilik. Pemerintahan ini bersifat Geneologis. Pemerintahan merupakan bagian dari pada kebuayan yang dikepalai oleh Penyimbang anek (tiyuh). Pemerintah Belanda mengangkat pimpinan anek yang berasal dari para penyimbang yang berpengaruh pada anek tersebut. Sedang pada tingkat kebuayan dibentuk pimpinan marga.

Pada masa Jepang Pemerintahan anek tidak mengalami perubahan. Pada zaman kemerdekaan pemerintahan anek secara administratif dikepalai oleh seorang kepala kampung yang disebut **Kapalo** yang dipilih oleh masyarakat. Selain itu masih terdapat pemerintahan adat yang dipimpin oleh penyimbang.

Carik mempunyai fungsi untuk mengerjakan administratif desa, sedangkan kepala suku mempunyai fungsi untuk membantu Kepala kampung dalam pelaksanaan kepentingan kampung seperti membantu tugas untuk menarik Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Hubungan vertikal.

Hubungan vertikal adalah hubungan antara pemerintahan tingkat komunitas kecil dengan komunitas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sebagaimana telah dinyatakan bahwa pekon atau anek yang telah menjadi kampung administratif, berada di bawah pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan tingkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Camat. Kepala kampung sebagai aparat pemerintahan tingkat kampung, mempunyai hubungan komando dan hubungan konsultatif dengan camat. Camat pada waktu-waktu tertentu mengadakan rapat

koordinasi dengan para Kepala kampung. Rapat koordinasi mana juga dihadiri oleh aparat pemerintahan tingkat Kecamatan antara lain : Dan Sektor Kepolisian, Dan Ramil, Kepala Puskesmas, Kepala Unit BRI, KUA dan sebagainya.

Hubungan horizontal.

Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antara aparat-aparat yang ada, dan antar pemerintahan tingkat kampung. Dengan demikian uraian di sini akan merupakan jabaran mengenai hubungan antara Kepala kampung dengan Carik atau juru tulis kampung, hubungan antara Kepala kampung dengan kepala suku, dan hubungan antara Carik dengan kepala suku. Juga merupakan jabaran hubungan antara Kepala kampung yang satu dengan Kepala kampung yang lain.

Hubungan kerja antara Kepala kampung dengan juru tulis atau Carik adalah hubungan administratif dan komando, dalam arti bahwa tugas yang menyangkut pelaksanaan administratif desa adalah merupakan hubungan yang harus dilaksanakan oleh juru tulis. Misalnya penyelesaian surat-menyurat, penataan potensi desa, dan sebagainya. Sedangkan hubungan kerja Kepala kampung dan kepala suku adalah hubungan komando administratif, di mana Kepala suku merupakan pembantu Kepala kampung dalam hal pelaksanaan kegiatan secara umum. Untuk melakukan atau melaksanakan tugas, ia mendapat petunjuk dan tuntunan dari Kepala kampung. Dengan demikian Kepala suku bertanggung jawab atas berbagai hal dan peristiwa, serta mempunyai hubungan intim dengan Kepala kampung.

Aparat-aparat pemerintah komunitas kecil.

Uraian mengenai aparat pemerintah dalam komunitas kecil adalah uraian mengenai aparat-aparat pemerintah yang ada sekarang ini, yang bersumber pada bentuk mutakhir dari pemerintah yang ada. Penguraian mengenai aparat-aparat ini akan mencakup mengenai bentuk pimpinannya, serta fungsi dari aparat yang bersangkutan.

Bentuk pimpinannya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam komunitas kecil, bahwa bentuk mutakhir dari pemerintahan yang ada pada komunitas kecil, yang oleh masyarakat Lampung disebut dengan

anek, tiyuh, atau pekon itu adalah bentuk pemerintahan kampung administratif. Sebagai kampung administratif, dikepalai oleh seorang Kepala kampung yang oleh masyarakat setempat sering disebut *kapalo*. Kapalo diangkat oleh Bupati atas dasar pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung. Kepala kampung dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat tingkat kampung. Biasanya aparat tingkat kampung adalah Carik atau juru tulis kampung. Kampung sebagai unit pemerintahan terendah, dibagi pula dalam beberapa suku. Pengertian suku di sini adalah tidak sama dengan suku yang merupakan kesatuan geneologis, sebagaimana telah beberapa kali dijabarkan di muka. Setiap suku dikepalai oleh seorang Kepala suku. Ia ditunjuk oleh Kepala Kampung dan diangkat serta disahkan oleh Camat.

Sebagai aparat pemerintah daerah yang terendah, Kepala kampung menangani seluruh kepentingan pemerintahan. Dengan demikian Kepala kampung mempunyai tugas dan kewajiban menjaga agar supaya pemerintahan berjalan dengan baik serta bertanggung jawab terhadap kepentingan rumah tangga desa. Kepala kampung mewakili masyarakat kampung di dalam dan di luar masyarakat kampung. Kepala kampung mempunyai hak otonomi dalam hal mengatur kemaslahatan warga desa dan menyampaikan usul-usul pada Camat atau dan kepada Bupati. Kepala kampung merupakan pengelola dari dana bantuan desa serta merupakan penyalur program bimas dan inmas, demikian juga program-program dari departemen yang lainnya.

LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KOMUNITAS KECIL.

Pada dasarnya lembaga-lembaga sosial yang terorganisir dengan baik di dalam masyarakat Lampung belum begitu dikenal, selain lembaga-lembaga yang oleh pemerintah harus dibentuk dalam suatu kampung. Namun demikian, walaupun dalam bentuknya yang sederhana lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat komunitas kecil suku bangsa Lampung akan dipaparkan di sini.

Lembaga sosial yang ada di bidang ekonomi pada masyarakat Lampung, khususnya pada masyarakat Lampung Saibatin terdapat dalam bidang pengairan atau *parba*. Bentuknya adalah berupa pengaturan atau pemanfaatan dan pembagian air untuk mengairi sawah. Tujuan dari didirikannya lembaga ini adalah agar pengairan sawah berjalan dengan baik, dengan jalan memelihara selokan dan bendungan air.

Keanggotaan dari lembaga ini adalah mereka yang berkepentingan, yaitu para petani pemakai air.

Badan organisasi ini mempunyai pimpinan. Pimpinnannya adalah seorang yang dipilih dan disahkan oleh **himpunan pekon** (masyarakat kampung). Mengenai peranannya dalam komunitas di sini, dapat dinyatakan bahwa lembaga ini mengatur saat untuk turun ke sawah, melakukan pembagian kerja dan pembagian jarak pembersih selokan air (**lampai**). Selain daripada itu, badan organisasi ini mempunyai kewajiban untuk memungut denda dari mereka yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Badan ini memperoleh dana dari bantuan yang diberikan oleh seluruh anggota pemakai air, sedangkan jumlah dari dana bantuan itu bersifat suka rela.

Lembaga lain yang ada dalam bidang pertanian disebut **mulan kaok an**. Bentuknya adalah suatu kegiatan untuk membuka tanah guna dijadikan kebun bibit. Biasanya adalah kebun bibit cengkeh. Tujuan dari diadakannya lembaga ini adalah untuk mendapatkan dana guna memenuhi kebutuhan sosial budaya, misalnya untuk kelengkapan olahraga, kesenian, dan sebagainya bahkan juga untuk rekreasi, serta sekaligus untuk dapat memperoleh pengetahuan dalam bidang pertanian. Kegiatan ini berkembang juga dalam bidang perikanan, khususnya perikanan darat dengan membuat kolam-kolam ikan. Keanggotaan dari lembaga ini adalah para pemuda dari **pekon** atau kampung yang bersangkutan. Pimpinnannya adalah dipilih dari pada pemuda itu juga.

Lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk memenuhi kerukunan hidup kekerabatan, misalnya lembaga perkawinan, lembaga pengangkatan anak, lembaga kewarisan. Lembaga-lembaga ini merupakan suatu lembaga yang dikelola langsung oleh masyarakat, artinya bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat atau adat-istiadat. Pelaksanaan dari hal-hal di atas dilakukan dengan **gawi adat**. Didalam gawi adat itu para penyimbang mengadakan rapat adat (perwatin). Di dalam perwatin ini ditentukan atau diangkat seorang ketua dan seorang sekretaris. Ketua dan sekretaris ini dipilih dari para penyimbang itu. Selain daripada menentukan ketua dan sekretaris, di sini pula ditentukan siapa-siapa yang akan jadi **penglaku**, yaitu mereka yang melaksanakan atau menjalankan upacara gawi adat tersebut. Para penglaku ini terdiri dari **penglaku tuha**, **penglaku penggawo** dan **penglaku muli meranai**. Dengan demikian pimpinan dari lembaga-lembaga dalam sistem kekerabatan, adalah para penyimbang yang dalam aplikasinya dibentuk suatu pengurus serta pelaksana. Keanggotaan dari lembaga ini adalah para penyimbang yang tidak ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris. Apabila

upacara selesai, maka badan organisasi ini akan dibubarkan. Di dalam bidang perkawinan terdapat lembaga resmi yang bertugas untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Selain dalam sistem kekerabatan, terdapat pula lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pada umumnya bentuk dari lembaga ini adalah berupa taman perguruan rakyat (Sekolah Dasar) dan pada lokasi-lokasi tertentu (misalnya di lokasi penelitian : anek Blambangan dan Gunung Sugih) terdapat taman perguruan menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama). Pada umumnya pimpinan dari lembaga pendidikan ini, adalah mereka yang diangkat oleh pihak pemerintah oleh karena pengelola dari taman perguruan ini adalah pemerintah. Peranan dari lembaga ini dalam masyarakat, adalah untuk memberikan pengetahuan dan mendidik putra-putri dari masyarakat yang bersangkutan.

Lembaga pendidikan lainnya, khususnya yang bernafaskan keagamaan, adalah pengajian Al-Qur'an. Lembaga ini dikelola oleh penduduk setempat dengan bentuknya berupa pengajian Al-Qur'an. Beberapa dari penduduk menyelenggarakan pengajian ini di bawah pimpinan para ibu rumah tangga.

Karang Teruna, yang merupakan perkumpulan dari pemuda-pemudi kampung, dengan bentuk kegiatan untuk bidang olahraga dan kesenian serta kegiatan-kegiatan lainnya merupakan salah satu lembaga yang saat ini bertambah pesat. Keanggotaan dari perkumpulan ini sudah tentu adalah para pemuda-pemudi yang bersangkutan. Sedangkan pimpinannya adalah juga dari kalangan pemuda-pemudi yang dipilih dalam suatu acara untuk itu.

Di samping itu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah lembaga yang beranggotakan para ibu-ibu di kampung yang bersangkutan. Pimpinan dari lembaga ini adalah istri dari Kepala Kampung. Sedangkan peranannya dalam masyarakat adalah cukup besar, karena kegiatan-kegiatannya memberi pengetahuan tentang gizi, lingkungan sehat, dan sebagainya.

Beberapa lembaga dalam komunitas kecil, yang merupakan lembaga politik, adalah misalnya Lembaga Sosial Desa, yaitu suatu lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas pembangunan pada masyarakat desa yang bersangkutan. Pimpinan dari lembaga ini adalah Kepala kampung dengan para anggotanya dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Lembaga ini adalah tempat merencanakan, mengevaluasi serta forum konsultasi bagi Kepala kampung dalam menangani pembangunan desa.

BAB IV

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Sistem pelapisan sosial pada dasarnya akan terdapat dalam setiap masyarakat. Betapapun sederhananya masyarakat itu, pasti akan di jumpai sistem pelapisan sosial itu. Sistem pelapisan sosial adalah berlaku pada setiap zaman, yang mencakup masa lalu dan masa kini. Hanya saja ada pelapisan sosial yang sangat tajam dan dilain pihak ada pelapisan sosial yang tersamar. Sistem pelapisan sosial yang tajam, dalam naskah ini disebut sebagai pelapisan sosial resmi, sedangkan pelapisan sosial yang tersamar dinyatakan sebagai pelapisan sosial samar. Oleh karena sistem pelapisan sosial itu mencakup masa lalu dan masa kini, maka kedua periode waktu itu akan diungkapkan pula. Pembahasan mengenai kedua bentuk pelapisan sosial ini, yaitu pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar, baik pada periode masa lalu maupun pada masa kini, akan menyangkut mengenai dasar pelapisan, bentuk pelapisan dan hubungan antar lapisan.

PELAPISAN SOSIAL MASA LALU

Pelapisan sosial resmi.

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan mengenai pelapisan sosial resmi, sebagaimana telah dinyatakan di atas, adalah pelapisan sosial yang menyolok sifatnya.

Pelapisan sosial yang kelihatannya menyolok itu di dalam masyarakat Lampung, baik yang menganut **adat pepadun** maupun yang menganut adat **saibatin**, didasarkan kepada keturunan. Selain dari pada itu, pada masyarakat Lampung Saibatin, terdapat pelapisan sosial atas dasar keaslian, yaitu mereka yang pertama bermukim pada tiyuh atau pekon yang bersangkutan (**penyusuk tiyuh**). Pada masyarakat Lampung yang menganut adat pepadun, yang menjadi lapisan tingkat atas, adalah mereka yang tergolong sebagai **penyimbang**, sedangkan yang termasuk golongan tingkat bawah adalah mereka yang bukan penyimbang.

Adapun yang termasuk dalam golongan tingkat atas, adalah :

1. Penimbang bumi (marga)
2. Penimbang ratu,
3. Penimbang batin,
4. Penimbang raja,

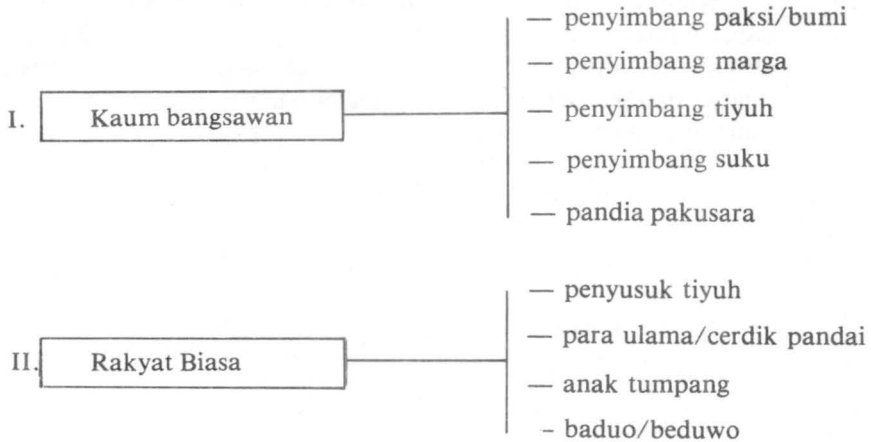
Sedangkan yang termasuk dalam golongan tingkat bawah :

1. Lampung Jajar,
2. Sebah,
3. Beduwo,
4. Lambang,
5. Gundik,
6. Taban.

Selain atas dasar keturunan sebagaimana yang dimaksudkan di atas, terdapat juga pelapisan sosial atas dasar keturunan dari pihak istri. Maksudnya di sini, masyarakat pepadun menganggap bahwa keturunan dari isteri pertama (atau yang disebut **isteri ratu**) merupakan keturunan yang menempati strata tingkat atas, sedangkan keturunan dari isteri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, adalah merupakan keturunan yang menempati strata tingkat bawah. Istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menyebutkan isteri kedua ialah **puppang penyambut**, artinya penyambut ratu, sedangkan bagi isteri ketiga disebut **ganjang tengah**, sedangkan isteri yang keempat adalah **ganjang isi**, dan buat isteri kelima disebut **selasukang**.

Pada masyarakat lampung yang beradat Saibatin, golongan penimbang yang merupakan golongan bangsawan menempati strata tertinggi. Dalam strata ini secara berturut-turut dikenal : penimbang paksi bumi, penimbang marga, penimbang tiyuh, penimbang suku dan pandia pakusara. Di bawah strata ini ditemukan lagi lapisan rakyat biasa. Dalam lapisan ini terdapat lagi beberapa sub lapisan yang didasarkan kepada keaslian (penyusuk tiyuh). Adapun sub lapisan itu urutannya adalah sebagai berikut : penyusuk tiyuh, para ulama/cerdik pandai, anak tumpang, dan baduo/beduwo. Anak tumpang dan beduo, merupakan lapisan paling rendah dalam masyarakat ini.

Apabila keadaan seperti tersebut di atas dilukiskan, maka gambarnya adalah sebagai berikut :



Pada masyarakat Lampung pepadun, dalam pergaulan hidup sehari-hari, mereka yang dari lapisan atas dapat diketahui dari keris yang dipakainya. Apabila seseorang memakai keris dengan gelang/krang dari suasa atau **emas wai besai**, maka oleh masyarakat telah dapat diketahui bahwa mereka itu adalah dari golongan bangsawan. Atribut-atribut lain yang dapat juga membedakan golongan atas dengan golongan bawah terlihat pada pakaian yang dipakai saat dilakukan **gawi adat**. Pakaian yang dikenakan oleh golongan yang termasuk strata atas (bangsawan) adalah sebagai berikut :

1. bujang : a. memakai **bidak sebagi**
b. membuka baju bagian atas (tidak mengenakan kemeja)
c. memakai **punduk**, yaitu keris yang diselipkan di pinggang atau dipegang
d. mengenakan kopiah emas.
2. pengawo : a. memakai pakaian **bidak becukil** (tenunan Lampung dengan benang emas)
b. tidak mengenakan kemeja
c. mengenakan kopiah emas
d. memakai **punduk**
3. Sutan : a. pakaian orang tua dengan potongan seperti jubah
b. mengenakan ikat kepala warna putih
c. memakai **punduk**.

Selain dari atribut-atribut di atas, dalam hal perkawinan juga dapat dilihat perbedaan antara golongan yang termasuk tingkat atas (bangsawan = penyimbang) dan golongan yang termasuk tingkat bawah. Sebagaimana dipahami bahwa pada masyarakat Lampung dikenal **uang jujur**. Pemberian uang jujur sesuai dengan status, yaitu sebagai berikut :

1. Penyimbang bumi asal, penyimbang bumi biasa, penyimbang bumi **nyetih** dan penyimbang ratu asal, harga jujur-nya kalau terhadap luar marga, berjenjang 2400; akan tetapi apabila didalam marga, berjenjang 1200.
2. Penyimbang bumi nyetih, berjenjang 1600
3. Penyimbang ratu nyetih, berjenjang 1200
4. Penyimbang batin, berjenjang 800
5. Penyimbang rajo, berjenjang 400.

Sedangkan untuk golongan :

6. Lampung jajar, harga jujurnya berjenjang 200
7. Sebah, harga jujurnya 160
8. Beduo, harga jujurnya 120.
9. Lambang, harga jujurnya 80
10. Gundik, harga jujurnya 40
11. Taban, harga jujurnya segantang beras, seekor ayam jago, serta sebuah kelapa yang bertunas.

Pada masyarakat Lampung pepadun dan juga pada masyarakat Lampung saibatın, para penyimbang mempunyai atribut berupa payung. Di bawah ini akan dijabarkan atribut-atribut payung yang digunakan. Apabila ia merupakan penyimbang paksi/bumi, maka atributnya adalah **payung gubir** dengan warna tiga macam, yaitu putih, kuning dan hitam di samping memakai selampang pada bahu kanan dalam berpakaian. Bila diarak, mempergunakan **alam geminser/awan telapah**, yaitu sebetuk tenda persegi dengan segala hiasannya, diiringi dengan **alam ruabelas**, yaitu kain panjang dengan jurai dari selendang. Sedangkan untuk penyimbang marga, atributnya adalah **payung kuning**, dan bila berpakaian harus memakai selendang berwarna kuning yang di selampangkan pada bahu kanan.

Pada masyarakat Lampung Pepadun, strata penyimbang menyandang gelar-gelar tertentu. Penyimbang bumi misalnya, akan menyandang gelar yang dapat melambangkan kedudukannya sebagai penyimbang bumi. Demikian pula keadaannya dengan penyimbang-penyimbang yang lain. Pada masyarakat Lampung

saibatin, penimbang paksi/bumi, menggunakan gelar **pangiran**, **paksi**, dan **sutan**, sedangkan penimbang marga, manyandang gelar **dalom**, penimbang kampung/tiyuh menggunakan gelar **batin** atau **raja**, penimbang suku akan bergelar **batin** atau **radin**. Pandia pakusara akan bergelar **dalom**, kalau ia adalah adik laki-laki dari penimbang paksi/bumi, sedangkan apabila ia adalah adik laki-laki dari penimbang marga akan bergelar **pangiran**.

Di dalam masyarakat Lampung, untuk memanggil seseorang itu tidak menggunakan nama, akan tetapi dipanggil menurut gelar yang disandang olehnya. Misalnya oleh karena ia mempunyai gelar **ratu sesunan**, maka oleh masyarakat akan dipanggil dengan gelar itu.

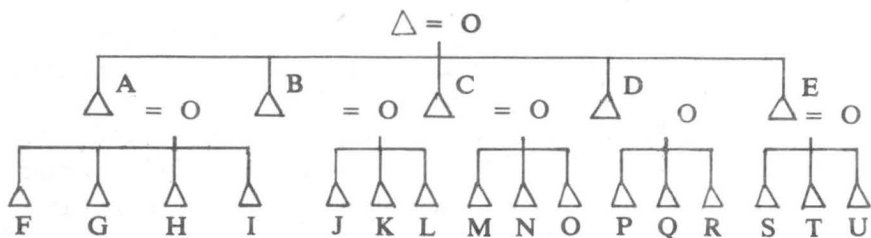
Menguraikan mengenai hak-hak dalam masyarakat dari lapisan tempat seseorang berada adalah suatu hal yang cukup rumit, oleh karena strata yang ada pada masyarakat itu menyangkut kepemimpinan dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, apabila ia sebagai pemimpin, maka sudah tentu terdapat hak-hak dan kewajiban (perannya) dalam masyarakat. Penimbang bumi misalnya, yang merupakan pemangku pepadun awal ia adalah penimbang bagi kebuayan. Sebagai penimbang kebuayan maka hak yang dipunyai antara lain hak atas tanah kawasan yang disebut tanah marga (tanah dengan hak marga).

Apabila ditanyakan, tentang apa hak-hak dari mereka yang merupakan strata bukan penimbang, maka jawabnya adalah bahwa mereka tidak mempunyai hak apa-apa dalam masyarakat terutama dalam hal pengaturan kehidupan dan penghidupan secara umum termasuk tertib adat dalam suatu keluarga besar. Dengan demikian berarti mereka hanya mengabdikan diri kepada penimbangnya karena segala sesuatu pemecahan masalah harus mendapat persetujuan dari penimbang mereka.

Dalam kaitannya dengan strata kepenyimbangan, maka penimbang bumi merupakan pucuk pimpinan masyarakat yang bersangkutan (suatu kebuayan). Dengan demikian ia berkewajiban mengatur tertib adat dalam hukum adat, tertib pemerintahan dan sebagai pengayom dalam kebuayan. Mereka merupakan tempat masyarakat untuk mengeluh, meminta penyelesaian bila ada sengketa, dan sebagainya.

Untuk dapat diperjelas tentang gambaran hak dan kewajiban para penimbang dalam masyarakat, maka di bawah ini di tampilkan schema dari struktur kepenyimbangan.

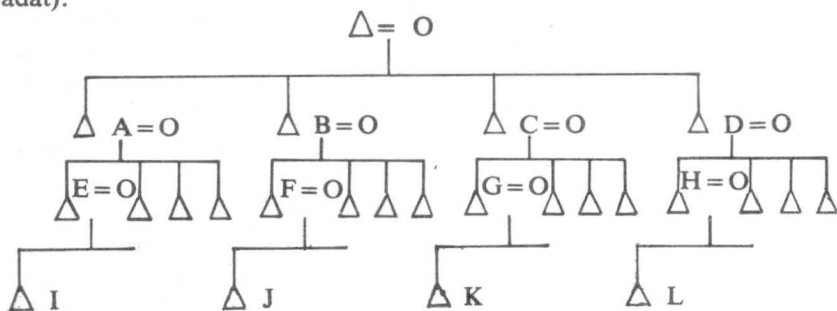
Struktur kepenyimbangan pada masyarakat Lampung pepadun :



Keterangan :

- I. : asal keturunan, seorang nenek moyang yang dianggap sebagai asal keturunan.
 - II. : anak laki-laki tertua (A) merupakan penyimbang bumi, yaitu penyimbang untuk B, C, dan D.
 - III. : Anak laki-laki tertua dari A, adalah penyimbang untuk seluruh buay itu, jadi merupakan penyimbang untuk B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.
- A, adalah penyimbang bumi, B adalah penyimbang ratu, C adalah penyimbang batin, D adalah penyimbang rajo, E adalah penyimbang dalom. F, adalah penyimbang bumi, G, adalah penyimbang ratu dan seterusnya.
- J, adalah penyimbang ratu, K, adalah penyimbang batin, dan seterusnya.
- M adalah penyimbang batin. P adalah penyimbang raja. S adalah penyimbang dalom.

Struktur kepenyimbangan pada masyarakat Lampung Saibatin (struktur kepenyimbangan ini mengikuti struktur pemimpin masyarakat adat).



Keterangan :

- A, adalah penyimbang bumi, B, adalah penyimbang margas, C, adalah penyimbang tiyuh/batin dan D, adalah penyimbang suku.
- E, adalah penyimbang bumi (anak laki-laki tertua dari A), F, adalah penyimbang margas (anak laki-laki tertua dari B), H, adalah penyimbang suku (anak tertua laki-laki dari D). Demikian juga tentang I (anak laki-laki tertua dari E) merupakan penyimbang bumi, J, (anak tertua laki-laki dari G) adalah penyimbang margas. Demikian seterusnya.

Apabila struktur kepenyimbangan di atas ditelaah, maka akan dapat terlihat mengenai peranan mereka dalam masyarakat. Peranan yang terpenting dari lapisan ini, adalah bahwa para anggotanya merupakan pimpinan masyarakat. Sebagai pimpinan masyarakat, mereka akan berbuat banyak untuk itu. Kemashlahatan marga, merupakan tanggung jawab dari mereka sebagai pimpinan. Demikian juga halnya dalam bidang kemasyarakatan lainnya. Pada dasarnya merekalah yang mengatur tentang perkawinan, upacara-upacara keagamaan maupun upacara-upacara dalam rangkaian adat istiadat.

Bagaimanapun banyaknya dan aneka ragamnya lapisan yang ada namun merupakan suatu kenyataan pula bahwa mereka ini hidup dan bermukim dalam suatu wilayah tertentu, yaitu dalam suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu antar lapisan terjalin hubungan dalam bentuk hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, hubungan pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan lainnya. Di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar lapisan.

Pada masyarakat Lampung pepadun, hubungan antara lapisan atas dan lapisan bawah dalam kaitannya sebagai hubungan kekerabatan pada dasarnya relatif kurang, bahkan mungkin tidak ada. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat itu berlaku suatu ketentuan bahwa adanya larangan terhadap perkawinan dengan yang tidak sederajat, sehingga dengan jalan perkawinan (yang tepat) itu maka kelas kelas atau derajat-derajat di dalam dan di luar masyarakat di pertahankan; dengan demikian maka perkawinan itu adalah urusan derajat atau kelas (8 : 188) Perkawinan dengan seseorang yang bukan sederajat, berarti melakukan perbuatan yang tercela. Namun demikian, keadaan di atas tidaklah harus diartikan bahwa tidak ada atau tidak terdapatnya hubungan perkawinan antara lapisan atas dengan lapisan bawah. Oleh karena, walaupun merupakan perbuatan yang tercela namun tentu saja ada mereka-mereka yang melakukannya, dengan konsekuensi akan turunnya derajat dari yang bersangkutan. Misalnya perkawinan antara mereka yang merupakan keturunan penyimbang dengan mereka yang merupakan keturunan beduwo atau taban, maka derajat dari penyimbang itu akan turun.

Berbeda dengan strata tingkat bawah, pada strata tingkat atas sudah terdapat hubungan kekerabatan, oleh karena dalam suatu kebuayan merupakan asal keturunan yang sama. Pada tingkat

atau lapisan bawah, belum tentu terdapat hubungan kekerabatan, oleh karena mereka merupakan golongan pendatang atau orang yang ditawan (**taban**) pada saat melakukan penyerangan dan di jadikan budak. Namun demikian dalam proses selanjutnya, mungkin telah terjadi hubungan perkawinan antara anggota strata bawah, sehingga menimbulkan hubungan kekerabatan.

Di atas telah dikemukakan bahwa merupakan suatu kenyataan bahwa mereka itu hidup dan bermukim dalam suatu wilayah tertentu, mendirikan rumah di sana dan bergaul sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu akan terjalin hubungan ketetanggaaan atau hidup bersama sebagai tetangga. Dalam hubungannya dengan penelaahan hubungan antara lapisan atas dengan lapisan bawah yang hidup sebagai tetangga, dapatlah dinyatakan bahwa hubungan sebagai tetangga itu terjalin dengan baik. Namun pada dasarnya lapisan bawah agaknya mempunyai perasaan segan atau membatasi diri untuk bergaul dengan golongan lapisan atas. Demikian memang hubungan bertetangga itu berjalan dengan baik, namun tidak akrab sifatnya, karena adanya perasaan membatasi diri itu tadi.

Penelaahan hubungan anggota-anggota dalam lapisan atas dengan anggota-anggota dalam lapisan bawah dalam bidang pekerjaan yang sama :

Pada dasarnya masyarakat Lampung, mempunyai pekerjaan yang homogeen, maksudnya bahwa baik strata atas maupun strata bawah mempunyai pekerjaan yang sama, yaitu mereka secara kebanyakan adalah petani. Namun demikian, pekerjaan sebagai petani ini dikelola oleh masing-masing anggota bersama keluarganya. Lapisan atas, dapat melakukan hubungan pekerjaan yang sama itu mengikuti status lapisan yang bersangkutan. Maksudnya, dalam bidang pertanian misalnya, mereka berasal dari lapisan bawah, adalah merupakan majikan-majikannya. Dengan demikian, pelapisan sosial itu terlihat jelas secara tajam di sini.

Penelaahan mengenai hubungan dalam bidang kemasyarakatan lainnya di sini adalah uraian dari bidang-bidang lain dari apa yang telah diuraikan di atas. Misalnya, hubungan dalam bidang pendidikan, dalam upacara-upacara keagamaan dan sebagainya. Dalam bidang keagamaan misalnya, para punyimbang tidak begitu berbeda hak dan kewajibannya dengan anggota masyarakat lainnya, hanya saja mereka mempunyai peranan yang

lebih menentukan, dibandingkan dengan anggota lainnya. Dalam upacara-upacara keagamaan, sudah tentu mereka atau kehadiran mereka akan lebih dihormati dibandingkan dengan anggota masyarakat dari strata bawah. Dalam upacara-upacara adat misalnya dengan perkawinan, golongan dari lapisan atas sudah tentu lebih dihormati. Sebagai contoh dalam kasus upacara **cangget** (cangget orang tua). Apabila terhadap mereka, cara pemanggilannya dan menyebut gelar yang disandangnya itu kurang atau tidak tepat sesuai tata-cara, maka mereka dapat saja tidak memenuhi acara tersebut dan ini akan memberi akibat yang kurang baik terhadap masyarakat itu sendiri.

Perubahan lapisan dalam masyarakat adalah suatu hal yang biasa, melalui perobahan kebudayaan. Hanya saja perubahan-perubahan itu tentulah suatu hal yang bukan serta-merta, akan tetapi melalui suatu proses dalam jangka waktu yang relatif lama. Perubahan itu terjadi karena suatu sebab, dan mengikuti suatu proses yang akan memberikan hasil perubahan. Oleh karena itu disini akan diungkapkan sebab-sebab perubahan, proses perubahan dan hasil perubahan itu sendiri.

Dalam setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang diharganya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat (6 : 253).

Sesuai dengan konstataasi di atas, maka kemungkinan faktor-faktor di atas merupakan sebab-sebab terjadinya perubahan lapisan dalam masyarakat. Sebab-sebab terjadinya perubahan lapisan dalam stratifikasi sosial, artinya sebab-sebab suatu strata berubah pada strata lainnya, adalah pertama oleh karena adanya perubahan dalam struktur kekuasaan. Di dalam uraian mengenai sejarah pertumbuhan pemerintah dari masa kemasa, telah dinyatakan bahwa pada zaman pemerintah Belanda, dibentuk pemerintah tingkat pekon dan tingkat marga. Dengan diadakannya pemerintah berdasarkan atas kebuayan itu, maka hal ini tentu memperkuat pelapisan sosial, khususnya pelapisan sosial atas, oleh karena menjadi tertutup kemungkinan bagi strata (lapisan) bawah untuk menjadi pimpinan. Dengan dihapuskannya pemerintah atas dasar

kebuayan itu, memberi pengaruh terhadap pelapisan sosial, oleh karena semakin banyak orang yang dapat menduduki atau masuk dalam struktur kekuasaan itu, jadi bukan saja oleh golongan atas saja, tetapi juga oleh golongan tingkat bawah. Hal ini sudah tentu memberi pengaruh dalam pelapisan sosial, maksudnya telah terjadi pergeseran keanggotaan dalam pelapisan sosial resmi. Selain dari pada faktor kekuasaan, faktor yang lain adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan turut memberi pengaruh terhadap perubahan pelapisan sosial. Oleh karena kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah semakin terbuka, maka banyak anggota masyarakat yang telah berhasil menamatkan pendidikan formal pada suatu jenjang tertentu. Mereka ini merupakan bahagian dari anggota masyarakat yang memperoleh penghargaan tertentu. Faktor pendidikan ini mempunyai korelasi dengan faktor kekuasaan, khususnya terhadap pemegang kekuasaan. Misalnya di beberapa tempat, Kepala Kampung bukan lagi dipegang penyimbang kampung (**pekong**), akan tetapi telah dipegang oleh orang-orang yang sedikit atau banyak mempunyai latar belakang pendidikan.

Proses terjadinya perubahan tentunya tidak serta-merta, akan tetapi berjalan secara evolusi, karena perkembangan zaman dan kemajuan pendidikan. Di samping itu faktor-faktor yang tumbuh di dalam kelompok para penyimbang itu sendiri, menyebabkan mereka tidak dapat berbuat banyak ditengah-tengah masyarakat. Perpindahan dari daerah asal ke daerah yang baru merupakan salah satu akibat. Ditempat yang baru mereka tidak lagi mempersoalkan kedudukan mereka sebagai penyimbang. Keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, pada dasarnya memperlambat penghayatan terhadap lapisan itu sendiri dari masa kemasa, yang merupakan proses yang mendorong perubahan itu berlangsung.

Titik akhir dari proses yang berjalan itu, tentu akan melahirkan suatu pelapisan sosial baru, yang pada dasarnya tidak lain adalah hasil perubahan itu sendiri. Nyatalah bahwa pelapisan sosial itu telah mengalami pergeseran terutama pada dasar-dasar yang mengakibatkan terjadinya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Penambahan dan perubahan dasar sistem pelapisan sosial, tidaklah terus menggeser dasar yang sudah ada sebelumnya, atau menghapuskannya sama sekali, namun dasar yang sudah ada itu masih tetap juga berlaku, hanya saja tidak demikian kuatnya lagi. Keadaan ini mengakibatkan sistem kemasyarakatan

pada sektor lain (misalnya sistem kekerabatan), turut mengalami perubahan. Pada masa sekarang, perkawinan yang dulunya harus dengan tingkat derajat yang sama, pada masa sekarang ini telah mengalami pergeseran walaupun belum begitu kentara.

Pelapisan sosial samar.

Di muka telah dinyatakan bahwa perbedaan kriteria antara pelapisan sosial samar dan pelapisan sosial resmi, hanya menyolok ditengah masyarakat. Dengan demikian di sini, merupakan sesuatu pelapisan yang tidak begitu menyolok, lagi pula mungkin baru merupakan anggapan yang lahir dalam masyarakat.

Telah tersinggung di muka, bahwa yang melahirkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat adalah sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Dasar pelapisan sosial yang tidak begitu menyolok adalah atas dasar senioritas atau atas tingkat umur seseorang. Selain dari pada atas dasar kekayaan, maupun atas kesalehan dalam agama.

Guna memperoleh gambaran mengenai bentuk pelapisan sosial, maka penguraian dilakukan dengan cara menguraikan struktur tiap lapisan dan uraian dari tiap lapisan yang ada.

Mengenai struktur lapisan, maka di sini masyarakat hanya memandang mereka sebagai sesuatu golongan yang menduduki suatu jenjang tingkat atas. Dari anggapan ini, maka dapat dinyatakan bahwa mereka-mereka yang tidak tergolong dalam jenjang tingkat atas, merupakan anggota dari golongan tingkat rendah. Oleh karena itu ada lapisan atas dan lapisan rendah.

Keanggotaan dari pelapisan atas dasar senioritas :

Masyarakat pada dasarnya tidak tegas membagi para anggotanya atas dasar senioritas ini, namun dari pandangannya terdapat perbedaan. Di sini para anggota masyarakat dibagi atas beberapa lapisan, berdasarkan umur, yaitu : lapisan orang tua atau orang-orang tua, lapisan pengawo, lapisan muda - mudi, dan lapisan anak. Sedangkan atas dasar kekayaan, masyarakat membagi keanggotaan itu menjadi : orang-orang kaya yang tergolong dalam strata tingkat atas, orang-orang yang penghasilannya tergolong menengah, termasuk dalam kelas menengah, dan orang-orang miskin tergolong dalam kelas bawah. Atas dasar kesalehan dalam agama masyarakat membagi keanggotaannya atas dasar pengetahuan agama, serta ibadah yang mereka lakukan. Para anggota masyarakat yang telah menunaikan ibadah Haji, di pandang oleh

masyarakat sebagai anggota masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi sehingga tergolong dalam strata atau lapisan atas dari masyarakat itu.

Tentang peranan dari tiap lapisan dalam masyarakat, akan dikaitkan dengan bentuk dari pelapisan itu. Atas dasar senioritas, sebagaimana telah dipaparkan di atas, dimana masyarakat dibagi dalam beberapa lapisan, yaitu lapisan orang-orang tua, lapisan **penggawo**, lapisan muda mudi atau **muli-meranai** dan lapisan **sanak**. Banyak yang dituntut oleh masyarakat terhadap lapisan orang tua dan penggawo, misalnya mereka dituntut untuk menjaga ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi adat-istiadat dan hukum adat. Sedangkan untuk mereka juga dituntut suri-tauladan untuk masyarakat. Pembagian atas dasar umur, tampak juga dengan jelas dalam hal pengawasan, artinya bahwa lapisan orang tua mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang lebih muda usianya. Sedangkan pada **penggawo** dan **muli-meranai**, mereka dituntut untuk membela martabat orang tua, kerabat dan kampung itu sendiri.

Peranan dalam masyarakat dari lapisan atas dasar kekayaan, adalah kesediaan untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Pada beberapa kampung sampel di dalam masyarakat Lampung **saibatin**, terdapat lapisan yang dianggap oleh masyarakat sebagai lapisan sosial samar atas dasar kekayaan. Mereka ini adalah kelompok **anak ngura** yang berhasil dalam usahanya. Anak ngura ini membentuk kelompok untuk membuka umbulan secara bergantian. Oleh karena itu mereka telah mempunyai kekuatan modal, dan merekalah yang pada umumnya telah menunaikan ibadah Haji dan dari mereka inilah bantuan itu dapat diperoleh. Demikianlah sedikit gambaran dari mereka yang secara anggapan tergolong dalam pelapisan atas dasar kekayaan, yang dapat digolongkan dalam pelapisan sosial samar.

Bagaimana pengaruh lapisan-lapisan sosial samar, khususnya dari lapisan atas terhadap masyarakat, merupakan materi yang akan dipaparkan di sini. Pada umumnya, lapisan atas dari pelapisan sosial samar mempunyai pengaruh di dalam masyarakat. Misalnya, pengaruh dari lapisan atas, dari lapisan atas dasar umur atau senioritas, khususnya dari pelapisan orang tua cukup besar. Oleh karena lapisan ini dapat juga menentukan dalam berbagai bidang kehidupan. Biasanya, para orang tua merupakan tempat

untuk meminta nasehat dalam berbagai persoalan, juga sebagai lapisan yang harus diperhitungkan dalam kerangka pembangunan masyarakat.

Pengaruh dari lapisan, atas dasar kekayaan, pada dasarnya tidaklah begitu besar, kecuali orang-orang kaya tersebut sekaligus menempai kedudukan yang lain. Namun, dalam kerangka atau struktur masyarakat adat, mereka merupakan orang-orang yang dapat meningkatkan jenjang keadatan yang lebih tinggi (**nyetih**), oleh karena satu syarat telah dapat dipenuhi.

Hubungan antar lapisan :

Bagaimana banyaknya dan aneka ragam lapisan yang ada khususnya lapisan sosial yang samar ini, namun dalam kenyataannya mereka hidup dan bermukim dalam satu wilayah tertentu, yaitu dalam suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu antara lapisan mungkin terjalin hubungan, dalam bentuk hubungan kekerabatan, hubungan tetangga dan hubungan kemasyarakatan lainnya. Dibawah ini akan ditinjau bagaimana hubungan itu terjalin.

Jalinan hubungan kekerabatan antara lapisan sosial samar atas dasar umur tidak akan dibicarakan di sini, sehingga yang akan diketengahkan adalah mengenai jalinan hubungan kekerabatan atas dasar ukuran kekayaan. Hubungan kekerabatan yang dimaksud di sini adalah hubungan kekerabatan yang terbit baik karena ikatan darah maupun karena hubungan darah, misalnya karena perkawinan. Jalinan hubungan kekerabatan antara lapisan atas dengan lapisan bawah atas dasar kekayaan, kiranya berjalan dengan baik. Oleh karena, para anggota masyarakat yang tergolong dalam lapisan atas dasar kekayaan, merupakan tempat bagi keluarga atau sanak pamili untuk meminta bantuan materiel. Apalagai kalau anggota lapisan atas itu adalah **anak sulung** laki-laki, maka ia merupakan tumpuan keluarganya sendiri, paman-pamannya, dan lain-lain dalam hubungan kekerabatan itu. Di sini tempat orang tuanya atau adik-adiknya bernaung. Dari keadaan di atas, dapat diketahui bahwa adanya lapisan ini cukup memberi pengaruh di dalam pembinaan hubungan kekerabatan antar lapisan.

Pemukiman masyarakat pada dasarnya tidaklah mengelompok terpisah atas dasar lapisan yang ada, maksudnya lapisan atas tidaklah mendirikan wilayah sendiri sebagai tempat bermukimnya. Anggota-anggota dari lapisan atas yang jumlahnya relatif lebih kecil, hidup membaaur dengan lapisan lainnya. Oleh karena

itu anggota lapisan atas dan bawah akan hidup sebagai tetangga. Hidup sebagai tetangga berarti hidup berdampingan dengan orang lain. Jalinan hubungan antara anggota lapisan atas dan lapisan bawah (atas dasar kekayaan), pada umumnya berjalan dengan baik. Hanya saja sebagaimana telah dinyatakan bahwa adanya perasaan segan yang membatasi diri lapisan bawah untuk bergaul dengan lapisan atas.

Setiap masyarakat, pasti akan mengalami perubahan, dan perubahan itu akan menyentuh pula mengenai sistem pelapisan dalam masyarakat. Terjadinya perubahan-perubahan itu sudah tentu mempunyai sebab. Oleh karena itu di sini perlu ditelaah mengenai sebab-sebab terjadinya perubahan pelapisan. Dimana perubahan itu sendiri merupakan suatu proses dan perubahan itu sendiri akan menghasilkan sesuatu. Dengan demikian perlu pula ditelaah mengenai proses perubahan dan hasil perubahan.

Dalam tiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang diharapkannya. Barang sesuatu itu akan menjadi bibit untuk dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Barang sesuatu yang dihargai dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat (6 : 253). Sesuai dengan konstataasi di atas, maka kemungkinan faktor-faktor di atas merupakan pula sebab terjadinya perubahan dalam stratifikasi sosial. Faktor yang utama yang mendorong terjadinya perubahan dalam pelapisan sosial samar, kelihatannya adalah faktor pendidikan. Selain dari faktor pendidikan, faktor agama pada dasarnya sedikit atau banyak akan memberi pengaruh dalam masyarakat. Dengan demikian, pengaruh ini juga menyentuh sistem pelapisan sosial samar.

Penghayatan terhadap pelapisan yang ada, dalam masa atau kurun yang relatif agak lama, khususnya terhadap pelapisan sosial atas dasar umur senioritas agak mengalami kemunduran oleh karena, yang tadinya menjadi pemegang peranan (misalnya lapisan orang-orang tua), telah terlihat pergeseran peranan, yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam penghayatan terhadap lapisan itu.

Walaupun telah terjadi perubahan dalam penghayatan, namun ini tidak berarti bahwa pembagian yang ada terus berhenti dan berganti dengan yang baru, tetapi keadaan di atas hanyalah

sekedar pelonggaran dari peranan yang dipegang oleh lapisan atas itu. Dari sebab-sebab yang lain (pendidikan dan agama), pada dasarnya menimbulkan dasar-dasar baru untuk terbentuknya sistem pelapisan sosial, yaitu dimana mereka mempunyai pendidikan tertentu dipandang oleh masyarakat sebagai golongan yang termasuk lapisan atas, dan mereka yang tidak mempunyai pendidikan tertentu mengklasifikasikan dirinya sebagai tidak sama dengan mereka. Demikian juga halnya dengan agama, pada dasarnya telah meletakkan dasar baru bagi pembentukan pelapisan sosial samar ini

PELAPISAN SOSIAL MASA KINI

Sebagaimana telah dinyatakan pada uraian di muka bahwa pelapisan sosial itu akan ada pada setiap zaman, yang mencakup masa lalu dan masa kini. Oleh karena pelapisan sosial masa lalu telah diuraikan tadi, maka di sini akan dibahas mengenai pelapisan sosial masa kini, uraian mana mencakup pelapisan sosial resmi dan pelapisan sosial samar.

Pelapisan sosial resmi :

Seperti halnya kriteria yang digunakan pada pelapisan resmi masa lalu, maka kriteria untuk menyatakan pelapisan sosial resmi pada pelapisan sosial masa kini adalah sama dengan kriteria yang digunakan pada pelapisan sosial masa lalu.

Pelapisan sosial yang kelihatannya menyolok di dalam masyarakat Lampung pada masa kini, baik pada masyarakat Lampung yang **beradat pepadun** maupun pada masyarakat Lampung yang menganut **adat saibatin**, adalah atas dasar kekuasaan. Selain atas dasar ini, dasar-dasar pelapisan sosial pada masa lalu, merupakan dasar pelapisan sosial pada masa kini, yaitu dasar keturunan.

Dua hal yang menjadi materi pembahasan disini, yaitu mengenai struktur pelapisan strata uraian dari tiap lapisan, yang mencakup keanggotaan, atribut-atribut, gelar-gelar yang disandang oleh anggota lapisan, hak-hak dalam masyarakat, kewajiban dalam masyarakat dan peranan dalam masyarakat.

Pada dasarnya, masyarakat hanya mengembangkan dua strata dari setiap lapisan sosial itu. Misalnya struktur lapisan atas dasar kekuasaan, masyarakat Lampung hanya membedakan dua strata saja yaitu strata pimpinan resmi (yang memangku kekuasaan) dan yang dipimpin. Pimpinan resmi merupakan strata

(lapisan) atas, sedangkan yang dipimpin merupakan strata (lapisan) bawah. Demikian pula halnya dengan pelapisan sosial atas dasar keturunan, nampaknya masyarakat hanya membedakan dalam dua strata saja, yaitu strata (lapisan) atas dan strata (atau lapisan) bawah.

Uraian tiap lapisan. Keanggotaan dari pelapisan sosial resmi atas dasar keturunan. Sebagaimana telah diungkapkan pada pelapisan sosial masa lalu, maka disini keanggotaan dari pelapisan sosial masa kini adalah sama dengannya. Artinya bahwa mereka yang termasuk dalam golongan lapisan bagian atas adalah para penyimbang, sedangkan yang termasuk dalam lapisan bagian bawah adalah mereka yang bukan golongan penyimbang.

Sekedar untuk memberikan gambaran kembali, maka disini dijabarkan lagi tentang struktur penyimbang yang ada dalam masyarakat, yaitu : pada masyarakat Lampung Pepadun.

1. Penyimbang bumi,
2. Penyimbang ratu,
3. Penyimbang batin,
4. Penyimbang rajo.

Sedangkan mereka yang tidak tergolong penyimbang adalah mereka yang merupakan keturunan dari :

1. Lampung jajar,
2. Beduo,
3. Lambang,
4. Gundik,
5. Taban.

Struktur kepenyimbangan pada masyarakat Lampung Saibatin, adalah sebagai berikut :

1. Penyimbang paksi/bumi,
2. Penyimbang marga,
3. Penyimbang tiyuh,
4. Penyimbang suku,
5. Pandai pakusara.

Sedangkan yang bukan tergolong dalam lapisan penyimbang adalah :

1. Anak tumpang,
2. Beduo.

Selain dari pada pelapisan sosial atas dasar keturunan sebagaimana ditampilkan di atas, terdapat lapisan sosial lain, atas dasar keturunan. Yang dimaksud di sini adalah strata karena kelahiran. Anak laki-laki yang lahir lebih dulu (anak sulung) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, bila dibandingkan dengan anak laki-laki yang lahir setelah anak sulung itu. Meskipun keadaan ini tidak membagi anggotanya menjadi lapisan atas dan lapisan bawah, akan tetapi lapisan anak ini sangat menonjol di dalam masyarakat. Anak yang lahir setelah sulung (semuanya bila laki-laki) disebut **anak-ngura**.

Pada pelapisan sosial resmi masa lalu telah dijabarkan bahwa pemerintahan, baik pemerintah dalam pekon maupun pemerintah dalam marga, pada dasarnya di pegang oleh para punyimbang. Pada saat ini, keadaan itu telah tidak berlaku lagi, sehingga atas dasar kekuasaan pemegang pemerintahan sekarang ini dapat di golongkan suatu golongan yang menempati lapisan atas.

Pada masyarakat lampung pepadun, dalam pergaulan sehari-hari sudah tidak dapat diketahui lagi, karena tidak lagi mengenakan atribut seperti pada masa lalu. Atribut-atribut yang dapat membedakan antara lapisan atas dan lapisan bawah, dapat terlihat pada saat dilakukan gawi adat. Misalnyan dalam hal pakaian yang dikenakan oleh golongan yang termasuk lapisan atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk bujang :
 - a. memakai **bidak sebagi**
 - b. tidak mengenakan kemeja.
 - c. mengenakan **punduk**, yaitu keris yang diselipkan atau di pegang.
 - d. mengenakan kopiah emas.
2. Untuk pengawo :
 - a. mengenakan pakaian bidak becukil (tenunan Lampung) dengan benang emas.
 - b. tidak mengenakan kemeja
 - c. memakai **punduk**
 - d. mengenakan kopiah emas.
3. Untuk Sutan :
 - a. memakai model pakaian orang tua dengan potongan seperti jubah.
 - b. mengenakan ikat kepala warna putih
 - c. memakai punduk.

Selain dari atribut-atribut di atas, dalam hal sistem kemasyarakatan, khususnya dalam sistem kekerabatan dalam hal perkawinan diperlukan **uang jujur**, dengan mengikuti status yang telah ditentukan.

Besarnya uang jujur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Penyimbang bumi asal, penyimbang bumi biasa, penyimbang bumi nyetih dan penyimbang ratu asal, harga jujurnya kalau terhadap luar marga, berjenjang 2400; akan tetapi apabila terhadap dalam marga, berjenjang 1200
2. Penyimbang bumi nyetih, berjenjang 1600
3. Penyimbang ratu nyetih, berjenjang 1200
4. Penyimbang batin, berjenjang 800
5. Penyimbang rajo, berjenjang 400.

Sedangkan untuk golongan bukan penyimbang, berlaku sebagai berikut :

6. Lampung jajar, harga jujurnya berjenjang 200
7. Sebah, harga jujurnya 160
8. Beduo, harga jujurnya 120
9. Lambang, harga jujurnya 80
10. Gundik, harga jujurnya 40
11. Taban, harga jujurnya segantang beras, seekor ayam jantan dan sebuah kelapa yang bertunas.

Pada masyarakat Lampung pepadun dan juga pada masyarakat Lampung saibatin, para penyimbang juga mempunyai atribut-atribut payung yang digunakan oleh para penyimbang pada Masyarakat Lampung saibatin. Apabila ia adalah penyimbang bumi/paksi, maka atribut payung adalah **payung gubir**, dengan masing-masing payung berwarna tiga macam, yaitu putih, kuning dan hitam. Sedangkan apabila ia adalah penyimbang marga, maka payung yang di gunakan adalah hanya payung warna kuning saja.

Pada lapisan atas, atas dasar kekuasaan kiranya tidak terdapat banyak atributnya, selain dari pakaian dinas yang telah di tentukan oleh pemerintah atasan. Demikian juga halnya dengan pelapisan atas dasar keturunan yang membagi lapisan atas **anak sulung** dan **anak ngura**.

Pada masyarakat Lampung, baik Lampung pepadun, mau-

pun Lampung saibatin, lapisan penyanggah akan menyandang gelar-gelar tertentu, yang dapat melambangkan kedudukannya sebagai penyanggah. Sebagai contoh, pada masyarakat Lampung Saibatin, penyanggah bumi/paksi, menggunakan gelar **pengeran**, **paksi** dan **sutan**; sedangkan penyanggah marga, menyandang gelar **batin** atau **raja**. Penyanggah suku akan bergelar **batin** atau **radin**. **Pandi pakusara** akan menyandang gelar **dalom**, kalau ia adalah adik laki-laki dari penyanggah paksi/bumi, sedangkan apabila ia adalah adik laki-laki dari penyanggah marga akan bergelar **pengeran**

Sedang pada lapisan atas dasar keturunan yang membagi lapisan **anak sulung** dan **anak ngura**, mempunyai gelar tertentu pula. Gelar-gelar ini biasanya diberikan pada saat masih kecil, yaitu pada saat upacara atau gawi untuk cukuran. Anak sulung, akan menyandang gelar yang sesuai dengan kedudukan orang tuanya. Jadi apabila orang tuanya adalah penyanggah marga, maka secara otomatis anak sulung itu pun adalah penyanggah marga juga jadi, menyandang gelar-gelar sebagaimana tersebut di atas. Apabila ia bukan anak sulung, maka mungkin gelar yang dipakai adalah **pengeran** karena ia adalah adik dari penyanggah marga.

Masyarakat Lampung, dalam pergaulan hidup sehari-hari lebih banyak menggunakan gelar-gelar itu dari pada menggunakan nama yang telah diberikan sejak lahir. Misalnya dalam mengundang seseorang, maka dalam undangan yang dicantumkan adalah kepala kampung. Hak-hak dalam masyarakat dari lapisan atas gelarnya. Pada lapisan sosial atas dasar kekuasaan, gelar-gelar yang demikian itu tidak diperoleh. Masyarakat hanya menyebutnya sebagai pak **kepalo**, apabila ia adalah kepala kampung. Hak-hak dalam masyarakat dari lapisan atas berdasarkan keturunan adalah sebagai berikut : Hak-hak dari lapisan atas, yaitu lapisan penyanggah. Walaupun secara resmi pemerintahan menurut sistem kebudayaan telah dihapuskan, namun karena struktur masyarakat Lampung yang merupakan masyarakat bertingkat geneologis, maka kepala-kepala masyarakat masih tetap berfungsi sebagaimana biasa, kecuali dalam fungsinya sebagai orang pemerintahan (resmi). Dengan demikian, mereka ini adalah pimpinan masyarakat. Sebagai pimpinan, sudah tentu mempunyai hak-hak tertentu. Misalnya pada upacara-upacara adat, maka penghulu-penghulu masyarakat itu mendapat hak mendahului,

berupa : urutan-urutan duduknya, macam-macam perkakas tempat hidangan yang diedarkan, serta mereka didahulukan dan dihormati. Selain dari pada itu, mereka mempunyai hak atas tanah kawasan yang disebut tanah marga.

Dalam hal lapisan anak sulung dan anak ngura, maka Anak sulung adalah pemegang warisan dari keluarga, termasuk warisan keadatan.

Apabila mereka atau lapisan atas, atas dasar keturunan mempunyai hak-hak dalam masyarakat, sudah tentu pula mempunyai kewajiban-kewajiban. Sebagai pimpinan masyarakat secara adat, mereka lebih banyak mempunyai kewajiban dari pada haknya. Kewajiban-kewajiban tersebut, misalnya adalah menyelesaikan persengketaan yang timbul dalam masyarakat itu. Juga mereka berkewajiban untuk mengatur tertib adat dan Hukum adat.

Anak sulung, yang merupakan waris, mempunyai kewajiban baik terhadap orang tuanya, adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan, juga untuk kampung (**balu bemekon**).

Dengan menelaah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah diuraikan di atas, sebenarnya telah dapat dilihat bagaimana peranan dari lapisan atas di dalam masyarakat.

Secara singkat, lapisan atas adalah orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat, minimal tokoh masyarakat pada bidang yang dikelolanya. Sebagai tokoh masyarakat, mereka adalah tempat untuk bertanya, tempat meminta nasehat dalam berbagai aspek kehidupan.

Betapapun banyaknya dan aneka ragamnya lapisan yang ada, namun merupakan suatu kenyataan pula bahwa mereka hidup dan bermukim dalam suatu wilayah tertentu, yaitu dalam suatu komunitas. Oleh karena itu antara lapisan terjalin hubungan dimana hubungan yang terjalin itu dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan, hubungan tetangga, hubungan pekerjaan dan hubungan kemasyarakatan lainnya. Di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar lapisan itu.

Jalanan hubungan kekerabatan antara lapisan atas dan lapisan bawah, atas dasar keturunan khususnya dalam lapisan penyimbang dan lapisan bukan penyimbang, berjalan dengan baik. Sebabnya adalah para penyimbang itulah yang merupakan pengayom masyarakat, termasuk pengayom dalam keluarganya masing-masing. Apabila kerabat melakukan atau membuat hajat, maka pada dasarnya yang mengurus hajatan itu adalah

penyimbang itu juga.

Mengenai jalinan hubungan kekerabatan antara anak sulung dengan anak ngura, pada dasarnya dapat dijelaskan demikian. Telah dinyatakan di atas bahwa anak sulung laki-laki adalah pengayom keluarga. Mereka mempunyai tanggung-jawab terhadap orang tua, adik-adik, termasuk yang sudah berkeluarga, baik perempuan maupun laki-laki, serta kerabat ibu dan kerabat ayah. Jadi, apabila dikaji secara mendalam, maka akan terlihat bahwa dalam pembinaan hubungan kekeluargaan, anak sulung sangat berpengaruh sekali. Kesatuan dan kekompakan keluarga, dapat terbina melalui pengaturan dari anak sulung ini.

Jalinan hubungan tetangga antara lapisan atas dan lapisan bawah yang akan dibahas di sini hanyalah atas dasar keturunan yang menimbulkan lapisan atas penyimbang dan lapisan bawah bukan penyimbang. Telah berulang dikatakan bahwa jalinan hubungan ketetangaan ini berjalan dengan baik. Mereka saling membantu bila tetangga ditimpa kemalangan. Akan tetapi walaupun jalinan hubungan itu berjalan dengan baik, namun pada mereka yang tergolong dalam lapisan bawah yakni bukan penyimbang sudah tentu mempunyai perasaan segan terhadap mereka yang tergolong dalam lapisan atas. Perasaan ini timbul karena penghormatan masyarakat terhadap mereka.

Jalinan hubungan pekerjaan antara lapisan atas dan lapisan bawah yang akan dibicarakan disini, juga hanya menyangkut lapisan penyimbang dan bukan penyimbang. Jalinan hubungan pekerjaan ini akan dilihat dalam suatu konteks pekerjaan yang sama. Kedudukan lapisan bawah hanya akan melakukan suatu pekerjaan atas dasar perintah, jadi tugasnya hanya merupakan pekerjaan semata, atau melakukan suatu pekerjaan atas petunjuk lapisan atas.

Selain bidang-bidang di atas, maka pada bidang-bidang yang lain, misalnya pada bidang kegiatan upacara-upacara terutama dalam upacara adat, terlihat jalinan hubungan dimana perbedaan lapisan jelas kelihatan. Penyimbang-penyimbang yang juga sebagai pemangku adat, jelas mempunyai hak yang lebih tinggi. Mereka adalah peserta dari Upacara **Merwatin** dan kehadiran mereka dalam acara ini sangat menentukan. Apabila pucuk-pucuk pimpinan/penyimbang tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka upacara **merwatin** ini tidak akan berjalan. Di dalam bidang perkawinan, terlihat perbedaan yang jelas antara kedua

lapisan itu. Jumlah uang jujur atau uang kematin dimana aturan itu ada, buat muda mudi dari kelas penghulu adalah lebih tinggi dari pada buat anak-anak perempuan kebanyakan, malahan mereka ini dilarang untuk meminta uang jujur yang terlalu tinggi (8 : 38). Hal tersebut di atas menyebabkan dalam hubungan kemasyarakatan lainnya khususnya dalam bidang-bidang tertentu terlihat adanya pengaruh yang cukup besar dari pelapisan sosial itu. Oleh karena pada uraian di sini merupakan uraian yang menyangkut pelapisan sosial masa kini maka gambaran tentang perubahan pelapisan ini hanyalah merupakan suatu kecenderungan kepada hal yang mungkin akan terjadi. Perubahan pelapisan sosial resmi mungkin akan terdapat pada pelapisan sosial atas dasar keturunan, dan juga pada pelapisan sosial atas dasar kekuasaan.

Diduga yang merupakan penyebab dari perubahan pelapisan sosial ini adalah kemajuan dunia pendidikan, kemajuan zaman, serta pengaruh dari kelancaran arus komunikasi.

Proses perubahan ini mungkin akan berjalan secara evolusi, artinya bahwa perubahan yang terjadi itu tidak bersifat serta-merta. Perubahan pelapisan sosial pada pelapisan atas dasar kekuasaan misalnya, dapat terjadi karena dibentuknya lembaga-lembaga baru pada tingkat komunitas kecil. Penambahan lembaga, misalnya Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD), akan menjadi dasar pembentukan pelapisan baru dalam masyarakat. Kemajuan dunia pendidikan mendorong proses terjadinya perubahan pelapisan sosial pula. Kemungkinan, akan lebih banyak lembaga-lembaga yang dipegang oleh golongan terpelajar pada masa yang akan datang, akan dapat mengakibatkan orang-orang tertentu turun menjadi (perubahan yang menurun) anggota lapisan bawah, atau orang-orang tertentu akan naik (perubahan yang menaik) menjadi anggota lapisan atas.

Penghayatan terhadap pelapisan sosial pada sektor-sektor tertentu akan menjadi melemah. Salah satu contoh yang diberikan oleh responden adalah melemahnya larangan untuk melakukan perkawinan dengan mereka yang sederajat. Sebagai akibat dari kelancaran arus komunikasi, akan lebih menambah pendatang-pendatang baru, sehingga pemukiman akan membaaur. Pembauran pemukiman itu dapat saja mengakibatkan terjadinya perkawinan campuran antara suku bangsa. Hal ini sudah tentu akan lebih melemahkan perbedaan antara lapisan, khususnya lapisan sosial atas dasar keturunan.

Adanya sebab-sebab yang dapat menumbuhkan perubahan dalam masyarakat, sudah tentu memberi akibat. Akibat ini adalah titik akhir dari proses yang berjalan itu. Sebagai hipotesa dari kecenderungan-kecenderungan di atas, maka pelapisan sosial atas dasar keturunan, mungkin akan mengalami pergeseran yang dimaksud di atas, misalnya melemahnya pengakuan terhadap **anak sulung** laki-laki sebagai pemegang kewarisan. Pada masa sekarang telah terlihat kecenderungan untuk membagi harta sebelum pewaris meninggal dunia. Juga dengan melemahnya penghayatan masyarakat terhadap lapisan atas dasar keturunan, akan dapat memudahkan lapisan-lapisan itu dalam masyarakat.

Sebagai hasil dari sebab pendidikan, kelancaran arus komunikasi dan kemajuan teknologi, akan lebih banyak mengakibatkan turunnya seseorang dari lapisan-lapisan tertentu atau naiknya seseorang pada lapisan-lapisan tertentu pula.

Pelapisan sosial samar :

Pada uraian mengenai pelapisan sosial samar pada masa lalu khususnya pada uraian mengenai hasil perubahan, telah dinyatakan bahwa dasar-dasar pelapisan sosial telah mengalami perubahan. Dengan demikian, pada masa kini dasar-dasar lapisan itu telah lebih lebih banyak dari pada masa yang lalu. Dasar pelapisan sosial samar pada masa kini adalah : senioritas, kekayaan, keahlian dalam agama, dan pendidikan.

Penguraian mengenai bentuk pelapisan sosial samar pada masa kini dilakukan dengan cara menelaah segi struktur lapisan dan menguraikan tiap lapisan yang telah ada itu. Mengenai struktur lapisan, atas dasar senioritas, masyarakat menggolongkan anggota masyarakat kedalam empat bentuk lapisan, yaitu lapisan orang-orang tua, lapisan pengawo, lapisan **muli-meranai**, dan lapisan sanak-sanak (anak-anak). Sedangkan atas dasar kekayaan, nampaknya bahwa masyarakat menggolongkan pada tiga lapisan, yaitu lapisan orang-orang kaya yang merupakan lapisan atas, lapisan orang-orang yang penghidupannya berkecukupan sebagai lapisan menengah, dan lapisan orang-orang miskin sebagai lapisan bawah.

Demikian pula nampaknya pada pelapisan sosial atas dasar agama. Masyarakat hanya mengatakan bahwa mereka yang tergolong para ulama, merupakan anggota masyarakat yang termasuk dalam lapisan atas.

Dari pernyataan masyarakat ini, dapat diambil kesimpulan bahwa mereka yang tidak tergolong para ulama, merupakan anggota masyarakat yang termasuk dalam lapisan bawah. Masyarakat juga memandang bahwa orang-orang terpelajar mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.

Dari uraian pada struktur pelapisan pada dasarnya telah dapat diketahui siapa-siapa yang menjadi anggota dari tiap lapisan. Seperti halnya pelapisan atas dasar senioritas (tingkat umur), keanggotaannya adalah para orang-orang tua, sebagai lapisan yang pertama, sedangkan pada lapisan yang kedua adalah para **pengawo**, yaitu mereka yang telah beristri (suami-suami), sedangkan lapisan **muli meranai** adalah mereka yang belum berkeluarga, dan para remaja. Anggota dari lapisan sanak (anak-anak) adalah mereka yang masih tergolong dalam kedudukan itu.

Keanggotaan dari pelapisan sosial atas kekayaan, diperoleh dengan melihat penghasilan serta kekayaan yang dimiliki seseorang seperti : rumah yang baik, mobil, dan sebagainya. Mereka yang mempunyai penghasilan yang tinggi diklasifikasikan sebagai orang yang kaya dan menempati kedudukan yang tinggi, sedangkan anggota masyarakat yang berpenghasilan sedang, diklasifikasikan dalam golongan yang termasuk dalam lapisan menengah dan mereka yang kelihatan tidak mempunya, merupakan golongan yang termasuk lapisan bawah. Keanggotaan pelapisan sosial atas dasar agama, pada dasarnya mereka itu adalah tokoh-tokoh agama (para ulama) dan mereka yang telah menunaikan ibadah haji. Sedangkan dalam pelapisan sosial atas dasar pendidikan, guru merupakan anggota lapisan atas.

Pada dasarnya lapisan bawah tidak mempunyai banyak peranan di dalam masyarakat, atau apabila ada maka peranan itu relatif kecil. Sedangkan lapisan atas mempunyai cukup peranan yang berarti di dalam masyarakat. Peranan tersebut sudah tentu berkaitan dengan kedudukannya, sebagai orang kaya, terpelajar dan ulama itu. Sebagai golongan yang termasuk lapisan ini oleh masyarakat dianggap sebagai tokoh dari masyarakat yang bersangkutan.

Pada dasarnya lapisan atas dari pelapisan sosial yang ada di dalam masyarakat mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Besar atau kecilnya pengaruh itu sangat tergantung pada penilaian masyarakat. Mereka yang termasuk lapisan atas dari pelapisan sosial atas dasar kekayaan, kadang-kadang merupakan tokoh

yang dapat atau turut menentukan warna dari berbagai aspek tertentu dalam masyarakat. Dalam kegiatan pembangunan sekolah misalnya, mereka sering ditunjuk sebagai pengelola atau setidaknya tidaknya ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa mereka merupakan orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Demikian juga terhadap mereka yang termasuk dalam golongan terpelajar. Mendirikan sekolah, oleh masyarakat dipercayakan kepada golongan-golongan ini. Dengan demikian mereka mempunyai tanggung jawab untuk mendidik masyarakat. Demikian pula halnya dalam kegiatan lainnya; yang sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian mengenai pemerintahan dalam komunitas kecil, bahwa penokohan sebagai pimpinan didasar atas kecukupan pengetahuan yang dimiliki. Ini juga merupakan petunjuk bahwa hasil pendidikan yang melahirkan pelapisan samar tadi, mempunyai pengaruh dalam masyarakat.

Dalam suatu komunitas, apalagi dalam komunitas kecil, para anggota masyarakatnya mempunyai hubungan kekerabatan baik yang timbul karena perkawinan maupun karena ikatan darah. Namun tidak dapat disangkal bahwa di antara mereka dalam hubungan dengan pelapisan sosial terbagi dalam lapisan-lapisan tertentu. Ada anggota kerabat yang tergolong kaya sehingga menempati lapisan atas, dan ada juga tergolong dalam lapisan bawah.

Namun demikian pelapisan sosial demikian itu, dalam hubungan kekerabatan, tidak memberi pengaruh yang begitu kuat, sebabnya bahwa di antara mereka itu saling tolong menolong, bantu membantu masih berjalan dengan baik. Bila kerabat ditimpa kemalangan, maka yang mengurusnya adalah kerabat itu juga. Bila ada keperluan tertentu maka kerabat yang tergolong lapisan atas baik karena kekayaan maupun karena kepandaian, merupakan tempat untuk meminta tolong. Secara sepintas, bila ada kerabat yang tergolong dalam lapisan atas, maka sering merupakan sumber kebanggaan. Karena itu pula hubungan bertetangga di antara mereka berjalan baik. Mereka saling mengetahui siapa yang tinggal sebagai tetangga. Dari gambaran tentang letak perumahan yang ada pada masyarakat di sana, yaitu dimana rumah itu saling berdekatan yang seolah-olah tidak mempunyai batas karena tidak ada pagar untuk samping kiri maupun kanan rumah, melambangkan kerukunan hubungan tetangga di dalam masyarakat.

Namun demikian dari lapisan bawah ada rasa segan dan rasa hormat terhadap lapisan atas, merupakan faktor pembatasan dalam melakukan hubungan tetangga.

Telah secara berulang dinyatakan bahwa setiap masyarakat secara pasti akan mengalami perubahan. Perubahan mana akan menyangkut pula mengenai pelapisan sosial ini. Oleh karena uraian di sini merupakan uraian mengenai pelapisan sosial samar pada masa kini, maka gambaran di bawah ini hanyalah merupakan sesuatu kecenderungan-kecenderungan yang mungkin akan terjadi. Perubahan sosial samar kelihatannya akan mencakup keseluruhan pelapisan yang telah dibicarakan tadi.

Kemungkinan bahwa yang merupakan penyebab dari perubahan pelapisan sosial samar ini adalah kemajuan zaman, baik karena kemajuan dunia pendidikan maupun kelancaran arus komunikasi.

Akibat kemajuan dunia pendidikan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah semakin terbuka, maka akan semakin banyak pula anggota masyarakat yang akan dapat memperoleh pendidikan. Dengan semakin banyak anggota masyarakat yang akan dapat menamatkan pendidikan pada jenjang tertentu, akan berakibat terjadinya pergeseran kedudukan. Kecenderungan untuk bertambahnya anggota populasi pada lapisan atas adalah mungkin, atau juga akan menurunkan kedudukan seseorang dari lapisan tertentu. Kelancaran arus komunikasi, terutama dengan adanya sarana perhubungan yang semakin baik, memberi peluang untuk melakukan mobilitas. Mobilitas ini di samping kemungkinan akan mengurangi keanggotaan suatu lapisan tertentu, dilain pihak akan menambah pengalaman-pengalaman dan pengetahuan kebudayaan setiap anggota masyarakat. Kenyataan ini tentu akan merubah pula pandangan serta pola tingkah laku mereka. Khususnya sehubungan dengan pelapisan sosial yang ada.

BAB V

PIMPINAN MASYARAKAT

GAMBARAN UMUM

Pimpinan masyarakat adalah salah satu unsur dalam komunitas kecil. Komunitas kecil hanya dapat diamati dan dihayati secara bulat, jika unsur ini turut diungkapkan. Dalam gambaran umum ini diuraikan hal-hal yang menyangkut tentang pimpinan tradisional dan pimpinan masa kini.

Pimpinan tradisional :

Uraian mengenai pimpinan tradisional akan mencakup pimpinan formal dan pimpinan informal, yang masing-masing akan mencakup bentuk, sifat, peranan dan pengaruh masing-masing pimpinan itu dalam masyarakat.

Bentuk dari pimpinan tradisional formal, adalah pimpinan keadaan yang disebut *punyimbang*. Sedangkan mengenai sifatnya adalah merupakan pengayom masyarakat dan sebagai pola anutan dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagai pengayom dan pola anutan dari masyarakat, maka ia mempunyai peranan yang besar dalam masyarakat itu, ia merupakan penguasa dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagai penguasa masyarakat sudah tentu mempunyai pengaruh. Pengaruh dari pada pimpinan formal yang demikian itu, sudah tentu cukup besar sekali.

Bentuk dari pimpinan tradisional informal, adalah tokoh-tokoh masyarakat lainnya, seperti misalnya para alim ulama, dan lain-lain. Sifat dari kepemimpinannya adalah sebagai tokoh, maka ia merupakan suatu figur.

Pimpinan masa kini :

Uraian mengenai pimpinan masa kini, juga akan mencakup pimpinan formal dan pimpinan informal, dan dari masing-masingnya akan diuraikan pula mengenai bentuk, sifat dan pengaruh dalam masyarakat.

Bentuk dari pimpinan formal masa kini adalah kepala kampung/anek/tiyuh, kepala suku, serta aparat lainnya, misalnya carik kampung. Sifat dari kepemimpinannya adalah sebagai pe-

laksana dari program pemerintah. Sedangkan peranan dari pimpinan formal masa kini adalah sebagai tempat untuk urusan administrasi dan penyelesaian persengketaan di luar adat.

Pengaruh dari pimpinan formal ini dalam masyarakat, kiranya cukup besar walaupun pada umumnya lebih kecil dari pimpinan formal tradisional.

Bentuk dari pimpinan informal masa kini, adalah pimpinan formal tradisional yaitu para penyumbang dan tokoh-tokoh masyarakat lain di luar itu, seperti alim ulama. Sedangkan pada masyarakat Lampung beradat saibatin, pimpinan organisasi juga merupakan pimpinan informal masa kini.

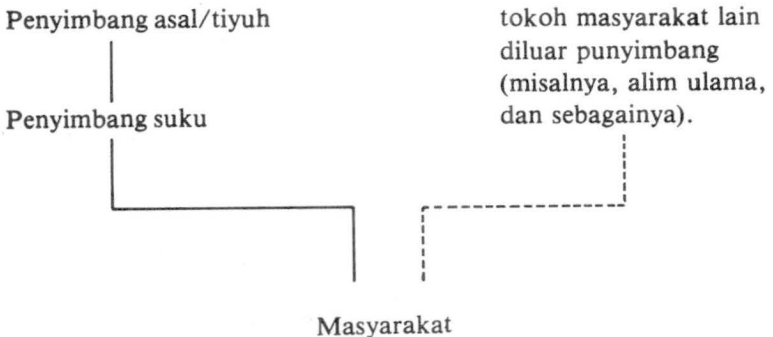
Sifat dari pada pimpinan informal masa kini, adalah sebagai berikut :

Pimpinan ini yang merupakan pimpinan formal tradisional masa lalu, merupakan sebagai pengayom masyarakat dan sebagai pola anutan dari masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pimpinan informal lainnya yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat, merupakan figur yang berperan dalam masyarakat.

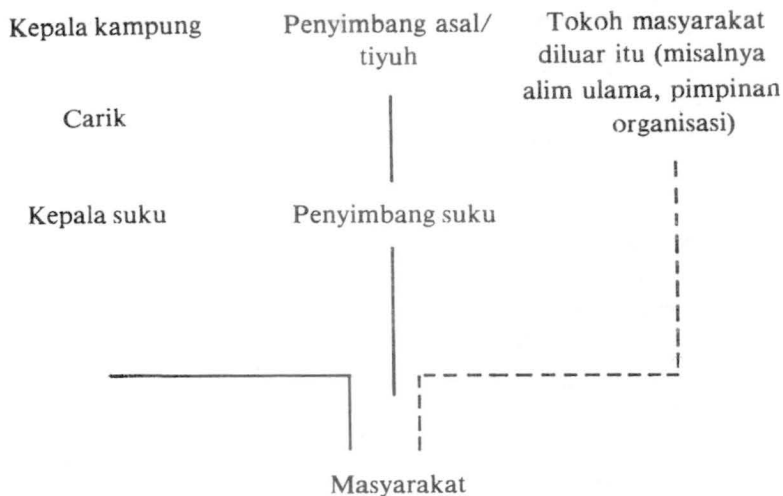
Struktur pimpinan :

Uraian mengenai struktur di sini, akan melukiskan susunan dari pimpinan yang telah disebut di atas, yaitu mengenai pimpinan tradisional, baik formal maupun informal serta pimpinan masa kini.

Struktur dari pada pimpinan tradisional baik formal maupun informal dalam suatu anek/pekon, adalah sebagai berikut :



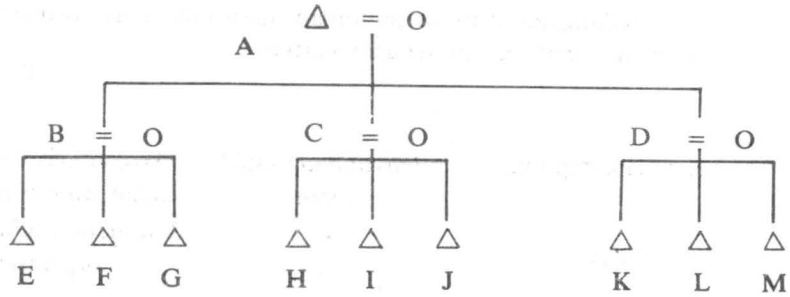
Sedangkan struktur pimpinan masa kini, baik formal maupun informal adalah sebagai berikut :



PIMPINAN TRADISIONAL

Pimpinan formal :

Kepemimpinan disebut **penyimbang** atau **saibatin**. Gelar dari pimpinan formal ini pada masyarakat Lampung Saibatin ialah batin atau Raja. Gelar dan kedudukan pimpinan ini ada di tingkat tiyuh/pekon. Pada masyarakat pepadun, penyimbang tiyuh, bukanlah merupakan fungsionaris dari tiyuh, akan tetapi merupakan status saja. Sebabnya, di dalam suatu tiyuh mungkin saja terdapat beberapa penyimbang marga, dan banyak penyimbang tiyuh, di samping ada tiyuh yang tidak ada penyimbang marganya. Tiyuh yang tidak ada penyimbang marga adalah tiyuh yang didirikan dengan nyetih dari penyimbang marga. Tiyuh yang demikian ini dipimpin oleh penyimbang tiyuh, sedangkan di dalam tiyuh yang ada penyimbang marga, penyimbang margalah yang memimpin tiyuh itu. Jadi secara umum, tiyuh dipimpin oleh penyimbang tiyuh. Struktur yang demikian ini akan dijumpai pada marga Sumbing. Perhatikanlah shema di bawah ini.



Keterangan :

A adalah penyimbang marga. B adalah anak penyimbang yang nantinya akan menjadi penyimbang.

C bukan anak penyimbang, akan tetapi mempunyai hak untuk menjadi penyimbang, dan kedudukannya adalah sebagai penyimbang tiyuh. D juga bukan anak penyimbang, akan tetapi dia berhak atau mempunyai hak untuk menjadi penyimbang, dengan kedudukan penyimbang tiyuh (muda). C dan D apabila telah menjadi penyimbang (sudah tentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi), maka ia dapat mendirikan tiyuh yang terpisah atau dapat memisahkan diri dari B. C berarti memimpin suatu tiyuh, demikian juga D.

Gelar-gelar yang dapat dipakai oleh para penyimbang, menurut catatan dari piagam Adat lampung Siwo Migo, (buay Nu-yai) adalah sebagai berikut :

1. Penyimbang Bumi Asal, Bumi biasa, Ratu Asal, dapat memakai gelar Kiyai, Ratu, Gusti, dan lain-lain.
2. Penyimbang Bumi nyetih, boleh memakai Kiayai, kanjeng, Raja, dan seterusnya, hanya ratu dan Gusti yang dilarang.
3. Penyimbang ratu nyetih, boleh memakai sesukanya, hanya terlarang memakai Kiyai, ratu dan gusti.
4. Penyimbang batin, dan Rajo boleh memakai sesukanya, hanya terlarang memakai Kiyai, ratu, Gusti dan Kanjeng.

Dengan kedudukannya sebagai penyimbang tiyuh dan apabila ia memimpin tiyuh, maka lapangan kepemimpinannya hanya terbatas pada tiyuh itu saja. Tidak dapat dibatasi mengenai apa saja masalah yang dipimpin oleh seorang penyimbang tiyuh karena hampir semua lapangan kehidupan masyarakat, dipimpin oleh penyimbang tiyuh itu. Seorang penyimbang tiyuh memimpin

adat dan keadatan, serta memimpin masyarakat yang bersangkutan.

Daerah lokasi kepemimpinan penyimbang sebagai penyimbang tiyuh, hanyalah pada tiyuh anek/pekon, dan umbulan yang masyarakatnya adalah dari pekon/tiyuh/aneK/tersebut.

Untuk menjadi penyimbang tiyuh dan memimpin tiyuh, maka harus ada anek/tiyuh/pekon yang akan dipimpinya. Mendirikan sesuatu tiyuh mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagaimana telah disebutkan bahwa syarat-syarat itu adalah : suku, pepadun, kuwayan dan sesat. Melakukan upacara untuk pengaruh sebagai penyimbang yang menguasai suatu tiyuh, didalamnya terselip uang **pemapah sila**, yaitu biaya untuk melaksanakan pertemuan yang khusus dilakukan untuk itu.

Faktor pendukung kepemimpinan adalah kemampuan pihak yang bersangkutan baik dalam bidang ekonomis maupun non ekonomis, sikap pergaulan hidup sehari-hari dalam arti luas.

Di atas telah dinyatakan bahwa, untuk menjadi penyimbang yang menguasai suatu tiyuh, maka harus mendirikan tiyuh. Apabila ia hanya menjadi penyimbang tiyuh tapi tidak memimpin tiyuh maka ia harus memenuhi segala ketentuan yang telah di syaratkan oleh adat, yaitu bahwa pada masa kanak-kanak ia telah mengadakan upacara selamatan. Setelah menjadi remaja melakukan upacara, dan ia memperoleh status sebagai **penganggik**. Baginya telah berlaku adat istiadat dan hukum adat. Kemudian dalam perkawinan, ia juga melakukan upacara sesuai dengan adat istiadat setempat, dan di sini diperoleh status pengawo, setelah memperoleh status pengawo, maka ia melakukan upacara adat **turun mandi**, dan di sini ia berhak memakai gelar **pangeran**. Setelah melakukan upacara **turun mandi**, maka upacara yang terakhir adalah pepadun (cakak-pepadun), dan berhak memakai gelar **sutan**.

Penyimbang tiyuh, yang akan menjadi pimpinan/menguasai suatu tiyuh, maka harus melakukan upacara nyetih, setelah ia bergelar pangeran. Upacara nyetih, pada dasarnya dilakukan oleh penyimbang marga dimana penyimbang tiyuh itu berasal. Dengan demikian pelantikan sebagai penyimbang tiyuh yang menguasai tiyuh, dilakukan oleh penyimbang marga dalam suatu upacara tertentu yang khususnya untuk itu.

Atribut yang dikuasai pada hakekatnya akan dipergunakan dalam upacara-upacara adat. Alat perlengkapan kebesaran ter-

sebut adalah :

1. Pakaian adat istiadat yang berupa dandan pakaian gadis, bujang, pengawo, dan ragah tuho.
2. Alat-alat upacara yang berupa : Rato, burung garuda, Awan telapah, kandang rarang dan sebagainya.
3. Seperangkat pepadun lengkap.

Hubungan dengan kepala kampung, pada hakekatnya merupakan hubungan konsultatif. Sedangkan dalam hubungan ke-dinasan kepala kampung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi yaitu seperti hubungan pimpinan dengan anak buah (warga masyarakat). Sedang dalam hal kegiatan upacara adat akan sangat tergantung kepada status dalam masyarakat adat dan tidak ada hubungan dengan kedudukan formal.

Selanjutnya kepala kampung harus selalu mengadakan hubungan konsultatif terutama dalam hal kegiatan yang menyangkut pembayaran di samping yang akan menggunakan tanah dan sebagainya.

Masyarakat yang dipimpin oleh penyimbang tiyuh (penguasa tiyuh) adalah mereka yang merupakan seasal keturunan. Sebab sesuai dengan syarat yang dikembangkan untuk pendirian tiyuh, harus ada suku. Suku adalah suatu satuan geneologis dan pimpinan tiyuh adalah anggota dari kesatuan geneologis itu pula. Dengan demikian dalam masyarakat yang dipimpinnya terdapat mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan.

Setelah melihat hubungan antara penyimbang tiyuh dengan masyarakat, maka dapatlah diketahui mengenai pengaruh mereka dalam masyarakat yang dipimpinnya. Hubungan kekerabatan itulah yang menyebabkan pimpinan formal tradisional ini lebih berpengaruh dari pimpinan formal masa kini.

Pimpinan informal tradisional. Telah dijelaskan dimuka bahwa yang menjadi pimpinan informal tradisional, adalah mereka yang menjadi atau oleh masyarakat dianggap tokoh. Penokohan mereka sebagai pimpinan mempunyai sebab-sebab tertentu, sesuai dengan bidang keahlian dan kecakapannya.

Fungsi dari pimpinan informal tradisional, adalah turut menggerakkan proses pembinaan pengembangan dan pembangunan masyarakat secara luas; baik sendiri-sendiri maupun dalam rangka membantu kegiatan formal kepala kampung.

PIMPINAN MASA KINI

Pimpinan formal :

Pada dasarnya yang menjadi pimpinan formal masa kini adalah kepala kampung dan kepala suku. Kepala kampung pada dasarnya dipilih oleh rakyat secara langsung, dan untuk daerah Lampung disyaratkan harus berijazah SLTP atau yang telah berpengalaman setingkat itu. Kepala kampung diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II. Kepala suku merupakan aparat di bawah kepala kampung diangkat oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan.

Kepala kampung merupakan penguasa tingkat kampung. Dengan demikian, masalah yang dipimpin oleh seorang kepala kampung selain merupakan aparat pemerintah tingkat desa, yang mengurus pemerintah dan administrasi pemerintah, juga merupakan penguasa yang bertujuan untuk mensukseskan program pemerintah. Kepala suku merupakan pembantu Kepala kampung; dengan demikian ia merupakan aparat yang turut mengelola pemerintah di kampung yang bersangkutan.

Kepala kampung merupakan penguasa kampung. Kampung merupakan daerah administratif yang terendah, dengan batas-batas tertentu. Di dalam wilayah inilah Kepala kampung itu berkuasa. Sedangkan Kepala suku, mempunyai wilayah yang lebih dari Kepala kampung, oleh karena suku merupakan bagian dari kampung.

Untuk menjadi Kepala kampung diperlukan persyaratan sebagai berikut :

Dipilih oleh masyarakat setempat, mendapat persetujuan dari pemerintahan tingkat atas, dan diangkat oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II.

Pada dasarnya, atribut atau tanda-tanda khusus bagi pimpinan terlihat dalam pakaiannya. Pakaian dalam kedudukannya sebagai Kepala kampung dan Kepala suku telah ditentukan secara khusus. Ia mempunyai tanda kepangkatan dibahu dengan lambang pohon beringin dan strip. Jumlah strip tersebut adalah tiga buah. Pakaian dinas upacara adalah putih-putih, sedangkan pakaian dinas lapangan adalah biru. Kepala suku tidak mempunyai tanda jabatan, tetapi mempunyai tanda pangkat pada bahu, dengan strip sebanyak dua buah.

Hubungan dengan unsur pimpinan lainnya :

Sesuai dengan kedudukannya maka Kepala kampung mempunyai hubungan konsultatif dengan pimpinan lain. Hal tersebut wajar dalam rangka mensukseskan program dan pelaksanaan kegiatan kerja pada warga masyarakat kampung.

Tampaknya hubungan konsultatif ini berperan sangat penting terutama dalam memadukan bahasa dan pendapat untuk kepentingan bersama seperti Pembangunan Kampung.

Pengaruh dalam masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana wibawa Kepala kampung tersebut terlihat oleh warga masyarakat secara luas. Biasanya wibawa tersebut akan tercermin pada perilaku dan sikap perbuatan Kepala kampung dalam memimpin masyarakatnya baik secara pribadi maupun secara ke-dinasan.

Hal tersebut dapat dipahami karena kehidupan kampung yang masih mempunyai pola ketergantungan dari pimpinan. Kepala kampung merupakan sebagai tauladan dari warga masyarakatnya.

Pimpinan informal masa kini :

Pimpinan formal masa kini adalah pimpinan formal tradisional dan pimpinan informal lainnya. Pimpinan yang berasal dari pimpinan formal tradisional pada dasarnya tidak dibahas lagi disini, oleh karena sedikit banyak telah dibahas pada pimpinan formal tradisional. Pimpinan informal masa kini yang lain adalah para alim ulama, para pimpinan organisasi (masyarakat Lampung Saibatin), dan para cerdik pandai.

Sesuai dengan asalnya maka fungsi dari pimpinan ini, tidak jauh berbeda dengan pimpinan formal tradisional. Atas dasar hal itu maka wajar kiranya bila pimpinan informal selalu diajak berkonsultasi dalam memecahkan masalah pembangunan kampung. Di samping itu kiranya telah merupakan suatu kewajiban dari para pimpinan informal untuk selalu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, karena hal tersebut akan menyangkut kehidupan dan penghidupan mereka secara pribadi maupun bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN SOSIAL

Sistem pengendalian sosial adalah sistem pengendalian yang ada di dalam suatu komunitas, agar setiap warga, dapat berpikir dan bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dalam suatu komunitas. Dengan adanya pengendalian ini diharapkan setiap warga di samping menghayati nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan, juga berbuat, bertindak laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan tersebut. Untuk mengendalikan ini maka di dalam suatu komunitas ada beberapa cara yang ditempuh, sehingga dengan itu menetapkan jalannya nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan tersebut.

MEMPERTEBAL KEYAKINAN

Mempertebal keyakinan merupakan salah satu cara agar setiap warga dapat berpikir dan bertindak laku sesuai nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang ada. Mempertebal keyakinan, dapat dilakukan melalui beberapa jalur.

Pendidikan :

Pendidikan, adalah salah satu jalur untuk menanamkan keyakinan terhadap nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan. Jalur pendidikan ini dapat formal maupun nonformal. Dengan pendidikan formal (melalui sekolah), anak didik diajarkan tentang budi pekerti. Tujuannya adalah agar para anak didik itu mempunyai budi dan pekerti yang mulia, sopan dan santun terhadap sesama, juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, Ketatanegaraan dan sejarah. Tujuannya adalah agar anak didik menjadi warga masyarakat dan warga Negara yang baik.

Pada pendidikan non formal, seperti pada pertemuan-pertemuan pemuda dan pada waktu acara adat seperti acara adat untuk bujang dan gadis, misalnya **miyah damar**, **buram bak** dan **nyarak hubos**. Di sini kepala bujang dari anek atau pekon, akan

menanamkan sopan santun, bahkan ia dapat memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran dari sopan santun yang telah ditetapkan dan berlaku untuk itu. Acara adat yang dapat juga menjadi media pendidikan adalah **merwatin**, yaitu rapat para **perwatin adat**. Pada acara ini, para anggota masyarakat lain dapat mengikutinya (bukan sebagai peserta). Mereka dapat mengetahui tentang bagaimana adat-istiadat itu harus dijalankan, dapat mengetahui sanksi-sanksi apa yang dapat diberikan pada anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat itu, serta dapat meniru bagaimana tertib adat dalam melakukan merwatin itu.

Sugesti sosial :

Memberi sugesti kepada anggota masyarakat, merupakan salah satu dari jalur yang ada, untuk dapat menanamkan keyakinan terhadap nilai-nilai, -norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku, pada umumnya dilakukan dengan melalui dongeng-dongeng, cerita-cerita dan pepatah-pepatah. Biasanya pada malam hari nenek dan kakek atau orang tua akan menyampaikan dongeng-dongeng kepada anak cucunya berupa dongeng-dongeng yang mengandung petuah-petuah untuk berbuat kebaikan, atau pada waktu-waktu tertentu misalnya pada waktu melakukan **abir** (gotong royong) dimana sambil bekerja, orang-orang tua menyampaikan cerita-cerita pada para muda-mudi. Cerita -cerita itu mempunyai nilai sugesti, agar menuruti nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Cerita ini biasanya berfokus pada hal-hal yang baik harus di teladani, dan hal-hal yang buruk harus dihindari. Pada saat-saat lain, sering pula diberikan cerita-cerita yang walaupun dikarang sendiri oleh orang tua-tua itu, akan tetapi tujuannya agar nilai sopan-santun harus dipatuhi dalam hubungan dengan orang lain.

Dongeng setangkai urai cambai :

Yang menceritakan tentang anak yang durhaka terhadap ibunya. Cerita **bakas pemasu** (seorang pemburu) yang membantu binatang dalam lobang dan orang yang terperosok. Binatang tersebut memberikan terima kasih, sedangkan orang yang terperosok itu tidak membalas budi, malah memusuhi. Pepatah-pepatah, seperti **dang murahga dibudu petar**, **mak nguwai juga** (jangan boros pada asinan petai, sebab petai tidak selamanya berbuah),

maksudnya agar orang hati-hati dalam menempuh hidup ini, dan musti berencana. Nuar lemasa namon kewurak (menebang batang nangka, kemudian menanam bijinya), tidak mempunyai perhitungan. **"Dang lapah ko mak tigh, dang cawo ki mak temen"** (jangan pergi kalau tidak sampai, jangan diucapkan kalau tidak benar), maksudnya. Semua hal itu merupakan beberapa contoh ceritera, dongeng, dan pepatah yang berusaha memepertebal keyakinan masyarakat Lampung akan nilai-nilai, norma-norma serta aturan-aturan yang ada pada kebudayaan Lampung.

Propaganda :

Pada umumnya dilakukan dengan pidato yang pada orang Lampung Saibatin disebut **Surah**. Pidato-pidato itu berisi pengarahan agar setiap warga menuruti norma-norma baik agama maupun norma-norma kemasyarakatan. Dalam perayaan dan hari-hari **penayuhan** (hajatan besar), selalu ada saja kesempatan untuk mempropagandakan tentang hal-hal yang harus dilakukan, agar manusia berbuat baik.

Kepercayaan dan agama :

Sebagaimana telah dinyatakan bahwa masyarakat Lampung secara umum memeluk agama Islam. Dengan demikian sebahagian dari norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada dan berlaku dalam masyarakat, adalah berdasarkan pada norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan agama.

MEMBERI IMBALAN

Selain dari pada mempertebal keyakinan, memberi imbalan merupakan juga salah satu jalur yang dapat memantapkan jalannya nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan tersebut.

Imbalan yang konkrit

Nilai-nilai dan norma-norma serta aturan-aturan yang ada akan menjelma dalam perilaku. Seseorang yang berperilaku baik di dalam masyarakat memperoleh penghargaan yang tinggi dan oleh karena itu kepada mereka diberi kepercayaan tertentu. Misalnya, kepada mereka diberi kesempatan untuk **mengunduh lada, mengunduh damar**, yang hasil dari unduhan itu dipercayakan kepada mereka untuk membaginya (dalam pekerjaan bagi hasil). Hal-hal seperti ini memberi rangsangan pada masyarakat agar bertingkah-laku sebaik mungkin, agar dapat menumbuhkan ke-

percayaan masyarakat terhadapnya.

Sejalan dengan contoh di atas, maka kepada mereka yang bertingkah laku baik dalam masyarakat misalnya, akan ditunjuk sebagai **Parba** (pengurus air), dan lain-lain. Imbalan meteriel pada dasarnya berbaur dengan imbalan non-materiel, namun imbalan dengan memberikan tanda-tanda penghargaan yang simbolis sifatnya, pada dasarnya tidak dikenal sama sekali.

Imbalan dalam kepercayaan :

Pada masa sekarang ini, secara konkrit imbalan dalam kepercayaan, sudah jarang ditemukan. Dahulu pada mula-mula agama Islam dikembangkan di sini, masih banyak imbalan-imbalan dalam kepercayaan yang diberikan misalnya dipercayakan untuk memimpin upacara-upacara kepercayaan, seperti membasuh Pusaka. Dari kepercayaan ini ia akan memperoleh imbalan seperti sajian dan imbalan materiil lainnya seperti padi, beras, dan sebagainya. Kemudian setelah ia meninggal, makamnya dikermatkan orang, maksudnya sewaktu-waktu diziarahi, makamnya dibersihkan dan dipugar. Maksudnya imbalan-imbalan diatas, adalah untuk menunjukkan hormat dan penghargaan kepada orang yang selalu jujur dan berbuat baik. Sudah tentu ini memberi pengaruh pada masyarakat. Pengaruh ini akan terlihat misalnya dalam perkataan "**tinuk pai si.....**" (contohnya si

Imbalan dalam agama :

Dinyatakan di atas bahwa di daerah penelitian, penduduknya pada dasarnya seluruhnya beragama Islam. Mereka yang selalu bertingkah laku baik, akan memperoleh penghargaan dari masyarakat. Imbalan dari adanya penghargaan itu, dicetuskan misalnya dengan memberi kesempatan-kesempatan tertentu yang dapat misalnya menolong kehidupannya, seperti diangkat menjadi guru mengaji bagi anak-anak, dan sebagainya. Apabila ia sebagai pedagang misalnya, ia akan dipercayakan untuk menitipkan hasil kebun dari masyarakat, sampai si pemilik itu memerlukan uang karena sesuatu hal. Titipan ini biasanya tanpa bunga.

Di dalam masyarakat dikenal pepatah "**nyerako upi dikejuk**" (menyerahkan bayi pada jin pemakan bayi). Pepatah ini kurang lebih berarti "memberi titipan kepada orang yang kurang baik". Maksud dari pepatah ini adalah janganlah menyerahkan/menitipkan sesuatu kepada mereka yang buruk kelakuannya. Bagi pemuda/pemudi yang baik budi pekertinya dan ta'at beribadat, ia

akan menjadi inceran dari pada orang tua, untuk dijadikan mantu.

Banyak pengaruhnya ditengah masyarakat, bagi mereka yang selalu berbudi pekerti baik dan taat beribadat, sehingga bagi orang ini terdapat sebutan "**asing helokni kena**" (bagaimanapun lenggangnya itu indah) maksudnya, apapun yang dikatakannya dan apapun yang diperbuatnya serasi dan wajar.

MENGEMBANGKAN RASA MALU

Bagi masyarakat Lampung, yang menjadi dasar pokok dan tolok ukur kesalahan itu adalah rasa malu (loom). Rasa malu memegang peranan penting dalam masyarakat, sehingga apabila seseorang anggota kerabat membuat tingkah laku yang menimbulkan rasa malu, maka seluruh kerabat akan turut merasakan akibatnya. Nampaknya akan lebih memalukan apabila ada bujang yang menghamili gadis, atau gadis hamil sebelum menikah, dibandingkan dengan apabila seseorang menghilangkan benda yang sangat berharga milik kerabat atau menghilangkan nyawa orang lain. Seseorang bujang yang mencuri misalnya, yang menjadi persoalan adalah perbuatan mencurinya itu bukan benda yang dicurinya, oleh karena dengan perbuatan mencuri itu bukan saja bujang itu yang menderita akibatnya, akan tetapi seluruh kerabat yang bertalian kekerabatan dengannya. Sehingga dalam masyarakat Lampung, yang selalu diperingatkan adalah "**dang Nyani liom**" atau **dang guai malu**" (jangan membuat malu).

Peranan gunjing :

Pada masyarakat Lampung, gunjing itu disebut **upok**, **cela wada** (cacat dan cela). Perbuatan-perbuatan yang tercela dalam masyarakat itulah yang merupakan materi dari pada gunjing itu. masyarakat itulah yang merupakan materi dari pada gunjing itu. **ruan** yaitu suatu gubuk ditengah hutan tempat beristirahat dari bekerja dikebun. Biasanya yang melakukan gunjing dipangkalan mandi adalah kaum wanita karena waktu mereka yang cukup banyak, misalnya karena waktu yang relatif lama untuk mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga. Bagi kaum pria, tempat pergunjingan adalah di **pepanca**, yaitu tempat duduk dari beberapa bilah papan ditengah kampung atau dipinggir pantai. Juga di **pusiban**, yaitu beranda rumah yang menjorok kedepan.

Akan tetapi, masyarakat juga sangat rawan dalam soal gunjing ini, oleh karena apabila kerabat itu mengetahui bahwa fa-

milinya dipergunjingkan orang, sedangkan ia sendiri belum mengetahuinya, maka dengan segera ia akan mendatangi kerabatnya itu untuk mengetahui kebenaran dari masalah yang dipergunjingkan itu. Masyarakat juga selektif dengan materi pergunjangan, nampaknya sebutan kicik pepanca (berita yang belum pasti) merupakan bukti untuk itu. Demikian juga bagi mereka yang dipergunjingkan itu terdapat pembatasan-pembatasan misalnya, bagi yang melakukan gunjing sedangkan sebenarnya dia sendiri demikian juga perbuatannya, maka ia akan disebut sebagai "rabai dihantu, kidang nyumpik mayat (takut pada hantu tetapi mengeloni mayat sebagai gulingan)", **sadak pai geler** (rabalah dahulu samping badanmu).

Peranan agama :

Agama mempunyai ajaran-ajaran yang harus diikuti oleh mereka yang mempercayainya. Termasuk di dalamnya adalah tentang cara harus bertingkah laku dan berbuat di dalam masyarakat. Perbuatan yang memalukan menurut agama sudah tentu sangat banyak, misalnya seperti melakukan zinah. Seirama dengan adat-istiadat masyarakat, maka perbuatan zinah juga oleh masyarakat dilarang. Apabila terdapat gadis yang hamil sebelum menikah maka, selain terdapat sanksi yang diberikan oleh masyarakat, juga ini yang merupakan hal yang sangat berat bagi masyarakat adalah rasa malu. Rasa malu bukan saja bagi gadis yang bersangkutan, tapi bagi keluarga itu, bahkan bagi kerabat yang bersangkutan dan juga sekaingus bagi masyarakat kampung itu. Anak yang dikandung dan yang akan lahir itu oleh masyarakat disebut anak **kappang**. Anak **kappang** ini akan menjadi ejekan masyarakat. Jadi, rasa malu bukan saja akan diderita sendiri, akan tetapi juga oleh keturunannya. Penderitaan yang demikian ini akan tetap dirasakan oleh karena di dalam berbagai hal masyarakat akan tetap membicarakan mengenai asal keturunannya itu.

Perbuatan seseorang juga akan terlihat pada waktu ia menghadapi saat-saat kematian. Orang yang meninggal dengan tenang dan baik. Akan menjadi buah bibir masyarakat karena meninggalnya dengan cara yang baik. Akan tetapi orang yang meninggalnya susah payah, akan menjadi buah bibir masyarakat yang umumnya yang bersifat negatif. Hal ini sudah tentu akan memberi malu para kerabat yang ditinggalkannya. Orang-orang yang tidak beribadah, selain akan mendapat malu dari masyarakat sekitarnya akan mem-

buat malu pula anggota keluarga, sehingga kerabatnya akan melakukan teguran kepadanya. Teguran itu sering dilakukan dengan mengambil perumpamaan seperti **mak ubahni jak kibau** yang artinya tidak ubahnya seperti kerbau.

Uraian di atas, sebenarnya telah mencerminkan tentang bagaimana sanksi dalam masyarakat dan bagaimana pelaksanaan sanksi itu dalam masyarakat. Namun yang perlu di tampilkan di sini adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan zinah. Sanksi yang diberikan karena melakukan perbuatan itu, berbaur dengan hukum adat masyarakat. Hukum adat juga melarang perbuatan zinah itu. Sanksi yang diberikan adalah tergantung kepada status seseorang dalam masyarakat. Seandainya yang melakukan itu adalah **penyimbang** maka ia harus mengadakan upacara membersihkan pepadun, oleh karena **pepadunni kamak** (singgasananya kotor). Apabila yang melakukan itu tidak sanggup atau tidak dapat atau tidak mau menurut peraturan, maka ia **dibuang** atau dikeluarkan dari adat dan demikian pula segala mereka yang termasuk dalam pepadun itu. Tetapi apabila penyimbang lainnya tidak mau dikeluarkan dari adat, maka mereka dapat mendirikan benteng (pagar) yang maksudnya sebagai memisah diri dari yang bersalah. Ini disebut **negiken langen**, dengan melakukan upacara untuk itu.

Mertua dan ipar dalam mempertebal rasa malu, mempunyai peranan yang penting. Kehadiran, keikutsertaan dalam menyelesaikan masalah itu, serta diketahuinya perbuatan tercela oleh mereka, (mertua atau ipar = Lampung, lakau) merupakan suatu keadaan yang benar-benar sangat menimbulkan perasaan malu.

MENGEMBANGKAN RASA TAKUT

Mengembangkan rasa takut, merupakan salah satu bentuk dalam pengendalian sosial. Rasa takut ini dapat bersifat batiniah maupun lahiriah. Oleh karena itu mengembangkan rasa takut merupakan salah satu jalur untuk menanamkan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat.

Faktor kepercayaan :

Perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang menurut kepercayaan. Menguraikan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, digunakan dengan mendasarkan pada konsep masyarakat, dengan apa yang disebut **TULAH** (yang me-

rupakan dari suatu yang sangat gaib). Namun bagaimana bentuk perbuatan itu, merupakan suatu yang sangat abstrak sekali, oleh karena pada setiap saat masyarakat dapat saja menggunakan konsep ini. Misalnya seperti menjual pusaka lama, dan sebagainya.

Sanksi-sanksi perbuatan yang dilakukan atas dasar kepercayaan sebagaimana dikatakan tadi, hanyalah merupakan suatu perbuatan yang sanksinya tidak konkrit.

Pengaruh sanksi dalam masyarakat akan mengakibatkan bahwa seseorang warga masyarakat tidak akan melakukan suatu perbuatan yang dianggap tidak patut sehingga warga masyarakat akan tetap selalu menjaga nama baik pribadi dan keluarganya. Walaupun sanksinya tidak konkrit namun bila telah merupakan buah bibir dari masyarakat maka akan dengan sendirinya yang bersangkutan akan merasa terasing dengan sendirinya dari tengah pergaulan sehari-hari.

Faktor agama :

Perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh agama sudah cukup banyak. Oleh karena masyarakat Lampung memeluk agama Islam, maka perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan pada dasarnya dikembangkan atas dasar konsepsi Islam. Penguraian mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang akan menimbulkan rasa takut, pada dasarnya sangat membaaur dengan hal yang akan menimbulkan rasa takut berdasarkan konsep masyarakat yang disebut **kanikni apui naraka dan tulah**.

Perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan **tulah**, misalnya adalah berbuat tidak senonoh atau tidak baik terhadap orang tua, dan dianggap akan menjadi penghuni api neraka (**kanikni apui naraka**).

sanksi-sanksi yang diterapkan oleh karena perbuatan yang tidak baik terhadap orang tua misalnya, pelaksanaannya dilakukan secara serta-merta. Sebagai contoh, misalnya apabila seorang gadis atau seorang pemuda yang akan mengawini pemuda atau gadis yang tidak direstui atau disetujui, maka oleh pihak orang tua, akan dikirim kain kappan, tanda tidak diakui lagi sebagai anak.

Hukum adat :

Hukum adat merupakan bagian yang ada dalam masyarakat. Deskripsi mengenai hukum adat yang berlaku di sini, khususnya

bagi masyarakat Lampung Pepadun, diambilkan dari Piagam Adat Lampung **Siwo Migo** (buay Nunyai).

Sesuai dengan catatan yang ada dalam piagam itu, maka banyak perbuatan yang diharuskan atau tidak boleh dilakukan. Antara lain ialah perbuatan zinah (**ngebelat nyalah ulat**), **cepa.o salah pakai** (yaitu memakai pakaian penyimbang, tutur, gelar, inia dan amai, juluk, adek), memukul para penyimbang, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang oleh hukum tidak diperkenankan.

Apabila masyarakat terutama para penyimbang melakukan itu, maka sanksinya terlihat cukup berat, yaitu mengadakan upacara, dan kalau tidak maka ia akan dikucilkan dari masyarakat adat. Antara lain dari upacara itu disebut upacara pembersihan pepadun. Upacara ini memerlukan biaya yang besar disamping sipembuat harus menahan perasaan karena kesalahan-kesalahan itu akan tetap dibicarakan dalam **perwatin adat**. Apabila melakukan kesalahan karena memakai **pakaian** (gelar, tutur, **inai-amai**, dan sebagainya) penyimbang, maka sanksinya adalah berupa denda. Demikian juga halnya apabila menyakiti penyimbang-penyimbang seperti memberi malu dan memaki, maka ia telah melakukan suatu pelanggaran yang disebut **Cepalo Kuyuk mesek**. Sedangkan apabila menyakiti seperti memukul, maka ia telah bersalah melakukan pelanggaran yang disebut "**Cepalo kuyuk ngereh**" maka sanksinya adalah berupa denda. Pelanggaran-pelanggaran lain adalah : **Cepalo nuruni bubbai**, yaitu turun kekali tetapi sedang ada wanita atau perempuan yang mandi dan perempuan itu bukan isterinya, **cepalo ulah**, **cepalo punyu ngingut** yaitu karena kentut ditengah keramaian atau pesta adat, dan **cepalo kucing muntah** yaitu berdahak dekat pada medan keramaian atau pesta makan minum. Sanksi-sanksi yang diberikan adalah berupa denda. Jelasnya terlihat di sini bahwa hukum adat juga mengatur tata sopan santun agar masyarakat menjadi tertib dan damai.

Dengan adanya sanksi-sanksi ini, diharapkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan dan sekaligus menimbulkan rasa malu. Akibat adanya sanksi itu, akan menimbulkan pandangan dan penghargaan masyarakat terhadap setiap individu berkembang. Sebab walaupun telah diadakan upacara atau denda, akan tetapi ingatan masyarakat terhadap penyimbang itu akan terus menerus hidup, sehingga pada

suatu saat akan menjadi ukuran penilaian. Apabila kalau yang melakukan perbuatan tercela itu adalah penyimbang, maka yang terlibat bukan saja penyimbang itu akan tetapi seluruh keluarga dimana dia adalah penyimbangny.

BAB VII

BEBERAPA ANALISA

BENTUK KOMUNITAS KECIL

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa 'maka dapat disimpulkan masyarakat setempat (komunitas) adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat. Suatu masyarakat setempat pasti mempunyai lokasi atau tempat tinggal tertentu (7 : 116).

Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan, bahwa memang suatu komunikasi kecil merupakan suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Tetapi dasar-dasar dari pada masyarakat setempat bukan saja lokalitas dan perasaan semasyarakat setempat, tetapi harus pula ditambah dengan satu dasar lagi, yaitu dasar kekerabatan.

Suatu komunitas kecil memang mempunyai lokalitas atau tempat tinggal tertentu, yang dibangun oleh mereka dengan syarat-syarat tertentu pula, yang diantaranya adalah harus ada **wayan**. Syarat ini mengakibatkan bahwa wilayah suatu komunitas kecil akan berada ditepian sungai atau kali ataupun tidak jauh dari situ. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat bahwa di Indonesia, desa biasanya dibangun disepanjang jalan, atau paling sedikit tidak terlampau jauh dari jalan, baik yang dibuat oleh alam maupun oleh manusia. Jalan yang dibangun oleh alam yang terbaik adalah sungai, atau ditempat-tempat tidak jauh dari sungai (8 : 164).

Konstataasi yang terakhir, yaitu mengenai apabila belum ada jalan-jalan buatan manusia, maka desa-desa biasanya dibangun ditepi sungai, merupakan konstataasi yang kurang dapat diterapkan pada masyarakat Lampung.

Kurang tepatnya konstataasi tersebut apabila diterapkan pada masyarakat Lampung oleh karena kelihatan adanya tekanan pada komunitas kecil yang tidak ada jalan-jalan buatan manusia, maka desa-desa biasanya dibangun ditepi sungai, oleh karena memang telah disyaratkan bahwa dalam pembentukan desa (anek/pekon/tiyuh) harus ada wayan.

Pemerintah desa sebagai suatu kegiatan yang beroperasi di dalam ruang lingkup yang dinamakan sebagai wilayah desa. Wilayah desa dimana di atasnya terdapat suatu masyarakat hukum dan berstatus sebagai

wilayah-wilayah administratif yang lebih luas, ialah Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi (5 : 121). Pernyataan ini, apabila ditinjau dari segi lain, dapat dirubah menjadi : bahwa suatu komunitas kecil merupakan suatu wilayah tempat tinggal serta merupakan bagian daripada wilayah yang lebih luas. Pada masyarakat Lampung, wilayah terkecil inilah yang disebut anek/tiyuh/pekon, yang merupakan bagian dari suatu wilayah yang lebih besar yang disebut dengan marga.

Sebagaimana konstataasi yang diajukan oleh Koentjaraningrat bahwa suatu komunitas mempunyai sifat-sifat tambahan, yaitu bahwa komunitas kecil dan karena sifat kecilnya itu juga maka antara bagian-bagian dan kelompok khusus didalamnya tidak ada aneka yang besar, merupakan konstataasi yang dapat diterapkan pada masyarakat Lampung. Sebabnya adalah bahwa pada masyarakat Lampung, lembaga-lembaga sosial yang ada tidak demikian bervariasi.

SISTEM PELAPISAN SOSIAL

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, menulis bahwa telah dirumuskan dalam ilmu sosiologi modern secara umum bahwa sistem berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur (6 : 253). Dengan demikian di tiap-tiap masyarakat secara pasti akan dijumpai sistem berlapis-lapis itu. Demikian juga kita lihat pada masyarakat Lampung.

Begitu pula konstataasi dari Ter Haar menyatakan bahwa pembagian anggota-anggota dalam kelas-kelas itu terdapat dimasyarakat-masyarakat hukum dalam lingkungan-lingkungan hukum; namun patokannya kelas itu berbeda-beda. Dibanyak daerah di **Sumatra**, Kalimantan, Sulawesi dan Timor, timbullah di masyarakat-masyarakat lingkungan rakyat suatu kelas penghulu (hoofdenstand) kelas "bangsawan dan kelas-kelas di alam raja-raja tak dibicarakan di sini - yang dipertahankan dengan jalan : hukum waris Indonesia yang mengandung perkecualian buat kelasnya, pelarangan atas perkawinan pemuda-pemuda penghulu dengan laki-laki dari kelas yang dibawahnya, pengambilan sebagai bini muda dari wanita-wanita kelas bawahan oleh anak-anak laki bangsa penghulu, dan wanita sesama kelas dijadikan bini tua (hoofdvrouw). Jumlah uang jujur atau jumlah uang kematian adalah, dimana aturan itu ada, buat pemudi-pemudi dari kelas penghulu lebih tinggi dari pada buat anak-anak perempuan orang kebanyakan, malahan mereka ini dilarang meminta uang jujur yang ketinggian. Delik-delik (pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan) yang diperbuat orang lawan penghulu-penghulu itu memakai nama-nama dan gelar-gelar yang tak mungkin

dicapai oleh orang kecil. Pada upacara-upacara adat maka penghulu-penghulu mendapat hak-hak mendahului, berupa : urutan-urutan duduknya, macam-macam perkakas tempat-tempat hidangannya yang diedarkan, macam bagian daging hewan tersembelih yang dipersembahkannya, serta mereka didahulukan dan dihormati. Caranya penghulu-penghulu berpakaian adalah lain dari pada caranya rakyat jelata, cara pemakamannya pun lain dari pada orang-orang kecil, dan yang terakhir ini terlarang memakai cara itu. Karena cara-cara adat sedemikian itu maka perbedaan kelas tetap suatu perbedaan sosial yang dirasakan sehari-hari dan banyak aturan-aturan hukum bertalian dengan itu. (8 : 37 dan 38).

Sebahagian besar dari konstataasi yang disampaikan oleh Ter Haar di atas, masih dapat diketemukan pada masyarakat Lampung. Namun demikian, beberapa dari hal diatas perlu dikoreksi. Koreksi ini sebenarnya adalah merupakan hasil perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

PIMPINAN MASYARAKAT

Pada dewasa ini pimpinan masyarakat komunitas kecil, terdiri dari pimpinan masyarakat yang tradisional formal, pimpinan resmi dan pimpinan informal.

Dari ketiga pimpinan di atas, maka kelihatannya pimpinan masyarakat yang tradisional formal masih memegang peranan yang cukup dominan dan masih mempunyai pengaruh yang cukup besar di dalam masyarakat. Nampaknya pimpinan masyarakat yang tradisional formal ini masih cukup bertahan untuk beberapa masa mendatang, oleh karena pimpinan tradisional formal pada dasarnya juga merupakan pimpinan kerabat juga pimpinan kebuayan. Selama masyarakat Lampung masih dalam struktur yang demikian itu, maka pimpinan tradisional formal masih tetap bertahan. Suatu asumsi diterapkannya pemerintahan marga, oleh karena dirasakan oleh pemerintah Belanda bahwa pemerintahan yang disusun sebelumnya kurang efektif didalam masyarakat. Apabila asumsi ini benar, maka kiranya dalam proses pembangunan dewasa ini pimpinan tradisional formal harus tetap diperhatikan. Dengan demikian, kita menggunakan nilai-nilai dalam masyarakat untuk pembangunan dan bukan untuk pembangunan memerangi nilai-nilai masyarakat. Melemahnya larangan untuk melakukan perkawinan dengan mereka yang tidak sederajat, dan tidak adanya pengambilan sebagai bini muda dari wanita-wanita kelas bawahan oleh anak-anak laki-laki bangsa penghulu pada saat ini telah merobah pelapisan sosial serta struktur dan bentuk

pimpinan masyarakat pada masyarakat Lampung.

PENGENDALIAN SOSIAL

Alfian menulis dalam suatu karangan yang berjudul hubungan timbal balik antara hukum dan politik, menyatakan bahwa tingkah laku sosial mereka dalam berintegrasi antara satu sama lain lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma/nilai-nilai adat dan agama dari pada oleh peraturan-peraturan hukum yang sejogyanya harus berlaku. Norma-norma hukum sebagian dari sistem budaya masyarakat itu tampak tidak banyak berpengaruh, dan oleh karena itu hanya mempunyai andil yang sedikit pula dalam mewarnai pola pergaulan sosial mereka. Cukup banyak peristiwa-peristiwa hukum, seperti perkelahian berdarah yang diketahui umum tidak pernah sampai ke muka pengadilan. Biasanya peristiwa-peristiwa itu diselesaikan melalui suatu upacara musyawarah adat (1 : 248).

Bertitik tolak dari tulisan di atas dan dibenarkan bahwa tingkah laku sosial masyarakat dalam berintegrasi antara satu sama lain itu lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma/nilai-nilai adat (termasuk hukum adat) dan agama. Hukum (yang dimaksud disini adalah perundang-undangan dan peraturan lainnya yang tertulis), pada masyarakat Lampung, tidak banyak berpengaruh. Masyarakat Lampung, masih berpegang teguh kepada adat istiadat dan hukum adat mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Kumpulan Karangan, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta 1978.
2. Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Penerbit Universitas, Jakarta 1966.
3. Koenjaraningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Dian Rakyat, Jakarta 1977.
4. Muhammad, Bushar, Pengantar Hukum Adat, Jilid I, P.T. Penerbit dan Balai Buku "Ichtiat" Jakarta 1961.
5. Saparin, Sumber Ny. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta 1977.
6. Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soelaeman, Setangkai Bunga Sosiologi, Universitas Indonesia, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta 1964.
7. Soerjono Soekanto : Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan keenam Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 1978.
8. Ter Haar, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1974.

I N D E K S

A

Abir
 Abung siwo mego
 Adat pepadon
 Adat Saibatin
 Alam rua belas
 Alas tuho
 Amu sabai
 Anak ngura
 Anak Kappang
 Anak penyimbang
 Anak ratu
 Anak sulung
 Anak tumpang
 Anek
 A s u
 Asing hilang nikena
 Awan telapah

B

Bah bumekon
 Bahasou Lampung
 Bakas
 bakas pemasu
 Bakhu
 Balai desa
 Bale
 Batin
 Bebai
 Beruga
 Besan
 Bidak becukil
 Bidak sebagi
 Bojong
 Buay anak tuha
 Buay belunguh

Buay bulan
 Buay jalan duwai
 Buay nyerupa
 Buay permong
 Burambak

C

Cangget
 Cela wada
 Cawo Lampung
 Cela wada
 Cepalo kucing mutah
 Cepalo kuyuk mesek
 Cepalo kuyuk ngereh
 Cepalo nurani bubbai
 Cepalo ulah
 Cepalo salah pakai
 Crengan
 Cutik

D

Dang guai malu
 Dang murah gadi budu
 Dang Nyani liom
 Dapor
 Di peraturan

E

Emas wai besai

G

Gagaman
 Ganjang isi
 Ganjang tengah
 Garang
 Gawi
 Gekhenuk

Geminser
 Gemul

H

Halimawong
 Hatok bulung
 Himpunan pekon

I

Ijan
 Ika - ika
 Inai amai
 Istri ratu

J

Jakung balak

K

Kakan
 Kak kayahan
 Kanuang
 Kaum bangsawan
 Kelas - kelas
 Kendwei
 Kapalo
 Khedak
 Kibau jaiang
 Kecil pepanca
 Kilu titek-kuli gambar
 Kanikni apui neraka
 Kuaw
 Kumbok
 Kuwalat
 Kuwayan
 Kuyuk

L	Ngebelet nyalah ulat	Ratu sesunan
Lakau	Ngenah taneh	Rimba bagang
Lalipak	Ngeruah	Ruyan
Lampai	Ngumbai	S
Lamban balak	Numpang	Sabai
Lamban biasa	Nyarak hibos	Sadak pai geler
Lemban rebah	Nyeraho upik dikejuh	Saibatin
Lapang luar	Nyetik	Sanak
Lapang lom	P	Sanggerak
Lepak tanah	Pak humpu	Sango miyanak
Las tuho	Paksi	Sapu
Lebung	Panggakh	Sebai
Lemawong	Panggar	Sekelik
Lepau	Pangkalan Way	Sela sukanng
Liman	Pawon	Selimor
Liman cutik	Pekon	Senusuk
Liman ramik	Pelandok	Sesaini lepau
M	Pengadapan	Sesaka
Mak nguwah juga	Pengeran	Setangkai urai cambai
Manuk	Penyusuk tiyuh	Sesat
Markis	Pepadun	Sisambatan
Marga administratif	Pepanca	Sudung
Medan ragah	Pesirah	Suku
Medan sebai	Petakh Cina	Surah
Menyan	Petakh melako	Surahni malim
Menguduh damar	Pijirat	Surat lampung
Menguduh lada	Pubian telu suku	Suttan
Merwatin	Pulau tuha	T
Mesjid	Penyimbang	Tabalayak
Mulli puteri	R	taban
N	Rabai hantu kidang	tabew
Nayuh	nyumpit mayat	Tajuk kuwayan
Negiken langen	Radin	Talang
Ngabuda	Ragah	Tangguh
Ngagugom dan Ngariki	Raja	Tambak
Ngakuh kelamo	Randau	Tambakni bujang
Ngarekah pemanoh	Rang laya duwai	Ta'un
		Tenuk

Tepas
Tiyuh
Tinuk pai si
Tulah
Tundan
Tungkai Kibau

U

Uang jujur
Ubahni jak kibau
Ujung
Uleman
Umbulan
Umung Lampung
Uncal
Upahan
Uppok

P

Parba
Payung Gubir
Payung kuning
Pemapah Sila
Penayuhan
Pengawa
Penglaku
Penglaku muli meranai
Penglaku punggowo
Penglaku tulis
Penuju ningut
Perwatin
Petar
Punduk
Pupang Punyambut
Pusiban

W

Wayan
Wijan

SALINAN :

**PIAGAM ADAT LAMPUNG DALAM MARGA BUAY NUNYAI
MENURUT KETETAPAN MARGA - RAAD BUAY NUNYAI
TANGGAL 20 MARET 1973, DAN KEPUTUSAN SIDANG PER -
WATIN ADAT LAMPUNG DALAM MARGA NUNYAI.**

Peraturan adat istiadat Lampung yang dipakai dalam marga Nunyai Kotabumi sejak suku Lampung ada, hingga sampai pada masa kini, tetap menjadi pegangan suku Lampung.

Peraturan dan Piagam ini, dikutip dari keputusan Raad Marga Nunyai dan Kampung sidang Perwatin adat Lampung seluruh Marga Nunyai sebagai yang tersebut di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Bumipul gelar Haji Abdul Moorad. | Kampung Kotabumi Udik. |
| 2. Sutan Pangeran | Kampung Kotabumi Ilir. |
| 3. Sutan Selibar jagat | Kampung Kotabumi Ilir. |
| 4. Sutan Ningrat | Kampung Surakarta. |
| 5. Tuan Rajo | Kampung Surakarta. |
| 6. Raja Asal Gelar Sutan Sarif | Kampung Penagan Ratu. |
| 7. Tuan Pangeran | Kampung Bumi Agung Marga. |
| 8. Raja Mangku Bumi | Kampung Kota Alam. |
| 9. Pangeran Marga Barisang | Kampung Kota Alam. |
| 10. Tuan Guru | Kampung Mulang Maya. |
| 11. Sutan Bumi nabung | Kampung Bumi Nabung. |
| 12. Dalem Kiay | Kampung Cahya Negeri. |
| 13. Haji Sarif | Kampung Blambangan Pagar. |
| 14. Sutan Ratu Sebuay Adam | Kampung Kotabumi Udik. |
| 15. Haji Daud | Kampung Mulang Maya. |
| 16. Raja Nimbang Dalem | Kampung Kotabumi Udik. |

Demikianlah sidang mengambil keputusan sebagai yang tersebut dibawah ini :

BAGIAN KE SATU :

Dari hal Bangsa dan suku Lampung menurut Adat Istiadat :

Pasal 1

Adapun bangsa Lampung itu terbagi atas beberapa tingkat, dan pada tiap-tiap tingkatan itu menurut keturunan dari perempuan (isteri) Penyimbang dalam Marga dan Sukunya Masing-masing.

Dan di bawah ini diterangkan tentang kedudukan Bangsa Lampung itu menurut adatnya :

1. PENYIMBANG BUMI
2. PENYIMBANG RATU
3. PENYIMBANG BATIN
4. PENYIMBANG RAJO
5. LAMPUNG JAJAR
6. S E B A H
7. B E D U W O
8. L A M B A N G
9. G U N D I K
10. T A B A N

Pasal 2

Adapun bangsa Lampung

a. **PENYIMBANG BUMI.**

Yaitu : Penyimbang yang berkuasa dan yang TERTUA dalam PEPADON dan sukunya, dan ialah sebagai ketua bertanggung jawab dalam segala urusan untuk menyelesaikan terhadap Luar dan Dalam. Dan ia adalah anak yang tertua dari isteri Ratu.

b. **PENYIMBANG RATU.**

Yaitu penyimbang kedua (PEPANG PENYAMBUT) dari pasal a. dan sebagai wakil ketuanya, didalam suku PEPADON itu, ialah keturunan dari isteri Ratu yang kedua (se Ibu dan se Bapak).

c. **PENYIMBANG BATIN.**

Yaitu penyimbang yang ke tiga, dan kekuasaannya sebagai Comisaris di dalam PEPADON dan suku itu, dan inilah keturunan (anak) dari isteri bangsawan (Isteri yang kedua) dan ia se bapak bukan se Ibu dengan penyimbang yang dalam pasal a. dan b.

d. **PENYIMBANG RAJO.**

Yaitu penyimbang yang ke empat, dan kekuasaan kurang dari kekuasaan a, b, c, dan inilah sebagai Comisaris kedua, dalam suku dan PEPADON itu, dan ia adalah keturunan (anak) dari isteri yang ketiga, dalam arti se Bapak bukan se Ibu, dari Penyimbang-penyimbang a, b, dan c.

e. **LAMPUNG JAJAR.**

Yaitu keturunan dari Penyimbang a, b, c, dan d, tetapi tidak pernah mengerjakan adat dan PENGEJUK-PENGAKUKNYA (berlaki dan beristeri) selalu tidak menurut saluran yang sebenarnya (tidak sesuai) dengan keadaan dirinya.

f. **S E B A H.**

Yaitu keturunan dari isteri yang kurang bangsanya, gunanya buat menjaga dan mengerjakan pekerjaan isteri Ratu dalam segala hal (PENAPU APAI).

g. **B E D U O.**

Yaitu keturunan dari isteri yang tidak berbangsa, dan pekerjaannya hanya untuk bekerja di dapur, (menyelenggarakan urusan isteri ratu).

h. **LAMBANG.**

Yaitu orang-orang pembawa isteri ratu, perempuan atau laki-laki, isteri atau bukan yang dibawa olehnya dari pihak orang tuanya sendiri, guna dijadikan budak, anak keturunan orang-orang inilah yang disebut LAMBANG itu.

i. **G U N D I K.**

Yaitu keturunan dari perempuan atau lelaki, yang asalnya dari jujur isteri Ratu, dan di kembalikan pula oleh Ibu/Bapak, (disesankan/dikembalikan lagi kepada isteri Ratu), maka yang semacam ini dan lain-lainnya disebut GUNDIK, dan dapat pula disebut LAMBANG.

j. **T A B A N.**

Yaitu orang-orang lelaki atau perempuan, yang di ketemukan di sembarang tempat, atau orang-orang yang terdapat dari rampasan (Balah) maka keturunan dari orang yang semacam inilah yang disebut TABAN.

Tentang Penyimbang-Penyimbang yang disebut pada pasal 2 terbagi atas beberapa bagian, sebagaimana yang di terangkan dibawah ini, yaitu :

a. Penyimbang Bumi itu terdiri atas 3 bahagian :

1. Penyimbang Bumi asal.

Artinya Penyimbang Bumi yang di dalam PEPADON mula-mula (PEPADON MARGA), maka oleh sebab itu, pada zaman dahulu ia disebut dan bernama PENYIMBANG, sebab di dalam sebuah Marga ada satu PEPADON saja, dan satu pula Penyimbangnyanya. Akan tetapi semenjak diadakan perubahan-perubahan yang akhir-akhir ini, maka PEPADON MARGA itu berpecah-pecah menjadi PEPADON KEBUAYAN, kemudian berpecah pula menjadi PEPADON TIUH (kampung), dan penghabisan berpecah menjadi PEPADON SUKU, hingga sampai sekarang ini demikian pula kekuasaan PENYIMBANG - PENYIMBANG itu makin lama makin berkurang menurut keadaan PEPADON nya, dan Pangkat Marga seluruhnya ada pada PENYIMBANG - PENYIMBANG itu tetapi sebagaimana biasa dan berubah. Oleh sebab itu PENYIMBANG - PENYIMBANG BUMI ASAL tersebut dapat dinamakan PENYIMBANG MARGA TITULER.

2. Penyimbang Bumi Biasa.

Artinya yaitu PENYIMBANG BUMI yang didalam PEPADON LIWAK (NYETIH), yang sedarah (saudara kandung) atau ia se Ibu dan se Bapak dengan PENYIMBANG BUMI ASAL (Sub. al).

3. Penyimbang Cetih.

Artinya PENYIMBANG BUMI yang di dalam PEPADON NYETIH, dan yang bukan sedarah, atau PENYIMBANG BUMI yang se Bapak/dan bukan se Ibu dari PENYIMBANG BUMI ASAL, dan PENYIMBANG BUMI BIASA, (sub. a = atau a 2).

b. Penyimbang Ratu asal.

Artinya PENYIMBANG RATU itu terbagi atas dua bahagian yaitu :

1. PENYIMBANG RATU ASAL, yaitu penyimbang ratu yang se Ibu se Bapak dengan PENYIMBANG BUMI, (sub. al dan a 2).

2. PENYIMBANG RATU CETIH, yaitu Penyimbang Ratu yang se Ibu se Bapak dengan PENYIMBANG BUMI BIASA (sub. al atau sub a 2).
3. PENYIMBANG BATIN, yaitu Penyimbang buka se Ibu dan se Bapak dari PENYIMBANG BUMI dan PENYIMBANG RATU, (Sub. al, 2, 3 dan bl, 2).
4. PENYIMBANG RAJO, yaitu Penyimbang yang bukan se Ibu dan bukan se Bapak dengan PENYIMBANG BUMI, PENYIMBANG RATU DAN PENYIMBANG BATIN.

BAB. KE DUA

Adapun rumah yang bernama NUWO, menurut keputusan sidang Perwatin Adat Lampung, yang ditentukan oleh PENYIMBANG-PENYIMBANG diatas sejak dahulu sampai sekarang, yaitu terbagi atas beberapa bagian, kemudian diberi nama sbb. :

1. KEBIK TEMEN, yaitu kamar pertama tempat kedudukan (ditunggu oleh PENYIMBANG BUMI).
2. KEBIK RANGEK, yaitu kamar kedua tempat kedudukan (ditunggu oleh PENYIMBANG BATIN).
3. KEBIK TENGAH, yaitu kamar ketiga tempat kedudukan (ditunggu oleh PENYIMBANG BATIN).
4. RANJANG TUNDO, yaitu kamar yang keempat tempat kedudukan (ditunggu oleh PINYIMBANG RAJO).
5. TENGAH NUWO (LAPANG AGUNG), yaitu tempat (ditunggu oleh LAMPUNG JAJAR).
6. SELEK SUKANG, yaitu tempat SEBAH.
7. TENGAH RESI, tempat BEDUO.
8. JUYU, yaitu tempat DAMANG.
9. DAPUR, yaitu tempat GUNDIK.
10. TENGAH TANEH, yaitu tempat TABAN.

BAB. KE III.

Dari hal mana tingkatan PEGAWO, (lelaki yang sudah beristeri)

Pasal 1.

PEGAWO BUMI, yaitu PENYIMBANG yang telah BEGAWI BULET PIRING, artinya tatkala bujang gadis berpengantenan (waktu bujangnya mengambil isteri Ratu), serta memakai alat penganten secara bagaimana

tata tertib Adat Lampung yang ditentukan, yaitu TEMU dengan Gawi, serta DIBEKAS dengan GAWI, dan terus KERUK TURUN MANDI dengan GAWI, artinya menurut Adat yang sedemikian pula, diwaktu itu juga.

Pasal 2.

PEGAWO RATU, yaitu penyimbang yang telah Bergawi, tetapi ia waktu mengambil isteri Ratunya (tatkala bujang gadisnya pengantenan) diambilnya dengan GAWI TEMU DUNGGAK PENAKAI, artinya penganten memakai secara adat yang telah ditentukan, serta di BEKAS DENGAN GAWI, tetapi tidak terus KURUK TURUN MANDI ketika itu, melainkan sesudah beberapa bulan lamanya dari pada itu (sekian lamanya), baru di GAWI kannya KURUK TURUN MANDI secara adat.

Pasal 3.

PEGAWO BATIN, yaitu PENYIMBANG yang telah bergawi, tetapi waktu ia mengambil isteri ratu (Pengantinannya menurut secara adat), diambilnya dengan GAWI dan terus KURUK TURUN MANDI, tetapi tidak DIBEKAS oleh mertuanya (artinya tidak di GAWIKAN dari pihak orang Tua si isterinya).

Pasal 4.

Pegawo rajo, yaitu penyimbang yang waktunya mengambil isteri yang ratu, (tatkala bujang gadisnya berpengantenan menurut adat istiadat yang telah ditentukan), serta dibekas DENGAN GAWI oleh pihak mertuanya (TEMU DIUNGGAK PENAKAI) tetapi tidak digawikan TURUN MANDI ditempatnya.

Pasal 5.

PEGAWO artinya waktu bujangan mengambil isteri yang Ratu telah me ngumpulkan penyimbang-penyimbang sreta makan minum dan memotong kambing serta NGEBAGI DAU SERATUS WO NGAPULUH RIBU (Rp.12.000,-) untuk pengesahan adek; inai dan amai (mengesahkan nama-nama ini) hanya memakai aliran adat saja, tidak serta memakai cara sebagaimana alat-alat ke ADATAN yang telah ditentukan.

Pasal 6.

PEGAWO MERANAI, artinya tatkala bujangnya ia telah beristeri, yaitu kawin dengan bekas isteri saudaranya yang tua, (nyemalang) janda mati

suaminya, tetapi dalam perkawinannya itu dengan memotong kerbau serta mengundang para PENYIMBANG—PENYIMBANG makan dan minum, terus membagi WALU LIKUR TIAS (Rp.28,-) dan sudah sah diberi gelar nama ADEK DAN AMAI.

Pasal 7.

JENG KEMENGIANAN, artinya waktu ia mengambil isterinya DAU NYA (jujurnya) sudah cukup tetapi ia masih tinggal di rumah orang tuanya/rumah si isteri (mertuanya) sebab rumahnya tidak ada atau familinya tidak ada, ataupun ia belum suka kembali kerumahnya atau tempatnya, sebab senang hatinya atau sesuatu sebab dan lain-lain.

Pasal 8.

PENGISIK, artinya waktu ia mengambil isteri DAU (jujurnya) telah cukup tetapi si isteri belum dikasih (diperkenankan) orang tuanya dibawa pulang kerumahnya sendiri, sebelum saudaranya atau kemenakannya ataulain-lain famili si isteri itu belum besar (dewasa umurnya) atau lain-lain sebab.

Pasal 9.

PULANG MATTU, artinya waktu bujangnya mengambil isteri jujurnya (SEREHNYA) belum cukup menurut permintaan ahli famili si isteri tersebut, maka ia itu sebelum cukup jujur tersebut, ia masih tetap tinggal bersama-sama dirumah si isteri itu (pihak orang tua si isteri itu) sebelum ia memenuhi permintaan ahli famili/orang tua si isteri tadi, dan kapan saja waktunya permintaan jujur (SEREHNO) dapat dicukupi/dipenuhi baru ia dapat diperkenankan pulang kembali ketempatnya sendiri, serta membawa isterinya itu.

BAB KE EMPAT

DARI HAL HARGA - HARGA JUJUR MENURUT TINGKAT BANGSA LAMPUNG YANG TERSEBUT PADA BAB I PASAL 1.

Pasal 1.

PENYIMBANG BUMI ASAL, (PENYIMBANG MARGA NYETIH/TITULER) PENYIMBANG BUMI BIASA, PENYIMBANG BUMI NYETIH, DAN PENYIMBANG RATU ASAL, harga-harga jujur men-

jujurnya (PENGEJUK PENGAKUKNO/IBAL MENGIBALNO) kalau terhadap luar marga, yaitu PAKE LIKUR DAW RIYAL (2400 rial = Rp.4.800,-) dan KIBAU PAN LIKUR atau 924 kerbau)

Pasal 2.

PENYIMBANG BUMI ASAL, (PENYIMBANG MARGA NYETIH/TITULER), PENYIMBANG BUMI BIASA, harga jujurnya, (PENGEJUK PENGAKUKNO/IBAL MENGIBALNO) kalau terhadap luar marga, yaitu juga dalam marga = WO BELAS RATUS Rp.1.200,- rial (Rp. 1.200,-) dan kibau wo belas (12 ekor Kerbau).

Pasal 3.

PENYIMBANG BUMI NYETIH DAN PENYIMBANG RATU ASAL, HARGANYA Rp.1600,- (walau ratus rial kiabau walau).

Pasal 4.

PENYIMBANG RATU NYETIH harganya ENAM RATUS RIAL dan KEBAU NEM (Rp.1200,-)

Pasal 5.

PENYIMBANG BATIN harganya PAK RATUS RIAL DAN KIBAU PAK (Rp.800,-)

Pasal 6.

PENYIMBANG RAJO harganya WO RATUS RIAL DAN KIBAU (Rp.400,-)

Pasal 7.

LAMPUNG JAJAR harganya SERATUS RIAL DAN KIBAU (Rp.200,-)

Pasal 8.

SEBAH harganya WALAU NGAPULUH RIAL (Rp.160,-)

Pasal 9.

BEDUWO harganya NEM PULUH RIAL (Rp.120,-)

Pasal 10.

LAMBANG harganya PAKNGAPULUH RIAL (Rp.80,-)

Pasal 11

GUNDIK harganya WONGAPULUH RIAL (Rp.40,-)

Pasal 12.

TAMBAN harganya BIAS SAKULAK MANUK BERAK PALING, dan KELAPO TUMBUH (artinya segantang beras dan seekor ayam jago turut sebuah kelapa tumbuh).

NB.

Dari pasal 7 sampai pasal 11, dari hal harga-harga pakaian PENYIMBANG - PENYIMBANG menurut tata tertib/Adat istiadat Lampung yang telah ditentukan semenjak dari zaman nenek moyang hingga sekarang ini yaitu sebagai tercantum di bawah ini (PAKAIAN MINJAK MISSAN) artinya yaitu pakaian serentak apabila ia akan melakukan pekerjaan secara Adat.

BAB KE LIMA

MENGENAI DARI HAL HARGA - HARGA BARANG - BARANG PANGKAT KEPENYIMBANGAN sbb.

- a. KASAI, yaitu artinya alat pembersihan
- b. PANANJARAN, yaitu artinya persamaan.
- c. PENETARAN, yaitu artinya pemberesan.
- d. PENERANGAN, yaitu artinya menerangkan.
- e. IGO, yaitu artinya kesimpulan harga dan lain-lain, sebagai mana yang terdaftar di bawah ini yaitu :

No.	Nama barang ² Pangkat	KASAI	Penan jaran	Penetar an	Penerang- an	IGO (harga)
1	Payung Hijau	f. --	f.12,-	f.48.-	f.18.40,	f.30,-
2.	Sekalang	f. --	f.12,-	f.44,-	f.18.40,	f.30,-
3.	Payung Andak	f. --	f.12,-	f.44,-	f.18.40,	f.30,-
4.	Payung kuning	f. --	f.12,-	f.44,-	f.18.40.	f.30.-
5.	Rurung Agung	f. --	f.12,-	f.44,-	f.18.40.	f.30.-
6.	Rato tuho se- munnya	f. 6,-	f.12,-	f.--	f.920.-	f.30.-

No.	Nama Barang ² Pangkat	KASAI	Penan jaran	Penetar an	Penerang- an	IGO (harga)
7.	Rato Balak	f. 8,-	f.30,-	f.--	f.18.40.	f. 30,-
8.	Lunjuk Balak	f. 8,-	f.30,-	f.--	f.18.40.	f. 30,-
9.	Serai serumpun	f. 12.-	f.30.-	f.30,-	f.18.40.	f. 30,-
10.	Paccah aji	f. 8.-	f.30.-	f.--	f.18.40.	f. 30,-
11.	Masjid	f. 8.-	f.30.-	f.--	f.18.40.	f. 30,-
12.	Balai Keratun	f. 12.-	f.30.-	f.--	f.36.80.	f. 30,-
13.	Rato Ulu Wo	f. 12.-	f.30.-	f.--	f.18.40.	f. 30,-
14.	Pesiban	f. 12.-	f.30.-	f.--	f.18.40.	f. 30,-
15.	Koto Maro (puade)	f. --	f.24.-	f.--	f.60.-	f. 30,-
16.	Lelangit (lluhur)	f. --	f.--	f.--	f.920.-	f.184,-
17.	Lunjuk lunik	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
18.	Jpano	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
19.	Kyu Aro	f. 2.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
20.	Lawangkuri (atapnya)	f. 2.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
21.	Juli	f. 4.-	f.12	f.--	f.920.-	f.92,-
22.	Panggo talam bekaki	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
23.	Burung garudo	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
24.	Burung suari	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
25.	N a g o	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
26.	Singo	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
27.	Gajah	f. 4.-	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
28.	Tejuru telapah	f. --	f.12.-	f.--	f.920.-	f.92,-
29.	Tejuru; Punduk sa- buk andak.	f. --	f. 6.-	f.--	f.920.-	f.92,-
30.	Reragom talobalak	f. --	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
31.	Tabuh Jawo	f. --	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
32.	Awan telapah	f. --	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
33.	Kandang rarang	f. --	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
34.	Sigor wo tarup	f. --	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
35.	Timbak Wo Penahasan	f.--	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
36.	Timbak Tigo Penahasan (serabang buluh)	f.--	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
37.	Kayu Agung, Buahnya	f.12 -	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
38.	Panggo Talam	f. 2.-	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-
39.	Jambat penegian	f. 6.-	f.--	f.--	f.920.-	f.92,-

..... bab ke enam s/d bab ke sembilan belas dst

BAB KE SEMBILAN BELAS

..... Pasal 1 s/d 7 dsb.

Pasal 8.

Semua perselisihan yang mengenai adat istiadat, keturunan atau pakaian harus memakai hakim adat, terdiri dari Penyimbang-penyimbang (Perwatin) adat Lampung (Ulu Pepadon) dan dalam sidangnya ini selain dari orang-orang yang berhak (Penyimbang Bumi/Ulu Pepadon) selain dari pada itu berhak mendengar, tetapi tidak berhak mempertimbangkan dan memutuskan, terkecuali memberi advis advis.

Pasal 9.

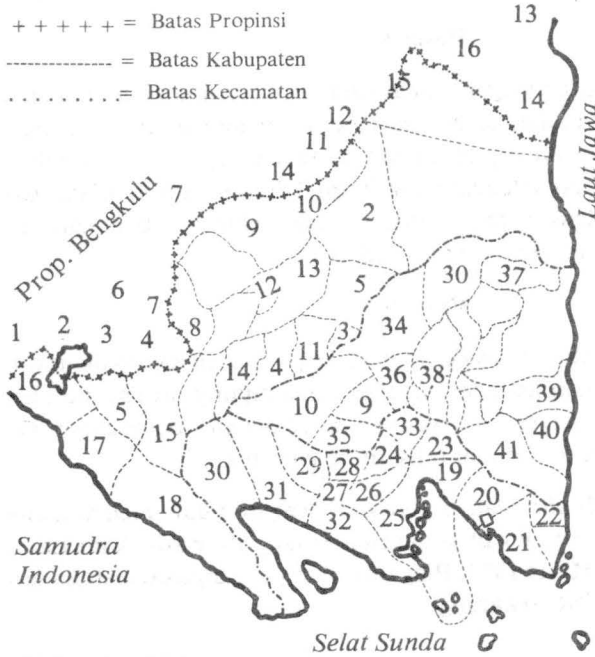
Tiap-tiap daw adat, sedikit banyaknya harus dipotong 10 % pokok untuk mengisi keuangan organisasi adat yang ada dikampung itu dan notulen diselenggarakan oleh Secretaris organisasi adat dengan potongan 5 %, dengan arti menyumbang alat-alat tulis untuk gawi itu.

Demikianlah disalin dan diperbaiki dengan tidak menyimpang Adat Lampung Nunyai menurut keputusan Sidang Perwatin Adat Lampung pada tanggal 20 Maret 1973. Piagam inilah yang dipakai oleh Badan PERWATIN LAMPUNG sekarang.

LOKASI SUKU LAMPUNG

PETA PROPINSI LAMPUNG
(Skala 1 : 2.550.000)

- +++++ = Batas Propinsi
- = Batas Kabupaten
- = Batas Kecamatan



Kecamatan-kecamatan di Lampung Utara :

1. Menggala
2. Tulangbawang Tengah
3. Abung Timur
4. Abung Selatan
5. Tulangbawang Udik
6. Pakuon Ratu
7. Sungkai Utara
8. Sungkai Selatan
9. Kotabumi
10. Abung Barat
11. Baradatu
12. Belambangan Umpu
13. Bahuga
14. Belalau
15. Balik Bukit
16. Pesisir Utara
17. Pesisir Tengah
18. Pesisir Selatan

Kecamatan-kecamatan di Lampung Selatan :

19. Panjang
20. Ketibung
21. Kalianda
22. Penengahan
23. Natar
24. Gedong Tataan
25. Padang Cermin
26. Kedondong
27. Parda Suka
28. Pagelaran
29. Talang Padang
30. Wonosobo
31. Kota Agung
32. Cukuh Balak
33. Telukbetung Selatan

Di Sumatera Selatan :

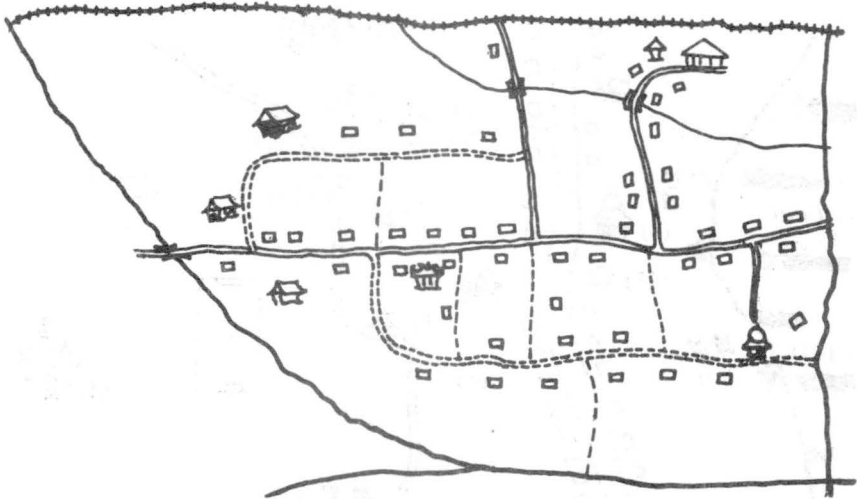
1. Kaur (Bengkulu)
2. Kec. Banding Agung
3. Kec. Muara Dua
4. Simpang
5. Martapura
6. Kurungan Nyawa
7. Cempaka
8. Martapura
9. Gumawang (Oku Sumsel)
10. Muara Kuang
11. Tanjung Lubuk
12. Kayu Agung
13. Tulang Selapan
14. Pagar Dewa
15. Pampangan
16. Tanjung Raja

Kecamatan-kecamatan di Lampung Tengah :









34. Padang Ratu
35. Terbanggi Besar
36. Seputih Mataram
37. Gunung Sugih
38. Seputih Surabaya
39. Sukadana
40. Labuhan Meringgai
41. Jabung


Lampiran IV a.

Peta : Desa Blambangan



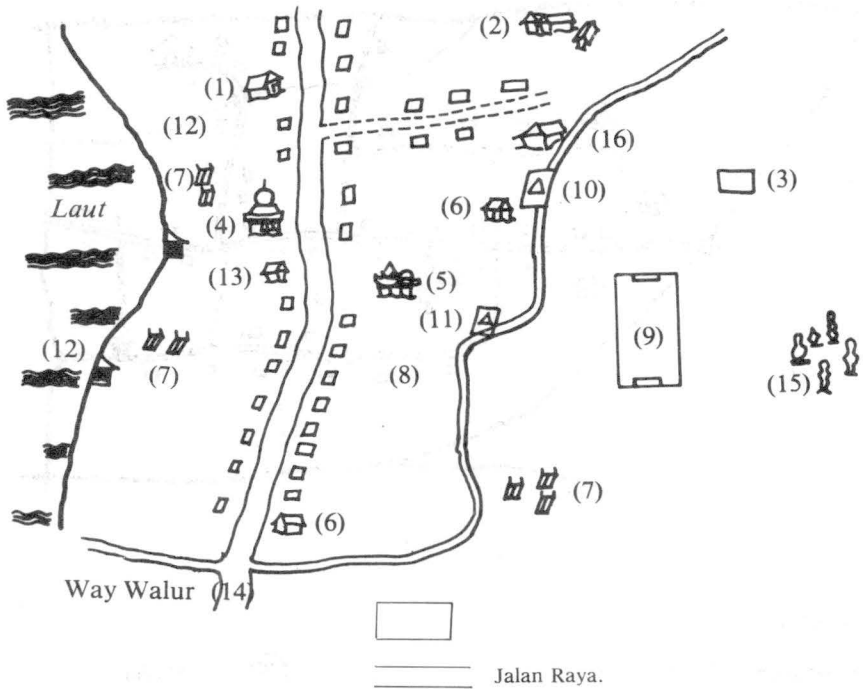
LEGENDA :

-  Jalan Kereta Api
-  Batas Desa
-  Jalan Negara
-  Jalan Aspal
-  Jalan Berbatu
-  Jalan Tanah
-  Sungai
-  Jembatan

-  : Stasiun
-  : Kantor
-  : Rumah adat
-  : Balai Desa
-  : Sekolah
-  : Mesjid
-  : Rumah penduduk

Lampiran IV b.

Peta : Dusun Walur

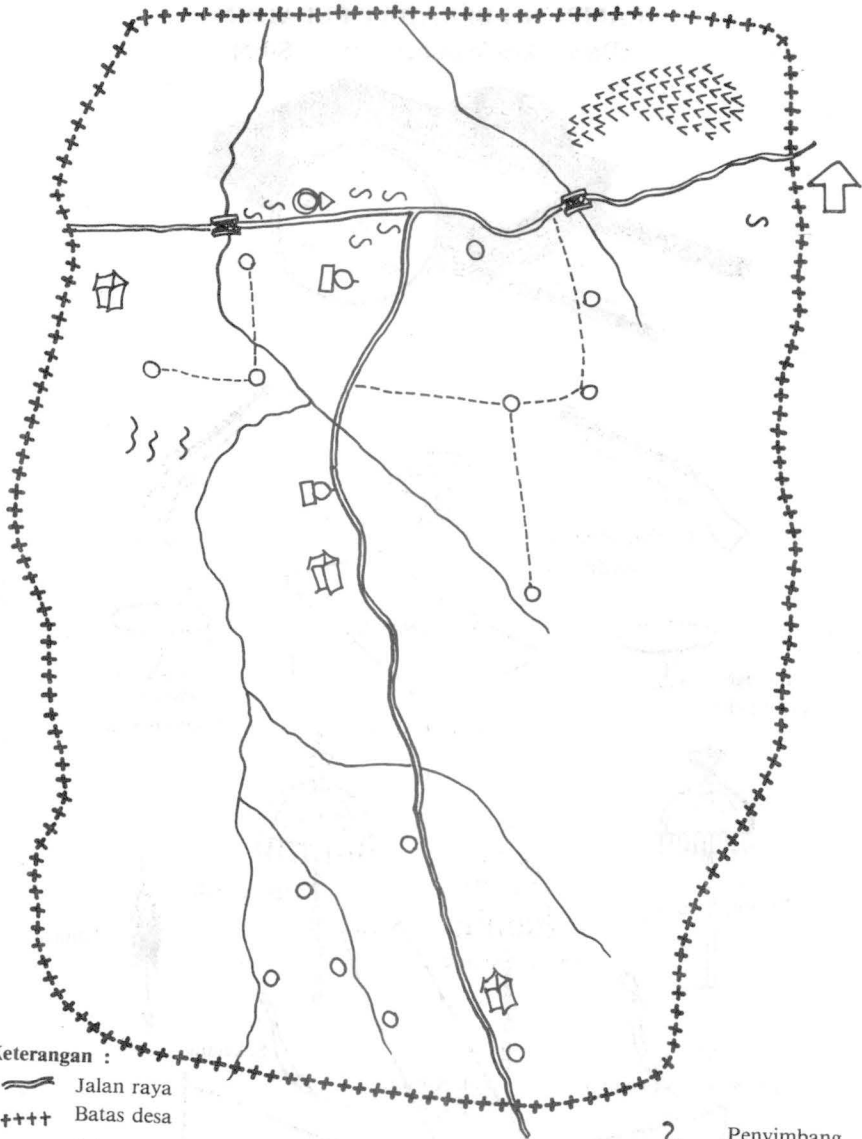


Keterangan Gambar :












- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Rumah Kantor Kepala Kampung | 9. Lapangan bola kaki |
| 2. SD Inpres | 10. Pangkalan pria (bakas) |
| 3. Makan Cakal balak | 11. Pangkalan wanita (bebai) |
| 4. Masjid | 12. Papanca-papanca (pusiban) |
| 5. Rumah Kepala adat (Lamban balak) | 13. Rumah guru mengaji |
| 6. Surau-surau | 14. Jembatan |
| 7. Kuburan-kuburan | 15. Daerah Purbakala (situs) |
| 8. Perkampungan lumbung padi | 16. Sesat (tempat belajar pencak silat) |

 Rumah-rumah penduduk.

Peta : Desa Kedondong

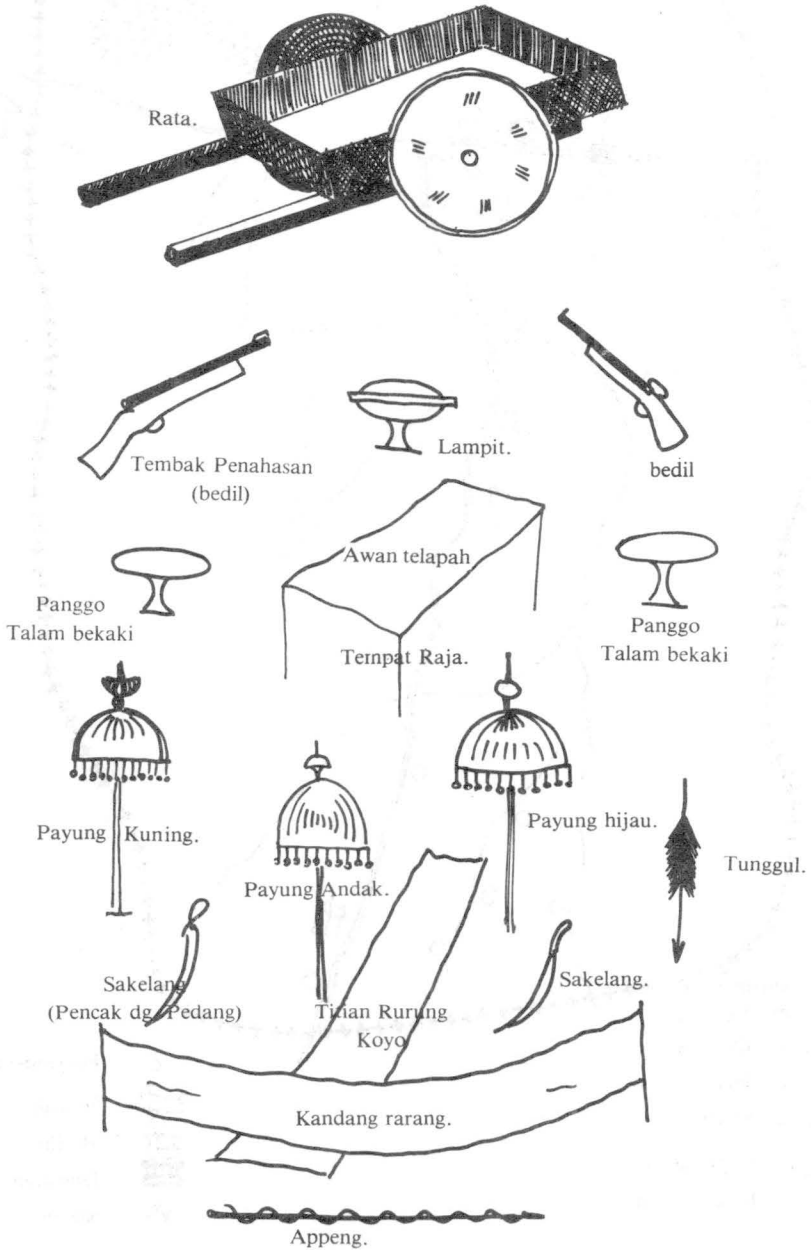


Keterangan :

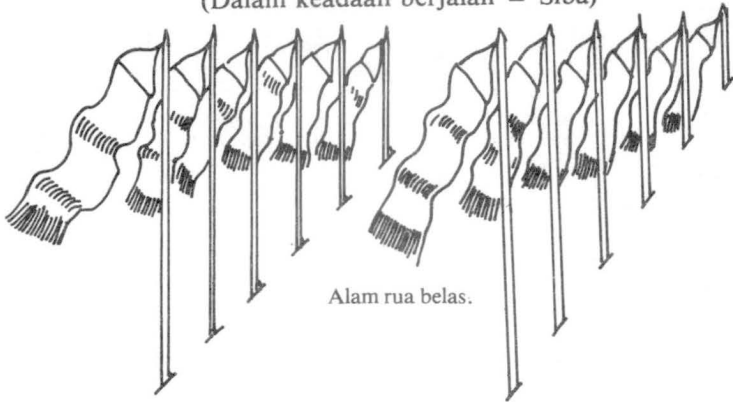
-  Jalan raya
-  Batas desa
-  Jalan setapak
-  Sungai
-  Kepala desa
-  Kepala dusun
-  Penyimbang
-  Sejolah
-  Mesjid
-  Jembatan
-  Sawah

**SUSUNAN ATRIBUT KEPENYIMBANGAN
LAMPUNG BERADAT PEPADUN**

(Dalam keadaan berjalan = Sibon)



**SUSUNAN ATRIBUT KEPENYIMBANGAN
LAMPUNG BERADAT SAIBATIN**
(Dalam keadaan berjalan = Siba)



Alam rua belas.



Tungkeng
(dana)



Lampit
(alas duduk)



Pesirehan
(siirih/rukuk)



Pahar
(makanan)



Pahar

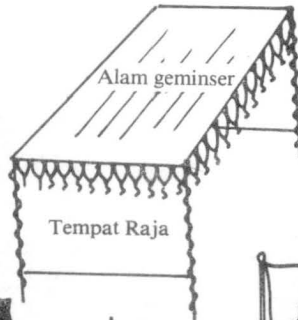
Tanda kebesaran



Topeng
Punakawan



Topeng
Punakawan



Alam geminsir

Tempat Raja



Tunggul



Bendera



Payung Gubir.



Panji.

Tunggul.



Pedang pengawal.



Pedang pengawal.

Perpustakaan
Jendera

30